



BEGAWAN POLITIK

Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan



"Saya sangat senang dan mengapresiasi terbitnya buku karya Rofiq Mahfudz yang mengurai kiprah politik kerakyatan KH. Maimoen Zubair dan KH. Mohammad Cholil Bisri. Semoga bermanfaat."

KH. Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama Republik Indonesia



"Buku yang ditulis oleh saudara Rofiq Mahfudz, salah satu kader terbaik NU Jawa Tengah, berhasil memotret langkah dan pilihan politik beberapa kiai yang terlibat di dalam partai yang berbeda-beda, seperti *Allahu Yarham* KH. Maimoen Zubair yang bergabung di PPP dan *Allahu Yarham* KH. Cholil Bisri yang sebelumnya menjadi bagian dari PPP kemudian mendirikan partai baru, PKB, bersama sejumlah kiai lainnya. Kedua kiai ini meski berbeda partai, tapi tetap menjalin persaudaraan yang kuat dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan partai sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas."

Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama



Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si adalah wakil sekretaris PWNU Jawa Tengah periode 2019-2023, dan wakil bendahara pada periode 2013-2019. Pria kelahiran Rembang, 5 Maret 1973 ini selain aktif di PWNU Jawa Tengah, juga tercatat sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, serta menjadi pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rois Cendekia Ngaliyan Semarang. Beberapa karyanya antara lain *Election Regulation Ambiguity in Political Party Financing* (2022), dan *The Decline of Political Party Public Financing and the Emergence of Political Cartel in Indonesia* (2022).



Lawwana.com

PenerbitLawwana

PenerbitLawwana

PenerbitLawwana

Kategori: Islam



Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

BEGAWAN POLITIK

Prolog:
KH. Yaqut Cholil Qoumas
(Menteri Agama RI)

Epilog:
Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA
(Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)



BEGAWAN POLITIK

Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

BEGAWAN POLITIK

*Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan,
Kemandirian, dan Kesejahteraan*

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

Penerbit



Lawwana

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).



BEGAWAN POLITIK

**Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan,
Kemandirian, dan Kesejahteraan**

KATALOG DALAM PENERBITAN (KDT)

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

Begawan Politik : Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan/ Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si, -Cet. 1 - Semarang, CV Lawwana, 2023.

viii+158 hlm.; 14 x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5514-64-2

I. Islam II. Judul III. Rofiq Mahfudz

297

Begawan Politik : Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan

©Copyright Lawwana

Cetakan Pertama, April 2023

hlm: viii+158 14 cm x 20,5 cm

ISBN : 978-623-5514-64-2

Penulis : Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

Penyunting : Ali Romdhoni & Khoirul Anwar

Cover & Layout : M. Danil Aufa

Diterbitkan oleh:

CV Lawwana

Jl. Totem VI B9 No. 22 Kel. Sadeng,

Kec. Gunungpati, Semarang Jawa Tengah.

penerbit@lawwana.com | CP: 081-226-888-662

Lawwana.com

©Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 28 Tahun 2014

Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar Penulis



Alhamdulillah, penulis bersyukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik dan bisa hadir sebagai karya ilmiah dalam khazanah pemikiran politik kontemporer.

Fokus pembahasan buku ini seputar dinamika politik kiai (pesantren) dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam penelusuran penulis, KH. Cholil Bisri dan KH. Maimoen Zubair adalah dua figur yang mampu memberi inspirasi bagaimana berpolitik yang bermartabat, dan berorientasi untuk membangun masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dua tokoh di atas tidak hanya seorang politisi, tetapi juga “begawan politik” yang hadir di tengah publik sebagai sosok pengayom dan panutan yang mencerahkan. Menghadirkan tokoh-tokoh yang menyejukkan seperti ini menjadi penting untuk dilakukan karena hari ini politik diasumsikan banyak pihak sebagai hal-ihwal yang identik dengan perebutan kekuasaan. Imbas dari asumsi ini kemudian diekspresikan dengan ambisi-ambisi tanpa batas. Pada akhirnya, segala cara dihalalkan untuk merebut kekuasaan itu sendiri.

Penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam penulisan buku ini. Kepada Menteri

Agama RI KH. Yaqut Cholil Qoumas yang telah berkenan memberikan prolog, dan Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA yang sudi memberikan epilog, serta semua sahabat yang menjadi teman diskusi, dan Penerbit Lawwana yang telah menerbitkan buku ini, semuanya penulis haturkan terima kasih, *jazakumullah ahsanal jaza'*.

Semoga upaya menghadirkan keteladanan politik *rahmatan lil 'alamin* KH. Cholil Bisri dan KH. Maimoen Zubair dapat menjadi oase di tengah panasnya terik pertarungan politik saat ini yang kerap direduksi sebagai ajang perebutan kekuasaan.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, saran dan kritik dari pembaca selalu penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semarang, 18 April 2023

Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis	v
Daftar Isi.....	vii
PROLOG:	
Belajar dari Kiai Begawan Politik	1
Oleh: KH. Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama Republik Indonesia)	
Bab I:	
Pesantren dan Politik: Ketika Kiai Harus Turun Gunung	7
Pesantren Mejawab Kebutuhan Masyarakat	7
Kiai di Panggung Sosial dan Politik	10
Rembang dan Basis Kiai yang Berpolitik	14
Fokus Kajian Buku	19
Bab II:	
Kajian Politik Kaum Sarungan dalam Literatur	23
Bab III:	
Metode Kajian dan Sumber Data.....	29
Membaca Selera Pemilih Partai	34
Faktor-Faktor yang Menentukan Pilihan Politik	43
Bab IV:	
Masyarakat Santri Memilih Politik.....	47
Membaca Peta Politik Masyarakat Santri	47
Posisi Kiai dalam Perpolitikan di Masyarakat Santri	51

Bab V:	
Dinamika Politik Kiai	55
Konstelasi Politik Kiai Pasca Reformasi	55
Partai Islam Jilid Kedua	58
Bab VI:	
Pelajaran dari Rembang: Berpisah untuk Berbagi Tugas... 63	
Rembang Tempo Dulu	64
Bab VII:	
Pendidikan Politik dari Pesantren	73
Tradisi Meredam Potensi Konflik Politik	73
Pendidikan Tentang Politik	75
Metode Pendidikan Politik Ala Pesantren	79
Indoktrinasi Sosio-Kultural	82
Bab VIII:	
Melahirkan Masyarakat Santri yang Berdaya.....	87
Bab IX:	
Mencari Figur Politikus.....	93
KH. Maimoen Zubair: Teguh Pendirian, Setia Mendampingi Umat	95
KH. Cholil Bisri: Tegas dalam Sikap, Jeli Membaca Situasi	107
EPILOG:	
Politik Kiai, Kemaslahatan Umat, dan Juru Damai.....	117
Oleh: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA (Rais Syuriah PBNU)	
Daftar Pustaka.....	121
Lampiran-Lampiran	127
Tentang Penulis.....	156

PROLOG

Belajar dari Kiai Begawan Politik

Oleh: KH. Yaqut Cholil Qoumas

Menteri Agama Republik Indonesia



Pemahaman umum terhadap politik, dunia politik dan semua yang terkait dengannya sudah terlanjur penuh dengan konotasi negatif. Korupsi, pamer kekayaan dan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Bahkan, sebagian masyarakat sudah menyimpulkan politik itu kotor. Asumsi ini mendapat pembenaran dengan perilaku para politisi sendiri, sebagaimana bisa dilihat melalui berbagai media. Pemahaman seperti ini tentu tidak semua benar.

Publik semestinya diedukasi dengan komprehensif bahwa politik itu mulia. Aristoteles menyatakan bahwa politik bertujuan untuk menciptakan kehidupan publik yang lebih baik. Kemaslahatan publik itulah yang menjadi sasaran utamanya. Al-Mawardi (386 H/ 975 M) dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan, politik dalam konteks kepemimpinan (*al-imamah*) berperan sebagai pengganti posisi kenabian dalam rangka untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (*maudhu'at li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya*).

Pandangan filosof di atas merupakan rumusan politik yang ideal (*high politic*). Politik selalu berkaitan dengan

ikhtiar mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan adil. Warga bertemu di majelis pengajian, tahlilan atau manaqiban, setelah selesai acara inti lalu mereka membicarakan soal bagaimana seharusnya negara ini dikelola dan diatur, inilah politik.

Para santri atau mahasiswa bertemu di warung kopi, lalu mendiskusikan soal keadilan yang makin jauh dirasakan oleh masyarakat. Kemudian, mereka mengusulkan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin agar dapat mewujudkan keadilan, dan apa yang seharusnya dikerjakan oleh warga agar keadilan segera membumi, ini juga politik. Politik dalam konteks luas selalu membicarakan apa saja yang muaranya agar kehidupan kita makin baik dan maslahat. Menjaga NKRI tetap utuh, merawat kebhinekaan atau melindungi minoritas yang lemah juga merupakan politik.

Belakangan, diskusi politik tingkat tinggi (*high politic*) cenderung dihindari. Terlalu mengawang dan tidak membumi. Lebih-lebih pada tingkat praktis, politik selalu dimaknai politik praktis (*day to day politic*). Pengertian politik sebagaimana disebut Harold Lasswell, yang paling mengemuka. Politik selalu berkaitan dengan masalah siapa memperoleh apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when and how*). Politik pada akhirnya hanya urusan kekuasaan, baik untuk memperoleh maupun mempertahankannya. Inilah yang membuat reputasi politik anjlok akibat ulah politisi.

Politik juga tidak melulu berkaitan dengan kompetisi dan kontestasi. Jika politik dipahami dalam dua konteks itu, pantas saja politik itu panas dan saling mematikan. Jangankan antar kader partai politik, bahkan sesama kader partai

politikpun, bisa jadi saling menghabisi. Politik tidaklah sejahat itu. Jika ada politisi yang berperilaku demikian, kemungkinan ia tidak ngaji atau tidak khatam ngaji politik. Bahwa politik harus berjuang iya. Bahkan kalau perlu, politisi harus bertarung untuk memenangkan kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Di sinilah kita mendapat keteladanan dari sikap para kiai yang terjun di dunia politik.

Di tangan para kiai politik, politik merupakan medan dakwah untuk memperbaiki nasib umat. Bagaimana rakyat secara merata mendapatkan haknya untuk belajar, berpenghidupan yang layak, dapat menjalankan ajaran agamanya dengan leluasa, dan menjadi manusia yang bermartabat. Dalam konteks ini, kaum santri di Indonesia sungguh beruntung karena menemukan pembelajaran dan keteladanan dari pada para kiai politik.

Cukup banyak kiai yang terjun dan berkhidmah di dunia politik. KH. Abdurrahman Wahid (7 September 1940-30 Desember 2009) adalah salah satunya. Dari Gus Dur kita belajar bagaimana berpolitik secara bermartabat dan adiluhung. Gus Dur pernah dikhianati oleh temannya sendiri, tetapi tidak membalasnya. Gus Dur mengajarkan kepada kita, di atas politik ada persaudaraan yang harus dijaga. Dari Gus Dur, kita diajak untuk membela yang lemah dan minoritas. Masih banyak lagi teladan politik yang bisa digali, baik dari pemikiran maupun praktik politik dari Gus Dur.

Di kota kecil yang berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah, kita menemukan oase teladan politik yang menyegarkan. Nama kota ini Rembang, melahirkan banyak sekali kiai politisi yang layak ditimbang. Dua diantaranya adalah KH. Maimoen Zubair (28 Oktober 1928-6 Agustus

2019) dan KH. Mohammad Cholil Bisri (12 Agustus 1942-23 Agustus 2004). Mbah Mun dan Mbah Cholil masih bersaudara. Meski secara usia lebih sepuh, Mbah Mun memanggil Lek kepada Mbah Cholil. Mbah Mun tinggal di Sarang (Rembang Timur), Mbah Cholil tinggal di Leteh (Rembang Kota/ Barat).

Keduanya kiai-politisi kaliber nasional. Pernah aktif dalam satu partai, tetapi kemudian berpisah karena situasi dan kondisi. Mbah Mun, sampai akhir hayat masih di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sementara Mbah Cholil mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meski beda partai, keduanya bersaudara dalam pengertian yang sesungguhnya. Momentum haul menjadi momentum yang gayeng bagi kedua keluarga. Mbah Mun pasti hadir dan memberi tausiyah pada acara haul keluarga Leteh. Di sela mengisi pengajian, Mbah Mun menyelipkan guyonan yang menyerempet isu-isu politik membuat *mustami'in* ikut *gereran*.

Mbah Cholil, selain abah saya, beliau juga guru politik saya. Kata orang-orang, saya mewarisi keberanian dan ketegasan sikap dalam berpolitik. Mbah Cholil, sekali lagi kata orang-orang, kiai-politisi yang *humble* dan merakyat. Suka membantu dan memberi solusi kalau diminta bantuan atau ditanya, meskipun yang datang orang biasa. Mbah Cholil berjuang di politik hampir sepanjang hayatnya, baru belakangan saja menikmati hasil perjuangannya, itupun tidak lama.

Dalam pikiran dan praktik kehidupan Mbah Mun dan Mbah Cholil (*Allahu yarhamhuma*), politik telah melampaui orientasi duniawi, dan selebihnya menjalankan mandat kebangawanan. Keduanya hidup sederhana, sangat-sangat

sederhana. Kita bisa mendengar cerita kiprah para kiai, atau mengamatinya langsung melalui rekam jejaknya dalam kebersamaan masyarakat bawah. Selain pengasuh pesantren yang dengan penuh dedikasi menghabiskan waktu untuk mendidik para santri, mereka juga melayani masyarakat dan ditambah lagi dengan memperjuangkan nasib orang banyak melalui jalur politik praktis.

Kita semestinya tersindir dengan gaya hidup yang ditampilkan oleh para ulama sepuh terdahulu dalam mengabdikan diri untuk kepentingan orang banyak. Terlebih kaum santri, sudah semestinya tidak kehilangan kiblat dalam menjalani dinamika kehidupan—termasuk dalam berpolitik—yang dewasa ini semakin kehilangan batas-batas etis dan moralitas.

Saya sangat senang dan mengapresiasi terbitnya buku karya Rofiq Mahfudz yang mengurai kiprah politik kerakyatan KH. Maimoen Zubair dan KH. Mohammad Cholil Bisri. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 6 April 2023



BAB I

Pesantren dan Politik: Ketika Kiai Harus Turun Gunung



Pesantren Jawab Kebutuhan Masyarakat

Masuknya ajaran Islam ke daerah pedesaan, terutama pesisir, di Pulau Jawa segera diikuti dengan mengalirnya buku-buku agama Islam berbahasa Arab atau disebut kitab kuning. Dari sini berkembang sistem pendidikan yang umumnya mengambil bentuk *halaqah* (secara harfiah bermakna lingkaran), yaitu model pendidikan dengan sistem menyerupai berdiskusi yang formasi pesertanya membentuk lingkaran, dan berjumlah terbatas.¹

Pada periode berikutnya, sistem *halaqah* kemudian identik dengan model pendidikan yang dipakai di lingkungan pesantren. Dengan dipimpin langsung oleh seorang kiai, para santri mempelajari satu jenis kitab (literatur keislaman klasik) hingga *khatam* (tamat; selesai) baru pindah ke jenis kitab yang lain. Model ini masih berlaku di pesantren-

¹Baca Ali Romdhoni (editor), *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Cirebon: Fahmina Institute, 2008), hlm. 306.

pesantren hingga dewasa ini. Konon, model seperti ini lazim berlaku di daerah Basrah dan Bagdad (Irak).

Di Pulau Jawa, pondok pesantren dipimpin seorang kiai yang sangat dihormati (banyak juga yang sampai dikeramatkan) oleh para santri dan masyarakat di lingkungan setempat. Selain mendidik para santri di pondok, para kiai juga memberikan pelajaran dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam ilmu keagamaan. Melalui tarekat,² seorang kiai mendampingi murid-muridnya yang kebanyakan terdiri dari masyarakat umum untuk menapaki perjalanan spiritual. Di sini, seorang kiai atau syaikh tarekat dipandang sebagai *wali* (kekasih Tuhan) dengan segala kemampuan ilmu agamanya yang tinggi. Oleh karena itu, kiai dan guru tarekat di pesantren sangat dikeramatkan dan berwibawa.

Menurut Denys Lombard, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang merupakan kelanjutan dari *mandala*, suatu lembaga pendidikan keagamaan pra Islam. *Mandala* telah ada sejak sebelum Kerajaan Majapahit berdiri dan berfungsi sebagai pusat pendidikan dan keagamaan.

Pesantren di Indonesia merupakan kerangka sistem pendidikan Islam tradisional di Jawa dan Madura. Semua lembaga pesantren adalah lembaga swasta, di mana kemandirian merupakan salah satu ciri utama dari pesantren. Sejak awal, keberadaan guru (kiai) dan santri mayoritas berasal dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Meskipun demikian, lembaga pesantren masih bisa eksis dan bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun.

²*Tarekat* berasal dari kata *thariqah*, dalam bahasa Arab mempunyai arti "jalan". *Tarekat* dikenal sebagai aliran keagamaan yang memberikan pendidikan keagamaan, khususnya dalam ilmu tasawuf.

Pada tahun 1942 jumlah pesantren di Pulau Jawa mencapai 1.871 pesantren dengan jumlah santri saat itu sebanyak 139.355 santri. Di wilayah Jakarta terdapat 167 pesantren dengan menampung santri sebanyak 14.513; Jawa Barat 1.046 pesantren dengan 69.954 santri; Jawa Tengah 351 pesantren dengan 21.957 santri; dan Jawa Timur terdapat 307 pesantren dengan jumlah santri jumlah santri sebanyak 32.931.

Pada tahun 1977 jumlah pesantren di Jawa meningkat menjadi 3.745 pesantren, dengan jumlah peserta didik mencapai 677.384 santri. Kecuali di Jakarta, jumlah pondok pesantren di Pulau Jawa rata-rata mengalami peningkatan. Di Jakarta terdapat 27 pesantren dengan 15.767 santri, di Jawa Barat terdapat 2.237 pesantren dengan 305.747 santri, di Jawa Tengah terdapat 430 pesantren dengan 65.072 santri, dan di Jawa Timur terdapat 1.051 pesantren dengan 290.798 santri.

Jumlah pesantren di atas terus bertambah. Pada tahun 2005 jumlah lembaga pendidikan keagamaan tradisional itu mencapai angka 9.407 pesantren, dengan jumlah santri naik menjadi 2.252.180. Di Jakarta terdapat 77 pesantren dengan 19.350 santri, di Jawa Barat terdapat 3.561 pesantren dengan 620.712 santri, Jawa Tengah terdapat 2.187 pesantren dengan 442.862 santri, dan di Jawa Timur ada 3.582 pesantren dengan santrinya mencapai 1.169.256.³

Sementara itu, di Provinsi Jawa Tengah sendiri jumlah pesantren terus naik. Pada tahun 2008/2009 jumlah itu mencapai 3.576. Sedangkan di Kabupaten Rembang, Jawa

³Data Statistik Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI Tahun 2004.

Tengah—yang menjadi objek kajian dalam buku ini—terdapat 99 pesantren yang tersebar di 14 kecamatan. Untuk jumlah santrinya mencapai angka 10.361 santri.⁴

Kiai di Panggung Sosial dan Politik

Dalam urusan sosial dan politik kiai pesantren memiliki posisi sangat strategis. Ia juga memainkan peran penting dalam proses perubahan sosial. Keterlibatan kiai pesantren tidak hanya terbatas pada perkembangan keagamaan, sosial dan kultural saja. Kiai pesantren juga menjadi salah satu kunci dalam perkembangan dan pertarungan politik sejak Indonesia belum merdeka, pada masa-masa kemerdekaan, sampai masa pembangunan dan reformasi.

Menurut Khoiro Ummatin, kemampuan dan kemauan kiai pesantren dalam berbagai persoalan, bahkan sampai bisa menduduki posisi strategis dalam dunia politik, karena tiga pilar. Ketiganya menjadi pilar penting yang mengangkat *bargaining* posisi kiai, yaitu kemampuan dan garis keturunan, kuatnya jaringan sosial organisasi Islam tradisional dan jaringan sosial yang dibangun tradisi pesantren.⁵

Sejak zaman perlawanan terhadap penjajah, kiai-kiai ini sudah akrab dalam permainan politik. Bedanya, jika pada zaman pra kemerdekaan mereka meneriakkan kemerdekaan melalui pesantren (pendidikan), lobi kultural, dan perang melawan penjajahan, maka pada masa pasca kemerdekaan mereka aktif di organisasi partai politik.

⁴Sumber data Pendidikan dan Keagamaan (Pekapontren) Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008/2009.

⁵Khoiro Ummatin, *Prilaku Politik Kiai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, September 2002), hlm. 116.

Rekam jejak politik tokoh pesantren dapat dilihat pada pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955 sampai Pemilu tahun 2009. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan daftar nama kiai yang menjadi calon legislatif (caleg) atau sekedar menjadi juru kampanye (jurkam) salah satu partai politik peserta Pemilu. Jelasnya, keterlibatan mereka ikut mewarnai meriahnya pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Semua itu tidak lain, karena sosok kiai memiliki pengikut (massa) yang riil. Kharisma seorang kiai juga selalu menarik simpati konstituen, karena mereka dianggap sebagai figur yang pantas dipercaya dan dijadikan wakil di parlemen.

Menurut Bambang Purwoko, setidaknya ada tiga periode pentas politik elit agama (kiai) dalam percaturan perpolitikan nasional.⁶ *Pertama*, pada tahun 1945 sampai dengan 1965, ketika para politisi dengan basis agama masih bisa berkiperah secara leluasa dalam panggung perpolitikan nasional. Pada periode ini para elit agama yang menjadi politisi—selanjutnya disebut sebagai politisi Islam—bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan politik Indonesia.

Kedua, pada masa-masa di mana politisi Islam lebih berperan sebagai obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde Baru. Saat itu, pemerintah menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara, dan karena itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa

⁶Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam Focus Groups Discussion, *Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo*, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation di Yogyakarta tanggal 3 Agustus 2006.

sehingga bisa meminimalisir semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara. Periode kedua ini berlangsung cukup lama. Biasanya dikenal dengan 32 tahun masa kejayaan Orde Baru, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1998.

Ketiga, periode antara tahun 1998 sampai 2006 yang ditandai dengan kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara, termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode ketiga ini pula, kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.

Mengenai bentuk keterlibatan kiai dalam pemilihan umum bisa dipetakan menjadi tiga. *Pertama*, sebagai aktor. Dalam hal ini kiai menjadi tim sukses sekaligus juru kampanye calon tertentu. *Kedua*, sebagai pendukung. Kiai mendukung calon tertentu, namun tidak berada di garis depan dalam memperjuangkan keberhasilan calon yang didukungnya. *Ketiga*, partisipan. Kiai memberikan restu terhadap calon tertentu, dan tidak terlibat dalam aksi dukungan, atau menjadi tim sukses.

Adalah Ziemek (1986), seorang sosiolog Jerman, yang menyatakan bahwa tradisionalitas pesantren mengandung nilai emansipasi yang mampu mengembangkan keswadayaan. Diungkapkan juga dalam penelitiannya, kemampuan pesantren tidak hanya dalam mempertahankan eksistensi. Selain masalah eksistensi, pesantren memiliki antusias dan

konsisten mengaplikasikan etos dan misinya. Kiai pesantren memiliki pengaruh yang besar di lingkungannya, baik di bidang politik maupun sosial.

Kehadiran kiai pesantren dalam setiap proses perubahan di Indonesia menunjukkan bahwa sosok yang terikat dengan pola pemikiran Islam tradisional ini mampu membenahi diri untuk tetap memiliki peranan dalam membangun masa depan bangsa dan negara. Kiai pesantren juga telah berhasil memperbarui penafsiran mereka tentang Islam tradisional sesuai dengan kebutuhan situasi modern. Bahkan keberhasilan modernisasi pemikiran kiai pesantren tidak mau kalah bila dibandingkan dengan kelompok sosial politik lain, yang sejak awal menyatakan diri sebagai organisasi modern.

Perjuangan para kiai pesantren—di luar pendidikan keislaman klasik—semakin nyata setelah para ulama ini memiliki organisasi formal, yaitu jamiyah Nahdlatul Ulama (NU) sebagai wadah dan “payung hukum”. Sejak NU berdiri, kiai-kiai pesantren ini bisa mengaktualisasikan dirinya melalui dua jalur, yaitu jalur organisasi NU dan jalur institusi pesantren. Kelak, peran kiai pesantren semakin diakui secara luas. Sampai akhirnya, melalui salah satu tokoh, KH. Hasyim Asy’ari, kalangan pesantren diminta untuk ikut merumuskan dasar negara, Pancasila.

Mencermati intensitas perjuangan kiai pesantren yang demikian, menjadi wajar kalau dalam tradisi NU ada konstruksi sosial yang menempatkan kiai pesantren menjadi individu yang memiliki pengikut. Konstruksi sosial yang demikian menjadikan kiai (ulama) menempati posisi elit di dalam masyarakat NU.

Keberadaan kiai pesantren pada posisi bergengsi ini dapat dipahami, karena dalam hukum sosial setiap masyarakat butuh tokoh sentral (elit). Para ilmuwan sosial beranggapan bahwa kebutuhan elit dirumuskan dengan teori elit yang menyatakan, keberadaan elit (baik elit agama maupun elit politik) tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat modern yang kompleks.

Rembang dan Basis Kiai yang Berpolitik

Penulis sengaja memilih kawasan Rembang, Jawa Tengah, sebagai basis para kiai pesantren yang secara terang-terangan terjun ke dunia politik praktis. Buku ini mengkaji dinamika kiai-kiai di Kabupaten Rembang dan peran politiknya di masyarakat pasca reformasi (1999 sampai dengan 2009-an). Tidak ada maksud menafikan dinamika politik para kiai pada masa-masa sebelumnya. Namun demikian, beberapa rentetan peristiwa dan sejarah yang ada berkaitan dengan sepak terjang para elit santri di Rembang menjadi bahan berharga dalam buku ini.

Terutama di daerah Rembang—juga di daerah lain yang mengenal tradisi pesantren—kiai digambarkan sebagai sosok figur sentral yang mempunyai kelebihan tersendiri dibanding dengan masyarakat biasa. Seorang kiai ditempatkan sebagai tokoh yang dijadikan panutan khususnya yang terkait dalam bidang agama, dan bahkan dalam beberapa persoalan di luar wilayah agama.

Bahkan di wilayah Kabupaten Rembang para kiai tidak hanya memimpin pondok pesantren, tetapi hampir mayoritas kiai pesantren di pesisir pantai utara (Pantura) di

ujung timur Jawa Tengah ini terjun di dunia politik. Beberapa nama yang bisa disebut populer di masyarakat yaitu KH. Bisri Mustofa, KH. Cholil Bisri, KH. Hamid Baedlowi, KH. Maemoen Zubair sampai kiai yang juga sastrawan KH. Mustofa Biri. Namun begitu, banyak juga kiai pesantren di Rembang yang tidak *kepincut* terjun di dunia partai politik.

Uniknya, justru kiai yang tidak memilih *nyambi* di partai politik hampir bisa dipastikan gaungnya tidak terdengar. Paling-paling hanya dikenal masyarakat di sekitar wilayah dari tempat tinggalnya. Misalnya kiai yang hanya mengaji di pesantrennya. Berbeda dengan kiai yang ikut ambil bagian di partai politik, namanya dikenal oleh masarakat umum, bahkan sampai di tingkat nasional. Sebut saja, KH. Cholil Bisri dan KH. Maemoen Zubair.

KH. Mustofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Mus, meskipun namanya dikenal oleh masarakat karena kiprahnya sebagai sosok budayawan atau tokoh NU, namun dia juga pernah tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada masa Orde Baru. Bahkan dia juga disebut-sebut sebagai salah satu deklarator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama dengan KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) kala itu.

Dalam perhelatan politik, Rembang tergolong wilayah yang unik dan menarik untuk dikaji dibanding daerah-daerah lain dengan basis pesantren yang berada di wilayah Pantura Pulau Jawa. Rembang yang dikenal sebagai kota dengan banyak pondok pesantren, tetapi dalam sejarah pertarungan partai politik justru dimenangkan oleh partai dengan basis massa non santri. Mulai tahun 1955 sampai pada masa Orde Baru, bahkan pada masa reformasi pun partai Islam tidak pernah menang.

Pertanyaan yang mendasar, Rembang sejatinya daerah santri (agamis) atau abangan (nasionalis)? Karena dalam sejarahnya partai nasionalis justru selalu menang dibanding dengan partai Islam. Apakah peran kiai tidak begitu pengaruh dalam proses politik, atau justru peran kiai telah merosot dalam mempengaruhi masyarakat di sekitar. Artinya, kiai yang tidak masuk di politik lebih berkharisma dibanding dengan kyai yang aktif di politik. Atau, kiai yang berpolitik sebagian tenaga dan pikirannya lebih difokuskan untuk mengurus persoalan-persolan politik, sementara kedekatan dengan masyarakat berkurang. Akibatnya ada tempat yang berbeda antara kiai yang berpolitik dengan kiai yang secara fokus mengurus santri dan masyarakat.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah pesisir Jawa, tepatnya salah satu kota di Jawa Tengah bagian utara dan berada di paling timur. Kota ini merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah bagian utara dan Jawa Timur utara (Tuban). Dalam catatan sejarah, Rembang merupakan salah satu daerah pesisir yang pernah berjaya dalam perdagangan dan pembuatan kapal. Seiring dengan merosotnya kemakmuran daerah ini pada abad ke-19, banyak para pemilik dan pengelola kapal serta para nelayan yang sangat mengenal laut beralih ke penyelundupan opium.⁷

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Rembang merupakan tempat para santri menimba ilmu pengetahuan agama (Islam). Kota ini juga mempunyai beberapa tokoh yang dikenal oleh kalangan nasional. Dia tidak hanya sebagai kiai di pesantrennya, tetapi juga salah

⁷James R. Rush, *Opium To Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina. Indonesia Kolonial 1860-1910*, terj. Mata Bangsa (Yogyakarta: 2000), hlm. 157.

satu dari sekian tokoh politik yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Kiprahnya begitu penting di dunia politik, terutama di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PKB. Dengan pengaruhnya, tidak sedikit para politisi yang akan mempunyai “hajat politik” mendatanginya guna mendapatkan restu atau dukungan (politis).

Kiai-politikus tersebut tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Rembang. Di Kecamatan Sarang, misalnya, berdiri beberapa pesantren besar. Di antara pesantren tersebut ada Al-Anwar yang diasuh oleh KH. Maemoen Zubair,⁸ selain juga ada nama KH. Umar Farouk,⁹ dan lainnya. Di Kota Kecamatan Lasem ada KH. Hamid Baidlowi¹⁰ dan KH. Toyfoer MC.¹¹ Di

⁸KH. Maemoen Zubair mengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang, Rembang. Dia sosok ulama terkemuka yang disegani. Selain tokoh panutan umat di kalangan *nahdliyin* juga salah satu kiai sepuh di NU. Selain pengasuh pesantren, kiprahnya di dunia politik tidak diragukan. Ia juga pernah menjadi anggota Syuriah PBNU (1984-1989), di bawah kepemimpinan Rais Am KH. Ahmad Siddiq (Jember). KH. Maimoen Zubair juga dikenal sebagai tokoh politikus yang teguh berpendirian. Di saat ulama NU berduyun-duyun hijrah dari PPP ke PKB (sekitar tahun 1998), ia tetap istikamah memimpin Majelis Syari’ah PPP. Berbagai jabatan politik di Partai berlambang Ka’bah ini pernah dia jabat. Mulai dari tingkat desa (Ranting) sampai nasional (pusat). Sampai sekarang pun, sosoknya masih menjadi panutan di NU dan PPP.

⁹ KH. Umar Faroek adalah pengasuh Pondok Pesantren Ma’hadul ‘Ilmi Asy’ari (MIS) di Sarang, Rembang. Kiprahnya di dunia politik belum begitu menonjol. Tetapi kiai nyentrik ini pernah aktif di partai berlambang kepala banteng (Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sejak dipimpin Megawati sampai ketika diketuai Soeryadi.

¹⁰KH. Hamid Baedlowi adalah pengasuh Pesantren Lasem, dan salah satu deklarator Partai Kebangkitan Nahdlatul Umat (PKNU).

¹¹Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah di Soditan, Lasem, Rembang. Beliau tercatat pernah menjadi ketua DPW PPP Jateng dan Anggota DPR RI (2004-2009).

Kota Rembang ada KH. Cholil Bisri¹² dan adiknya, KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus. Nama-nama ini telah menunjukkan kiprahnya di pentas politik nasional, baik pada masa Orde Baru sampai pada era reformasi.

Para kiai Rembang yang disebut di atas juga menampilkan warna-warni pilihan politiknya. Tetapi, perbedaan pilihan partai politik kiai-kiai tersebut bisa diterima masyarakat. Bagi masyarakat Rembang, sikap pilihan politik kiai bisa ditangkap sebagai ilustrasi bahwa perjuangan lewat partai politik dengan warna yang berbeda bukan berarti mengkotak-kotakan umat. Perjuangan lewat partai politik, apa pun jenisnya, mempunyai tujuan yang sama, yaitu perjuangan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Perbedaan pilihan partai politik terlihat jelas ketika KH. Maemoen Zubair bersama KH. Toyfoer istikamah di PPP, sementara KH. Cholil Bisri lebih memilih untuk pindah ke PKB. Pilihan politik kedua tokoh tersebut dilakukan berdasarkan argumentasi politik dan prinsip politik masing-masing, pada saat kondisi politik memaksa Soeharto untuk mengakhiri masa kepemimpinannya.

Meskipun dengan warna-warni politik yang ditampilkan oleh para kiai pesantren di Rembang, masyarakat cenderung menghargai satu dengan yang lainnya. Perbedaan menggambarkan sebuah keragaman politik yang mengisyaratkan kepada masyarakat untuk tidak merasa paling benar pada pilihan politiknya. Dengan keragaman

¹²KH. Cholil Bisri adalah pengasuh Pesantren Roudhatut Tholibin di desa Leteh, Rembang. Kiprahnya di politik pernah menjadi ketua Partai NU pada masa Orde Lama, ketua DPC PPP Rembang, Ketua MPW PPP Jawa Tengah masa Orde Baru dan Wakil Ketua Dewan Syuro masa Reformasi. Dia juga pernah menjadi anggota DPRD, DPR/MPR RI.

politik yang ditampilkan para kiai tersebut meneguhkan masyarakat setempat akan pentingnya menghormati sebuah perbedaan politik.

Fokus Kajian Buku

Fokus kajian dalam buku ini adalah kiai dan dinamika pilihan politik masyarakat agamis pasca reformasi, dengan latar Kabupaten Rembang. Beberapa penjelasan yang ingin disampaikan penulis dalam buku ini adalah dinamika persaingan kiai dalam konstelasi politik pasca reformasi, merebut pemilih dalam peranannya di pentas politik serta mencari resolusi konflik pesantren yang selama ini terjadi, terutama di wilayah politik dan bagaimana menyelesaikannya.

Buku ini memotret dinamika perkembangan politik kiai-santri di Kabupaten Rembang pasca reformasi. Ketika telah diberlakukan sistem multi partai, partai Islam sebagai pilihan masyarakat santri mempunyai corak tersendiri di Indonesia. Akan tetapi dalam sejarah perkembangan politik di Indonesia, partai Islam tidak pernah bisa mengungguli partai nasionalis. Hal ini dibuktikan sejak pemilu pada tahun 1955 sampai pemilu 2009 partai Islam tidak pernah menjadi partai pemenang pemilu.

Tahun 1955 ada Partai Masyumi dan NU, tetapi hanya berada di urutan kedua dan ketiga setelah PNI. Di masa Orde Baru ada PPP sebagai salah satu wadah perjuangan politik umat Islam, tetapi tidak pernah bisa mengungguli Golkar. Sampai pada era reformasi, partai Islam menjamur: PPP, PAN, PKB, PBB, PKS, tetapi tidak pernah menjadi pemenang pemilu. Pada era reformasi peringkat atas justru didominasi oleh partai-partai yang bernuansa nasionalis, misalnya

pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh PDI-P. Pemilu tahun 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar. Sampai pada pemilu tahun 2009 dimenangkan oleh partai non Islam, yaitu Partai Demokrat.

Apa yang terjadi secara nasional dalam perolehan suara partai politik terjadi pula di Kabupaten Rembang. Dari pemilu tahun 1955 sampai Pemilu 2009, partai nasionalis selalu menjadi pemenangnya. Pada Pemilu tahun 1955 partai nasionalis (PNI) mampu mengungguli partai-partai Islam (Masyumi, NU) dalam perolehan suara di Rembang. Kemenangan partai nasionalis diteruskan sampai pada masa Orde Baru. Bahkan pada masa reformasi pun, ketika Pemilu 1999, 2004, 2009, partai nasionalis tetap tampil sebagai pemenang.¹³

Terkait dengan dinamika politik santri di Kabupaten Rembang ini kemudian memunculkan pertanyaan. Rembang yang merupakan salah satu kota dengan simbol-simbol keislaman serta komunitas masyarakatnya yang dekat dengan pesantren, kenapa tidak mampu menempatkan diri sebagai pemenang pemilu bagi partai yang berbasis massa agama.

Buku ini bermaksud menjelaskan pilihan politik kiai Rembang pasca reformasi. Masa reformasi merupakan tayangan ulang dimulainya kehidupan demokrasi yang sebelumnya tumbuh subur pada awal kemerdekaan. Akibat rezim otoriter Orde Baru yang berkuasa selama kurang lebih 32 tahun, kehidupan berdemokrasi di Indonesia nyaris

¹³Pemilu tahun 1999 mengantarkan PDI-P sebagai partai pemenang pemilu. Pemilu 2004 dimenangkan oleh Partai Golkar, dan Pemilu 2009 dimenangkan Partai Demokrat.

tidak mendapatkan tempat. Kehidupan berdemokrasi mulai nampak sedikit demi sedikit pasca jatuhnya Orde Baru.

Pemberlakuan sistem multi partai merupakan bukti nyata diterapkannya kehidupan demokrasi. Partai politik merupakan salah satu wadah penyalur aspirasi. Ia berfungsi sebagai pilar demokrasi, maka keberadaannya mempunyai arti penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Akibat euforia politik menjamur pula partai politik pasca reformasi. Salah satu bagian partai yang lahir masa reformasi adalah PKB yang didirikan PBNU, dengan KH. Abdurrahman Wahid sebagai deklaratornya.

Lahirnya PKB membawa dampak kurang baik bagi sebagian tokoh NU yang sejak lama telah aktif di partai politik. Posisinya mulai terancam oleh lahirnya PKB. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu sisi sebagian tokoh NU sudah mendapatkan posisi strategis di PPP. Di sisi lain adanya tekanan ideologis yang sangat kuat oleh warga nahdliyin, yang menganggap bahwa NU sudah mempunyai rumah sendiri, yaitu PKB. Sedangkan PPP hanya diasumsikan sebagai rumah kontrakan yang sudah saatnya ditinggalkan.

Sebaliknya bagi tokoh NU yang sejak awal kecewa dengan PPP, lahirnya PKB justru sudah lama dinanti. Tujuannya, ketika PPP tidak mampu memberi tempat, partai baru ini akan dapat menyediakan posisi strategis. Dengan demikian lahirnya PKB merupakan rejeki politik untuk menaikkan kedudukan. Dengan demikian dua pilihan antara tetap tinggal di rumah lama atau baru merupakan pilihan politik yang tidak dapat dielakkan bagi tokoh NU pasca reformasi. Tercipta pula sebuah kondisi persaingan antara beberapa tokoh NU.

Di Kabupaten Rembang, persaingan itu terpisah menjadi dua gerbong. *Pertama*, gerbong yang dimotori oleh KH. Maemoen Zubair. *Kedua*, gerbong yang dimotori oleh KH. Cholil Bisri. Di barisan KH. Maemoen Zubair ada sederet nama kiai, seperti KH. Thoyfoer (Lasem), KH. Haizul Ma'ali (Sedan), KH. Muthi' (Pamotan), KH. Nur Salim (Kragan). Sementara di barisan KH. Cholil Bisri diikuti KH. Khazim Maburr (Rembang), KH. Roghib Maburr (Sarang), KH. M. Zaenal Amroni (Rembang), dan KH. Ahmad Sunarto.

Buku ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pengembangan khazanah keilmuan di Indonesia, terutama dalam bidang kajian politik. Secara praksis, kajian dalam buku ini diharapkan bisa menyumbangkan *academic values* bagi kepentingan praksis perpolitikan masyarakat pesantren, terutama di pesisir Jawa.

BAB II

Kajian Politik Kaum Sarungan dalam Literatur



Perilaku pemilih dalam pemilihan umum (*voting behavior*) telah menjadi satu kajian yang menarik. Mengapa seseorang memilih aktif berpolitik praktis, dan mengapa yang lain apatis? Mengapa orang memilih partai tertentu dan konsisten dari pemilu ke pemilu berikutnya, sementara sebagian yang lain berpindah-pindah dari pemilu ke pemilu (*swing voters*)? Mengapa anggota kelompok sosial maupun agama tertentu cenderung memiliki pilihan yang hampir sama, sementara yang lain berbeda-beda dalam menentukan pilihannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas menjadi bagian dari yang ingin penulis jawab melalui buku ini, khususnya yang terkait dengan perpolitikan kiai-santri.

Sampai saat ini beberapa ilmuwan (akademisi) telah mengkaji perilaku politik masyarakat santri. Abdul Munir Mulkhan, misalnya, meneliti pandangan atau

pilihan masyarakat santri yang berlatar pada masa-masa pemerintahan Orde Baru.

Penelitian Abdul Munir merupakan tesis (tugas akhir) ketika dia menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana (S.2) di jurusan Sosiologi Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Tesis itu berjudul “Pandangan Politik Santri pada masa Orde Baru”, yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul *Runtuhnya Mitos Politik-Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam* (Yogyakarta, 1994).

Peneliti lain yang mengkaji tentang kehidupan sosial politik khususnya masyarakat pesisir adalah Mudjahirin Thohir. Dia mengamati seputar konflik sosial yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pantura Jawa Tengah, baik yang disebabkan oleh faktor etnis, sosial maupun politik. Namun nuansa kekerasan yang dilatarbelakangi oleh faktor politik terasa lebih kental dalam beberapa penelitian yang dilakukan Mudjahirin Thohir, yaitu: *Terbunuhnya Kiai Rahmadi: Kasus Desa Donorejo Demak, Pembakaran Rumah: Kasus Desa Rowosari Semarang, Pembakaran Rumah-Rumah Penduduk: Kasus Dukuh Harjosari Tegal, Konflik Sosial Politik di Pekalongan, dan Politik Kekerasan: Kasus Jepara*.

Kumpulan hasil penelitian yang semuanya dilakukan di Jawa Tengah tersebut telah diterbitkan dengan judul *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*.

Penelitian tentang terbunuhnya Kiai Rahmadi di Desa Donorejo Demak menggambarkan persaingan antar elit desa, dan juga persaingan politik antara PPP dan Golkar. Dilihat dari kronologinya, pembunuhan terhadap Kiai Rahmadi disebabkan adanya anggapan masyarakat bahwa kiai inilah

yang menyebabkan matinya salah satu warga Desa Donorejo. Jelasnya, Kiai Rahmadi dianggap warga sebagai dalang atas kematian salah seorang warga. Dia dituduh sebagai dukun santet oleh warga setempat. Pada waktu itu juga bersama dengan huru-hara dan isu dukun santet yang ramai di Banyuwangi, Jawa Timur. Meski demikian tidak menutup kemungkinan, kematian Kiai Rahmadi bernuansa politik. Karena pada saat itu terjadi persaingan sengit antara PPP dan Golkar.¹

Penelitian Mudjahirin Tohir tentang konflik sosial dan politik di Pekalongan menggambarkan terjadinya konflik etnik, konflik yang disebabkan faktor etnisitas: China dan pribumi. Penelitian ini juga memaparkan konflik yang disebabkan persaingan politik antara PPP dan Golkar, yang berpuncak pada pembakaran panggung yang hendak dijadikan tempat kampanye puteri sulung mantan Presiden Suharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Mba Tutut). Reformasi yang menyebabkan lahirnya partai-partai baru, termasuk di antaranya PKB yang lahir dari rahim NU, juga dibahas dalam penelitian ini. Partai lain yang sebelumnya bergantung pada massa *nahdliyin* merasa tersaingi. Akibatnya, antara PPP dan PKB pun terjadi konflik.²

Mudjahirin Thohir juga membidik kasus kekerasan berbau politis yang terjadi di Jepara. Dalam penelitiannya dia memaparkan tentang perjalanan politik santri yang diwakili PPP. Persaingan dan perebutan simpatisan merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam berpolitik, tetapi

¹Mudjahirin Thohir, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif* (Semarang: Lengkong Press Cilik, 2005), hlm. 29-34.

²Mudjahirin Thohir, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa*, hlm. 103.

kalau persaingan tersebut sudah mengarah pada konflik, ini yang patut dijadikan renungan bagi kita semua.

Di Jepara, konflik terjadi antara massa pendukung PPP dan PKB pada masa-masa awal era reformasi. Persaingan yang terjadi tidak hanya sebatas hujatan atau cemoohan, tetapi mengarah pada *multi level conflict*. Artinya, konflik terjadi dalam level yang berbeda-beda di antara masing-masing pendukung partai. Di level elit ada kiai, mubalig, dan pengurus partai. Di sisi lain ada laskar dan simpatisan (masyarakat bawah) partai.

Konflik antar kiai diistilahkan dengan “perang Al-Qur’an melawan hadis”. Konflik antar laskar mengarah kepada konflik fisik. Sedangkan konflik di level masyarakat bawah berupa konflik labeling disertai pemisahan berdasar identitas partai yang berbeda, serta pengungkapan perasaan permusuhan dan juga mengarah kepada konflik fisik.³

Hasil penelitian Hamdan Farchan dan Syarifuddin, *Titik Tengkar Pesantren* (Yogyakarta, 2005), menjelaskan kontribusi kiai sebagai elit pesantren dalam penyelesaian konflik dan bagaimana kultur pesantren mempengaruhi model penyelesaian konflik.

Penelitian yang dilakukan Latif Bustami mengkaji relasi Islam, kiai, kekuasaan dan kitab kuning di pesantren. Hasil penelitian ini kemudian diterbitkan oleh Pustaka Bayan Malang (2009). Penelitian ini mengkaji posisi kiai di tengah masyarakat Islam Pasuruan sebagai patron (bapak), bahkan sebagai “penguasa kerajaan”. Kedudukan ini diperoleh melalui fungsi tradisionalnya dan melalui pesantren sebagai institusinya yang dijaga dan dipertahankan hingga sekarang.

³Mudjahirin Thohir, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa*, hlm. 137.

Penulis juga mengkaji buku-buku tentang teori politik. Antara lain karya Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*; buku Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam; dan buku S.P. Varma, *Teori Politik Modern*. Buku-buku klasik karya para ilmuwan dan filsuf juga penulis anggap penting untuk dibaca, antara lain, *Republik* karya Plato; *La Politica* karya Aristoteles; *The Prince* karya Niccolo Machiavelli; dan karya-karya lain.

Di Indonesia, salah satu kajian terhadap perilaku pemilih pernah dilakukan oleh Afan Gaffar pada pertengahan dekade tahun 80-an. Satu penelitian yang dirancang untuk disertasi doktor pada Ohio State University. Penelitian ini fokus pada perilaku pemilih masyarakat pedesaan di Yogyakarta.

Hampir sama dengan kajian Affan Gaffar, buku ini ingin menjawab mengapa banyak tokoh pesantren yang aktif di partai politik, dan apa alasan dari sebagian tokoh pesantren yang apatis dengan partai politik. Sebut saja KH. Maemoen Zubair dan KH. Cholil Bisri, dua tokoh yang sangat dikenal terutama hubungannya dengan PPP dan PKB.

KH Maimoen Zubair adalah kiai pesantren yang sejak lama telah aktif di partai politik. Begitu pula KH. Cholil Bisri. Bila kita tarik ke belakang, keduanya adalah putra tokoh pesantren yang juga aktif di partai politik pada masa Orde Lama. KH. Maimoen adalah putra KH. Zubair yang dikenal aktif di Partai NU, sementara KH. Cholil adalah putra KH. Bisri yang aktifis Partai NU pada tahun 50-an.

Dalam pengamatan penulis, pilihan kedua tokoh pesantren di atas untuk aktif di partai politik erat kaitannya dengan sikap dan pilihan orang tua. Kesimpulan ini semakin diperkuat dengan pilihan putra-putra mereka. Ada beberapa

putra KH. Maimoen Zubair yang mengikuti jejak sang ayah terlibat di partai politik.⁴ Demikian juga putera KH. Cholil Bisri, beberapa di antaranya mengikuti pilihan sang ayah.⁵ Di sisi lain, kiai-kiai yang sejak awal tidak tertarik di dunia politik praktis tidak memperkenankan putra-putranya jadi aktivis partai politik. Di Rembang kiai model ini jumlahnya juga tidak sedikit.

Penulis juga menemukan, ada kiai-kiai yang konsisten pada partai tertentu. Di sisi lain, sebagian kiai berpindah-pindah partai sebagai tempat menyalurkan aspirasi. KH. Maimoen Zubair, misalnya, tetap konsisten (istikamah) di PPP, sementara KH. Cholil Bisri sempat berpindah dari PPP ke PKB. Temuan yang tidak kalah menarik adalah kelompok sosial agama (NU) mempunyai kecenderungan pilihan yang hampir sama dari waktu ke waktu. Perolehan suara PPP dan PKB pada masa awal reformasi bila di gabungkan hasilnya hampir sama dengan perolehan Partai NU pada pemilu 1955.

Di Rembang, hal ini menegaskan bahwa suara warga NU sejatinya tidak kemana-mana, hanya parkir di kedua partai politik (PPP dan PKB). Sementara kelompok sosial tertentu pilihan politiknya berubah beberapa kali. Hasil perolehan Partai Golkar merosot tajam, sementara PDI-P meningkat signifikan pasca reformasi (pemilu 1999). Pada pemilu berikutnya, suara Golkar naik tajam seiring dengan hilangnya suara dari PDI-P. Akhirnya, pada Pemilu 2009 Partai Demokrat menjadi pemenang pemilu di Kabupaten Rembang.

⁴Mereka adalah KH. Ubab Maimoen, KH. Kamil Abdul Majid dan KH. Yasin Maimoen.

⁵KH. Yahya Cholil Staquf dan KH. Yaqut Cholil Qaumas.

BAB III

Metode Kajian dan Sumber Data



Latar kajian dalam buku ini adalah masyarakat pesantren di dua kecamatan (Sarang dan Rembang) di Kabupaten Rembang. Di Sarang, analisis kajian fokus pada Pondok Pesantren Al-Anwar yang berada di Desa Karangmangu. Pesantren ini diasuh KH. Maemoen Zubair, sementara di Rembang, penelitian fokus pada Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin di Desa Leteh. Pesantren ini diasuh KH. Cholil Bisri, dan saat ini diteruskan adiknya, KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus. Di Kabupaten Rembang, popularitas dua pesantren ini belum tertandingi. Selain dua lembaga ini memiliki kebesaran historis, pengasuhnya memiliki kekayaan relasi dan keluasan wawasan. Alasan lain, kedua pesantren tersebut merepresentasikan dua partai politik, yaitu PPP dan PKB.

Buku ini ingin mengkaji perilaku politik masyarakat pesantren di Kabupaten Rembang pada Pemilu. Penulis

membatasi pada tahun 1999 sampai 2009. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan sebagai bahan analisa dan kajian juga membahas pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya.

Realitas sosial berdimensi historis, kultural, dan interaksionis, sebagaimana fokus kajian dalam buku ini, lebih tepat untuk diteliti dengan menggunakan metode kualitatif. Hal ini didasarkan pada konsep hubungan dialektik dalam interaksi sosial antara elit lokal (kiai) dengan masyarakat. Menurut Lexi J. Moleong, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

Penelitian deskriptif dapat juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian—bisa berupa individu, institusi pesantren, masyarakat, dan lain-lain—pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak (sebagaimana adanya).²

Sikap elit lokal sebagai sosok yang disegani

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: UGM Press, 1987).

masyarakat desa dapat mempengaruhi sikap atau pilihan politik masyarakat di sekitarnya. Hubungan dialektik dalam kehidupan sehari-hari ini akan berpengaruh terhadap pandangan (cara berpikir) masyarakat dalam menentukan calon pemimpin mereka. Jelasnya, pilihan politik masyarakat sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pandangan elit lokal. Hal ini karena para elit ini dianggap masyarakat lebih tahu (berpendidikan).

Pilihan elit lokal kepada partai politik tertentu, misalnya, akan segera diikuti oleh para pengikut dan orang-orang yang setia kepadanya. Hubungan seperti ini tidak mudah diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif, dan tidak mudah pula dijelaskan dengan kesimpulan yang general. Oleh karena itu, metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menafsirkan realitas sosial yang dinamis dalam interaksi sosial, antara elit lokal dengan masyarakat dengan beragam keunikan yang berdimensi keagamaan, historis, dan kultural.

Membaca peran elit lokal (seperti kiai) terhadap masyarakat menuntut pemetaan yang kategoris, untuk mengklasifikasikan pola-pola interaksi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan ini akan dapat menjelaskan pola interaksi antara elit lokal. Pola interaksi ini menjadi penting, karena elit lokal dapat menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir masyarakat. Berdasarkan hal itu, model penelitian seperti ini beroperasi dari data naratif.³ Kesimpulan akhir merupakan uji ulang penyimpulan bersama pendataan,

³Clifford Geertz, *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia* (London: The University of Chicago Press, 1975).

sehingga abstraksi logis-interpretatif diletakkan dalam hubungan kritis atas fakta-fakta yang diperoleh.⁴

Sebagai penelitian empirik, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek yang hendak diteliti, bisa berupa perkataan atau informasi dari masyarakat setempat. Sedangkan data sekunder berupa data dalam bentuk jadi, seperti dokumentasi dan publikasi.⁵

Penulis menggali informasi dari tokoh-tokoh kunci, seperti KH. Maimoen Zubair, KH. Yahya Cholil Staquf (Pesantren Raudlatut Tholibin), H. Nasirul Mahasin (mantan wakil bupati Rembang yang diusung oleh PPP pasca reformasi), Nur Huda (tokoh NU dan mantan orang penting di Bappeda Rembang), KH. Abdul Azis (aktivis GP Ansor periode 60-an), dan Solehan (santri senior). Penulis juga memburu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemilihan umum (1999-2009).⁶

Dalam proses mengumpulkan data, penulis melakukan wawancara, kajian data, dan *focus group discussion* atau FGD.

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi. Selain

⁴Asykuri ibn Hamim dkk, "Muhammadiyah dan Kesenian Lokal di Lamongan: Apresiasi dan Interaksi di Tengah Purifikasi Agama", *Jurnal Media Inovasi* (No. 1. Tahun XII/2002), hlm. 67.

⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: 2004), hlm. 57.

⁶Dokumen yang penulis maksud bisa berupa buku, perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik. Undang-Undang Pemilu Nomor 12 tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik), daftar calon pemilih tetap, Surat Keputusan KPU Rembang dan dokumen Pemilu mulai Pemilu tahun 1955 sampai 2009, serta dokumen lain yang mendukung.

itu, wawancara juga dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. Selain itu juga memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.⁷

Ada enam eknik penulis menggunakan metode ini. *Pertama*, eknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. *Kedua*, eknik ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. *Ketiga*, pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. *Keempat*, eknik ini merupakan jalan yang terbaik untuk mengecek kebenaran data. *Kelima*, eknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit. *Keenam*, pengamatan bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat eknik eknik-teknik lain tidak memungkinkan.⁸

Metode FGD digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara diskusi terbatas dengan pihak-pihak yang terkait. Diskusi ini hanya melibatkan orang-orang yang mengetahui dengan baik tentang masalah yang dikaji. Dengan metode ini, akurasi data akan lebih dapat dipertanggungjawabkan, karena sumber informasi lebih dari satu orang.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.186.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 174.

Membaca Selera Pemilih Partai

1) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis berasal dari Eropa, kemudian dikembangkan di Amerika Serikat oleh ilmuwan sosial yang memiliki latar belakang pendidikan Eropa. Pendekatan ini menjelaskan, karakteristik sosial dan pengelompokan sosial seperti usia (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama, kelas sosial, organisasi agama, atau organisasi kemasyarakatan dan semacamnya memiliki peranan di dalam menentukan pilihan politik.

Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal (seperti kelompok keagamaan, organisasi profesi) maupun pengelompokan informal (seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya) akan sangat berguna untuk membaca perilaku pemilih partai politik. Pengelompokan ini memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

Dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, pada musim Pemilu 2004 (pemilu legiaslatif dan pemilu presiden) mendapat perhatian besar, terutama berkaitan dengan arah dukungan dari warganya. Besarnya perhatian terhadap dua organisasi keagamaan ini karena jumlah jamaah (warga) kedua kelompok keagamaan ini besar. Sekalipun tidak didasarkan pada sensus yang akurat, seringkali para elit di Muhammadiyah mengklaim jumlah warganya sekitar 30 juta orang. Sementara para pimpinan NU mengklaim jumlah jamaah *nahdliyin* mencapai 40 juta. Di

sini, ke mana arah dukungan warga Muhammadiyah dan *nahdliyin* menjadi penting untuk dicermati.⁹

Jim Sciller dalam penelitiannya tentang masyarakat sipil di Jepara menggambarkan, bahwa masyarakat Jepara yang mayoritas *nahdliyin* di setiap pemilihan umum mendemonstrasikan pilihan politiknya ke dalam komunitasnya. Pada Pemilu 1955, Partai NU mendominasi dalam perolehan suara di kabupaten ini dengan perolehan suara 55 persen. Pada Pemilu 1971 Partai NU memperoleh 40 persen. Pada masa pemerintahan Orde Baru (kira-kira empat musim pemilu) PPP menjadi satu-satunya partai politik yang menampung aspirasi *nahdliyin*.

Pada Pemilu tahun 1999 di era reformasi, dua puluh delapan partai berkompetisi di pesta demokrasi. Di Jepara PPP (partai lama warga NU) dengan mudah memenangkan pertarungan dengan memperoleh 46 persen suara. PDI-P menduduki urutan nomor dua dengan memperoleh 20,2 persen suara. Sementara PKB, partai NU baru menjadi partai pemenang nomor tiga dengan perolehan suara sebanyak 18,9 persen. Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 8,7 persen, dan Partai Amanat Nasional memperoleh 3,9 persen suara.¹⁰

Contoh lain dalam pendekatan ini sebagaimana diungkapkan oleh Taufiq Tanasaldy. Dia mengkaji politik identitas etnis di Kalimantan Barat, antara suku dayak dan melayu pada pemilihan Bupati Sintang tahun 1994 dan Kapuas Hulu tahun 1995. Pada pemilihan Bupati

⁹Tim Peneliti FISIP UMM, *Perilaku Partai Politik* (Malang: UPT Penerbitan UMM, Desember 2006), hlm. 23-24.

¹⁰Jim Schiller, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 447.

Sintang ada tiga kandidat, yaitu L. H. Kadir (seorang birokrat Katolik Dayak), Abdillah Kamarullah, dan Abdul Hadi Karsum (dua kandidat terakhir adalah birokrat Melayu di Kabupaten Sintang).

Melihat peta pertarungan awal nampaknya Kadir hampir dipastikan bakal terpilih menjadi bupati. Alasannya, Golkar bersama fraksi militer menguasai hampir 80 persen kursi di DPRD. Ditambah lagi Kadir juga mendapat dukungan dari PDI yang mempunyai empat dari anggota Dayak. Tetapi pemilihan pada bulan Februari 1994 itu ternyata berbeda dari skenario. Kamarullah memenangkan pemilihan dengan memperoleh 21 suara. Sementara Kadir hanya mendapatkan 16 suara, dan Karsum mendapatkan 1 suara.

Orang-orang Melayu menyambut baik kemenangan Kamarullah, karena bupati terdahulu adalah pemeluk agama Kristen. Bagi masyarakat Dayak, kegagalan Kadir memperkuat keyakinan mereka bahwa ada kesengajaan untuk meminggirkan orang-orang Dayak dari jabatan penting di birokrasi. Seorang pemimpin Dayak dari fraksi Golkar memperhitungkan bahwa kekalahan itu diakibatkan pembelotan hampir separuh dari anggota Golkar. Ia juga yakin bahwa para pembelot itu adalah orang-orang muslim dan non-Dayak.¹¹

Begitu pula pada pemilihan Bupati Kapuas Hulu tahun 1995. Pemilihan bupati ini dianggap kelanjutan dari kasus Kadir di Sintang yang belum selesai. Untuk mengobati kekecewaan orang Dayak, gubernur berniat

¹¹ Taufiq Tanasaldy, "Politik Lokal di Indonesia" (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 473.

memberikan pos bupati Kapuas untuk Yacobus Layang, seorang birokrat Dayak di tingkat provinsi. Ia memang bukan birokrat senior, tetapi yang jelas ia adalah salah satu dari segelintir orang Dayak yang berhasil menapak ke jajaran birokrasi tingkat menengah ke atas.

Dengan mengambil pelajaran dari Sintang, gubernur mengambil langkah-langkah untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan. Tammar Abdul Salam, wakil gubernur wilayah II yang bertanggungjawab atas pemilihan di Sintang dan Kapuas Hulu untuk sementara dibebastugaskan. Alasannya adalah kegagalan dia dalam mengegalkan Kadir sebagai Bupati Sintang. Jabatan Tammar digantikan orang kepercayaan gubernur, Bupati Kapuas Hulu yang sedang menjabat.

Untuk menghilangkan komplikasi etnis dari pemilihan tersebut, Menteri Dalam Negeri mencoret dua orang kandidat Melayu dari daftar finalnya. Dengan demikian, tiga kandidat yang lolos semuanya orang Dayak, sehingga tidak akan ada kepentingan dari kelompok Melayu. Layang akhirnya menang tipis (dengan 11 suara) atas Kupon (dengan 8 suara).¹²

Dari paragraf-paragraf di atas bisa diambil pemahaman, kelompok sosial keagamaan non-formal berkepentingan untuk melihat kemana pilihan warga *nahdliyin* diarahkan. Di Rembang tidak mengenal partai NU lama dan partai NU baru sebagaimana di Jepara. Karakter masyarakat Rembang lebih melihat siapa figurinya. Dalam konteks ini kiai pesantren berafiliasi ke partai apa. Ketika KH. Maimoen Zubair di PPP maka suara

¹² Taufiq Tanasaldy, "Politik Lokal di Indonesia", hlm. 473.

akan ke PPP. Begitu pula ketika KH. Cholil Bisri hijrah ke PKB, banyak pilihan politik warga NU yang diberikan ke PKB.

2) Pendekatan Psikologis

Jika pendekatan sosiologis berasal dari Eropa Barat, pendekatan psikologis sepenuhnya berkembang di Amerika Serikat melalui *Survey Research Center* di Universitas Michigan. Munculnya pendekatan ini sebagai reaksi atas ketidakpuasan beberapa ilmuwan politik terhadap pendekatan sosiologis.

Beberapa ilmuwan penganut pendekatan psikologis menganggap pendekatan sosiologis secara metodologis sulit dilaksanakan, terutama dalam aspek pengukurannya. Misalnya bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, kelompok primer atau sekunder, kelompok agama, dan sebagainya. Apakah variabel tersebut benar-benar memberikan sumbangan pada perilaku pemilih.

Menurut pendekatan ini, perilaku memilih ditentukan oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam diri pemilih (*voters*) sebagai produk dari proses sosialisasi. Mereka menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik.

Menurut Greenstein terdapat tiga alasan, mengapa sikap menjadi variabel sentral dalam menjelaskan perilaku pemilih.

Pertama, sikap merupakan fungsi kepentingan. Artinya, penilaian terhadap suatu objek diberikan

berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.

Kedua, sikap merupakan fungsi penyesuaian diri. Seseorang bersikap tertentu sesuai dengan kepentingan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani, atau kelompok panutannya.

Ketiga, sikap merupakan eksternalisasi dan pertahanan diri. Artinya, sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan (*defence mecanism*) dan eksternalisasi diri seperti proyeksi, rasionalisasi, dan identifikasi.

Namun sikap bukanlah sesuatu yang begitu saja jadi. Sikap merupakan hasil dan kepribadian dan proses sosialisasi yang panjang, yang boleh jadi sarannya terdiri dari kelompok primer seperti adat, desa, dan sebagainya, atau kelompok-kelompok sekunder termasuk kelompok keagamaan dan mungkin juga asosiasi-asosiasi lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosiologis sebenarnya merupakan telaah awal (*precursor study*) untuk memahami gejala-gejala yang timbul berkaitan dengan kecenderungan perilaku pemilih. Sedangkan untuk penelaahan lebih mendalam, dapat digunakan pendekatan psikologis.¹³

Dengan demikian, seorang individu berasal dari kelas sosial tertentu akan mendukung partai (kandidat) tertentu yang dianggap representasi dari kelas sosialnya. Dalam hal ini, sampai kadar tertentu identik dengan "politik aliran". Clifford Geertz dalam *The Javanese*

¹³Taufiq Tanasaldy, "Politik Lokal di Indonesia", hlm. 25-26.

Villagers yang mengelompokkan pemilih Indonesia (Jawa) ke dalam kelompok santri, priyayi dan santri, dalam perkembangannya—karena beberapa kelemahan, terutama kelemahan metodologis—aliran ini semakin ditinggalkan para ilmuwan politik.

Dalam menganalisis *voting behavior*, pendekatan psikologis berasumsi bahwa keputusan seorang individu dalam memberikan suara kepada kandidat tertentu merupakan persoalan respons psikologis. Terkait dengan pendekatan psikologis ini, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *voting behavior*.

Pertama, kualitas personal seorang kandidat. Di Amerika, di mana konsep ini berkembang, kualitas pribadi seorang kandidat baik moralitas maupun kapabilitas pribadi menjadi bahan pertimbangan sangat penting bagi calon pemilih. Dalam hal ini, bisa diperhatikan betapa tidak sedikit calon Presiden Amerika gagal karena dinilai tidak bermoral.

Kedua, performa pemerintah yang sedang berkuasa. Hal ini lazim digunakan pemilih terutama untuk mengevaluasi kandidat (presiden atau kepala daerah) *incumbent*. Seberapa baik pemerintah di bawah kepemimpinan presiden atau kepala daerah yang sedang mencalonkan kembali sebagai presiden atau kepala daerah di periode berikutnya menjadi persoalan penting bagi pemilih.

Ketiga, isu-isu yang dikembangkan kandidat. Selain *track record* suatu pemerintahan, isu-isu yang menjadi agenda seorang kandidat menjadi pertimbangan sangat penting bagi pemilih rasional. Seberapa banyak isu-isu

yang dikembangkan seorang kandidat berkesesuaian dengan pandangan (dan kepentingan) calon pemilih yang didasarkan, misalnya, atas agama, ideologi, dan kepentingan ekonomi pemilih.

Keempat, loyalitas terhadap partai. Selain tiga faktor di atas, pemilih memberikan suara kepada kandidat tertentu karena identitas kepartaian yang melekat kepadanya. Dengan kata lain, seberapa kuat “ikatan batin” pemilih terhadap partai politik tertentu berpengaruh terhadap keputusannya untuk memberikan suara kepada kandidat yang berasal dari partai di mana dia menjadi anggota partai tersebut. Dibandingkan ketiga faktor di atas, faktor *party identification* ini jauh lebih stabil melekat pada diri calon pemilih, mengingat proses identifikasi terjadi dalam proses yang tidak sebentar.

Bahkan tidak jarang, proses identifikasi kepartaian lahir bersamaan dengan proses sosialisasi yang diterima dari keluarga, tempat dia tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Dengan demikian, dalam ilmu politik, faktor ini disebut sebagai *long term* variabel. Sedangkan tiga faktor pertama disebut *short term* variabel.

3) Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi lahir sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dan psikologis. Pemikiran baru ini mempergunakan pendekatan ekonomi yang sering pula disebut sebagai pendekatan rasional. Tokoh dalam pendekatan ini, antara lain, Downs dalam karyanya, *An Economic Theory of Democracy* (1957). Tokoh lain adalah Riker dan Ordeshook yang menulis buku *A Theory of the Calculus*

Voting (1962). Para penganut aliran ini menjelaskan bahwa perilaku pemilih terhadap partai politik tertentu berdasarkan perhitungan tentang apa yang dia peroleh bila menjatuhkan pilihan ke kandidat tertentu.

Menurut Dieter Roth, pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) dipopulerkan oleh Downs (1957). Menurut dia, pemilih pada dasarnya bertindak secara rasional ketika membuat pilihan dalam tempat pemungutan suara (TPS), tanpa mempertimbangkan agama, jenis kelamin, kelas, latar belakang orang tua, dan latar lainnya yang bersifat eksternal.

Menurut Anthony Downs, dalam konteks pilihan rasional, ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih partai atau calon presiden yang tengah berkompetisi, ia bahkan tidak akan melakukan pilihan pada pemilu. Mereka menggunakan pertimbangan-pertimbangan *costs and benefits* sebelum menentukan pilihan. Pertimbangan *costs and benefits* itu lebih didasarkan pada gagasan atau program-program yang bersentuhan dengan dirinya.¹⁴

Pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh Morris P. Fiorina dalam model keputusan pemilu restospektif. Dalam model ini tampak bahwa teori perilaku pemilu yang rasional dan pendekatan sosial psikologis sejatinya dapat dikombinasikan dan dikomplementasikan satu sama lain¹⁵

¹⁴Simak juga Anthony Downs, *An Economic Theory of Democracy* (New York: Harper, 1957).

¹⁵Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* terj. Denise Matindas (Jakarta: LSI, 2009).

Faktor-Faktor yang Menentukan Pilihan Politik

Perilaku politik, sebagaimana perilaku pada umumnya, dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan. Berdasarkan penjelasan budaya politik dan pendekatan sosiologis, pilihan politik seseorang sedikit banyak ditentukan oleh sejauh mana orientasi politik individu terhadap sistem politik secara keseluruhan, termasuk di dalamnya partai politik, aktor, atau elit politik.

Asumsi pendekatan budaya politik dan pendekatan sosiologis menyatakan bahwa orientasi seseorang terbentuk melalui keanggotaan pada berbagai tipe kelompok sosial. Luas dan sempitnya orientasi dan pemahaman seseorang ditentukan oleh ruang lingkup dari kelompok sosial dan atau keagamaan yang dimasukinya.¹⁶

Pendekatan psikologis lebih melihat faktor kekuatan dari dalam diri individu sebagai faktor yang menentukan pilihan-pilihan politiknya. Kekuatan psikis tersebut terefleksikan ke dalam sikap-sikap dan kepribadian yang dibentuk melalui proses sosialisasi.

Terlepas dari beberapa pendekatan di atas, Bambang Cipto (1999) menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan pemilih dapat diperkirakan menurut tolok ukur tradisional, yang meliputi tiga aspek penting: a) *party identification*; b) *issues of candidate and party*; c) *candidate's (party elite's) personality, style, and performance*.

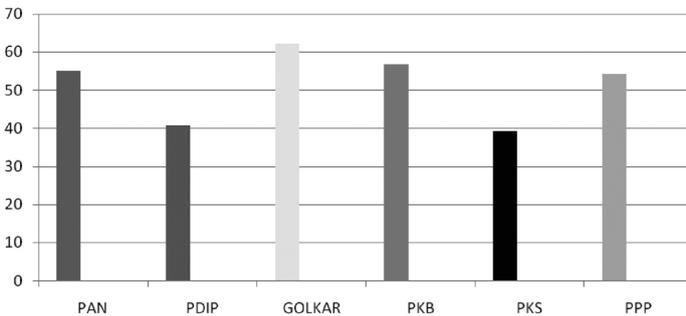
Indetifikasi partai merupakan perasaan terikat pada kelompok dimana ia menjadi anggota ataupun kelompok yang ia pilih, sebagaimana dikemukakan oleh Campbell,

¹⁶ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* terj. Denise Matindas (Jakarta: LSI, 2009).

Gurin, dan Miller (1960) dalam Barry C Burden and Casey (2003: 3): *The sense of personal attachment which the individual feels toward the (partisan)group of his chois.*

Indetifikasi partai akan terkait dengan kesetiaan (loyalitas) dan ketidaksetiaan (volatilitas) dari masa suatu partai. Semakin tinggi identitas partai akan semakin menjamin loyalitas massa partai, sebaliknya semakin rendah identifikasi partai akan semakin rendah pula loyalitas massanya.

Di Indonesia, identifikasi partai agaknya sulit dijelaskan, mengingat tidak ada satu partai pun yang memiliki massa pendukung yang jelas. Kalaupun ada, hanya nampak latar belakang kelompok agamanya saja. Itu pun bukan merupakan ciri atau identifikasi partai tersebut. Yang ada justru massa mengambang (*floating mass*). Untuk itu, memberikan gambaran mengenai sejauh mana loyalitas massa partai dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Pemilih loyal pada Pemilu tahun 2004 berdasarkan pilihan politik pada Pemilu tahun 1999 (Survei, LSI, November 2003). PAN: 55,1%, PDIP: 40,7%, GOLKAR: 62,2%, PKB: 56,9%, PKS: 39,3%, PPP: 54,3%.

Loyalitas massa pendukung partai akan berpengaruh terhadap kemenangan partai dalam pemilu. Oleh karena itu, setiap partai akan mengupayakan tetap terjaminnya loyalitas partai, sekalipun dengan menggunakan politik uang (*money politic*).

Faktor penentu kedua adalah isu-isu di seputar kandidat dari suatu partai maupun isu-isu di seputar partai tersebut. Faktor ini nyata sekali berkaitan dengan merosotnya perolehan suara PDI-P pada Pemilu 2004. Jika dibandingkan dengan Pemilu 1999, suara PDI-P pada Pemilu 2004 mengalami penurunan sekitar 15 persen.

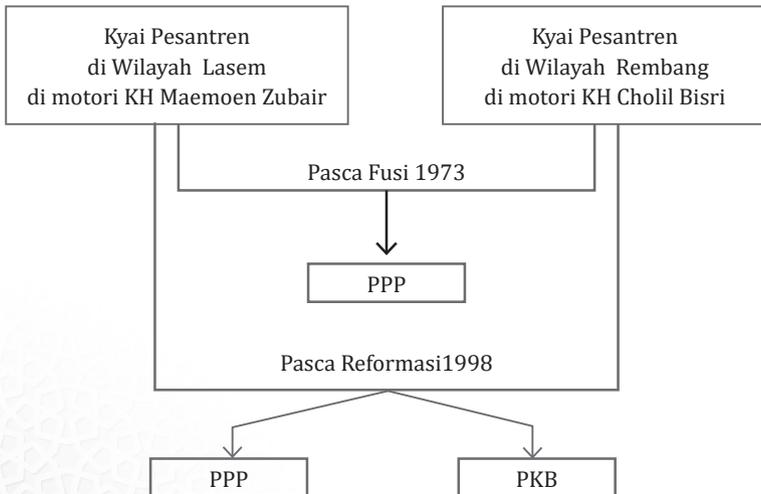
Pada Pemilu 1999 PDI-P mendapat 35 juta (34%). Sedangkan pada Pemilu 2004 hanya mendapatkan suara 21 juta (19%). Kemerosotan PDI-P pada Pemilu 2004 dinilai Riswanda Imawan (*Kompas*, 20/4/2004) karena adanya protest *voters* terhadap PDI-P dalam pemilu. Selain itu juga karena adanya fenomena *split voting* (suara terbelah). Terbelahnya suara PDI-P ini disinyalir oleh beberapa pengamat sebagai akibat dari beberapa tokoh puncak PDI-P yang beramai-ramai mendirikan partai baru.

Faktor ketiga yang ikut dalam menentukan pengambilan keputusan pemilih adalah kepribadian, gaya hidup, dan performa dari partai maupun kandidat partai. Fenomena mencuatnya pendatang baru Partai Demokrat yang berhasil mengusung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam dua musim pemilu terakhir salah satunya dapat dijelaskan dengan faktor ini. Beberapa kalangan bahkan secara tegas menyatakan, popularitas SBY-lah yang mampu

mendongkrak perolehan suara.¹⁷

Hal serupa juga dialami oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini semula bernama Partai Keadilan (PK). Pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 7 kursi di DPR, namun pada Pemilu 2004 memperoleh 45 kursi—meningkat lebih 650 persen. Banyak analis menilai, kemenangan PKS ini tidak lepas dari sosok pimpinan partai, Hidayat Nur Wahid, yang dikenal santun, gaya hidupnya sederhana, dan selama ini bebas isu korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).¹⁸

Kerangka pemikiran sebagaimana dijelaskan di atas akan penulis gunakan untuk mengkaji kiprah para kiai pesantren di Rembang dalam partai politik. Penulis juga mengkaji masyarakat Rembang dalam kaca mata sosial-politik.



Bagan yang memetakan kiai-kiai di Rembang dan perjalanan karir politiknya.

¹⁷Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* terj. Denise Matindas (Jakarta: LSI, 2009).

¹⁸Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode* terj. Denise Matindas (Jakarta: LSI, 2009).

BAB IV

Masyarakat Santri Memilih Politik



Membaca Peta Politik Masyarakat Santri

Kota Rembang berada di daerah pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Tengah paling timur. Rembang menghubungkan wilayah Jawa Tengah bagian utara dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur). Masyarakat Rembang memiliki karakter unik.¹ *Wong mbelah* merupakan sebutan lokal bagi orang-orang di daerah pesisir pantai Rembang.

¹Nur Cholis Madjid mengidentifikasi proto bangsa Indonesia ke dalam budaya pesisir dan pedalaman. Budaya pesisir bercorak kemaritiman dengan ciri utama keterbukaan, persamaan manusia, mobilitas tinggi dan kosmopolitanisme. Dengan mobilitas yang tinggi membawa para warga pesisir menjadi anggota berbagai kelompok sosial budaya dalam berbagai tempat dan daerah. Kondisi berdampak pada perataan jalan bagi tumbuhnya semangat kebangsaan atas dasar kesadaran persamaan budaya, dan kemudian juga nasib. Mereka mengukur tataran budaya dari standar pendidikan modern, sementara tingkat kemampuan teknis birokratik dan administrasinya rendah. Lihat Nur Cholis Madjid, "Dukungan Budaya Nasional bagi Reformasi Sosial Politik" dalam Zainidin Maliki, *Agama Priyayi* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004), hlm. 216.

Mereka adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir pantai Rembang, yang setiap harinya berprofesi sebagai nelayan.

Tampilan *wong mbelah* menggambarkan potret masyarakat yang terbuka dan mudah menerima perubahan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat pesisir merupakan kawasan yang memungkinkan bagi berlangsungnya proses interaksi sosial, antara masyarakat dengan pendatang: pedagang, birokrat, kaum terdidik (santri), dan pelancong.

Dalam catatan sejarah Rembang pernah berjaya dalam hal perdagangan dan pembuatan kapal. Seiring dengan pasang surutnya peredaran ekonomi di daerah ini, pada abad ke-19 para pemilik dan pengelola kapal serta para nelayan beralih profesi ke penyelundupan opium.² Dewasa ini realitas sosial menunjukkan solidaritas dan jalinan sosial di masyarakat kian merenggang. Terutama di kawasan pesisir pantai, yang dominan adalah menguatnya gaya hidup hedonis dan individualistis.

Kondisi sosial yang juga mewarnai kehidupan *wong mbelah* di Rembang adalah adanya struktur sosial yang tercermin melalui hubungan antara *wong mbelah* dan *bakul*.³ Meski sepintas bersifat mutualistis (saling membutuhkan) namun secara *de facto* hubungan ini sebenarnya tidak *equal* (sejajar). Yang terjadi sejatinya adalah semakin mengekalkan

²James R. Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm. 157.

³*Wong mbelah* dan *bakul* adalah sebutan lokal bagi masyarakat di daerah pesisir Rembang. Keduanya merupakan masarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Perbedaan mereka terletak pada fungsi dan peran masing-masing. *Bakul* berperan sebagai pembeli hasil tangkapan (ikan) para nelayan.

proses ketergantungan *wong mbelah* terhadap bakul.

Terkait dengan politik, *wong mbelah* sangat bergantung bagi tokoh politik yang mereka ikuti, yaitu kiai pesantren. Bagi mereka, sosok kiai bisa mewakili aspirasinya. Artinya, menurut mereka antara persoalan politik dengan persoalan agama masih sangat berhubungan, dan kiai masih dianggap relevan sebagai tumpuan akhir. Karena itu, di satu tempat dengan tempat lain, pilihan politik *wong mbelah* bisa berbeda. Ini bergantung kepada tokoh siapa yang diikuti. Di Kecamatan Sarang, misalnya, akan mempunyai pilihan yang berbeda dengan *wong mbelah* di kecamatan lain di wilayah pesisir Rembang.

Selain itu, antara kiai dengan masyarakat setempat terjalin hubungan yang dekat, baik secara geografis maupun kultural. Dalam tradisi mereka, kiai dipahami sebagai penerus nabi-nabi, yang doanya dikabulkan (*mustajab*).⁴ Banyak upacara dalam tradisi budaya lokal masyarakat pesisir, misalnya *selamatan*, *sedekah laut*, *manakiban*, yang kehadiran seorang kiai dianggap penting untuk meningkatkan kekhidmatan upacara.

Kondisi ini menjadikan masyarakat pesisir begitu *sam'an wa tha'atan (taken for granted)*⁵ kepada figur kiai. Demikian pula dalam pandangan politik, apa yang menjadi pilihan kiai akan serta merta diikuti oleh masyarakat. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan

⁴Biasanya, ketika para nelayan mau memulai melaut pada bulan-bulan tertentu (bulan baik), terlebih dahulu mereka melakukan *selamatan* atau *manakiban*. Mereka meminta kiai sepuh yang doanya *mustajab* agar memimpin doa untuk keselamatan para awak kapal—*editor*.

⁵Kecenderungan masyarakat dalam mematuhi apa saja yang dinasehatkan seorang kiai pesantren.

Sarang. Pilihan politik masyarakat di daerah ini jatuh pada PPP. Alasannya sederhana, karena di daerah ini ada Kiai Maimoen Zubair, salah satu tokoh terpenting pada partai berlambang Ka'bah itu.

Kondisi yang sama juga nampak di Kecamatan Lasem pada masa lalu. Pada Pemilu tahun 1955, Lasem termasuk salah satu daerah pemenang pemilu bagi Partai NU. Partai berlambang bola dunia ini mendapat suara 71,08 persen. Perolehan ini merupakan peran tokoh legendaris di kota yang memiliki khazanah batik khas, yaitu KH. Ahmad Ma'sum (Mbah Ma'sum) dan KH. Baidlowi.

Pada masa-masa awal pemerintahan Orde Baru, PPP sebagai representasi partainya warga NU sangat kuat, sebagaimana Pemilu 1955. PPP di Lasem pada Pemilu 1977 mendapat suara 47,10 persen, sementara Golkar hanya memperoleh 35,99 persen suara. Tetapi pasca Pemilu 1977, keadaan menjadi terbalik. Partai nasionalis yang selalu memenangkan pemilu. Kondisi ini berlangsung, bahkan hingga saat ini.

Berbeda lagi dengan *wong mbelah* di beberapa kecamatan, misalnya Kragan, Sluke, dan Tasikagung (Rembang kota). Daerah-daerah ini merupakan basis partai non-Islam. Karena itu, di daerah ini partai Islam mengalami kekalahan di beberapa pemilu. Berdasarkan analisis penulis, hal ini disebabkan antara lain faktor ketaatan kepada figur kiai yang rendah. Memang kalau dipetakan, daerah-daerah tersebut merupakan kawasan masyarakat *abangan*.

Beberapa paragraf di atas merupakan potret masyarakat Rembang di daerah pesisir pantai. Apabila kita masuk di daerah pedalaman, ke arah bagian selatan,

maka kita akan menemukan penduduk yang berprofesi sebagai petani. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Kecamatan Sedan, Pamotan, Pancur, Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Kaliori, dan Kecamatan Sulang. Daerah-daerah ini mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Dalam pengamatan penulis, di daerah-daerah ini tidak ada institusi pesantren yang menonjol, seperti di Kecamatan Sarang dan Rembang (kota). Kalaupun ada, hanya pesantren-pesantren kecil, itu pun dengan jumlah santri yang terbatas.

Posisi Kiai dalam Perpolitikan di Masyarakat Santri

Pemilu tahun 1955 (masa Orde Lama) adalah pemilu yang pertama kali di Indonesia. Dengan menggunakan sistem proporsional, Pemilu pertama tahun 1955 itu dilaksanakan dengan dua tahap. Pada tanggal 29 September untuk memilih anggota DPR, dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota konstituante. Pada waktu itu hampir 87,65 persen penduduk Indonesia menggunakan hak pilihnya.

Begitu pula di Kabupaten Rembang, prosentase penduduk yang menggunakan hak pilihnya tidak jauh dari prosentase secara nasional. Masyarakat Rembang yang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke tempat pemungutan suara mencapai jumlah 91,39 persen dari total jumlah penduduk kala itu.⁶

Sejak saat itu, peran para kiai pesantren sudah mewarnai dunia perpolitikan di Rembang. Terutama untuk

⁶Data statistik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang. Penulis juga mempelajari data dari beberapa sumber lain yang mendukung akurasi data.

mendongkrak perolehan hasil suara partai Islam—yang berbasis massa *nahdliyin*. Ini tidak lepas dari keberadaan pondok pesantren dan para kiai yang sejak awal aktif di organisasi sosial keagamaan semacam NU, seperti Mbah Ma'sum Lasem. Karena itu bukanlah hal yang sulit dipahami apabila Rembang sejak semula sudah menjadi basis kiai yang berpolitik, diukur dari daerah-daerah di sekitarnya.

Dinamika keterlibatan kiai-kiai pesantren di Rembang terus bergulir. Sampai akhirnya masa reformasi menghampiri dunia perpolitikan di Indonesia. Pada masa-masa ini pun kiprah politik kiai-kiai di Rembang masih eksis, meskipun terjadi konstelasi politik dan sedikit pergeseran. Waktu berjalan, dan jaman pun berubah. Kalau semula kiai-kiai ini kokoh mempertahankan satu partai di tengah upaya-upaya satu pihak untuk mengebiri perolehan suara partai Islam, maka pada satu masa sebagian kiai-kiai ini justru berpindah ke partai baru.

Dengan demikian, pada masa Reformasi, kiai-kiai pesantren di Rembang secara sederhana bisa dipetakan menjadi dua bagian. Sebagian dari mereka memilih untuk bertahan di partai lama, PPP. Sebagian yang lain memilih untuk pindah ke partai baru, PKB.

Perpindahan para kiai aktivis partai (dari PPP ke PKB) ini disebabkan paling tidak dua alasan.

Pertama, kepentingan individual. Kebanyakan kiai yang memilih tetap di PPP karena secara struktural banyak dari mereka yang tidak memperoleh jabatan strategis di partai baru (PKB). Sebaliknya, kiai yang memilih untuk pindah ke partai baru karena tidak mempunyai posisi atau jabatan strategis di PPP.

Kedua, karena mengikuti perkembangan politik NU di pusat. PKB sebagai bagian dari gerakan politik yang dimotori oleh PBNU menjadikan keyakinan kuat bagi para kiai untuk pindah haluan ke PKB.

Munculnya partai baru dari rahim ormas NU dan terjadi perpindahan keberpihakan kiai terhadap partai-partai inilah awal yang menandai persaingan antar kiai di Kabupaten Rembang dalam merebut simpati pada warga NU. Tabel di bawah ini merupakan daftar kiai-kiai yang menetap di PPP dan mereka yang berpindah ke partai baru, PKB.

Kiai-kiai yang berpindah ke PKB tahun 1999

No	Nama Kiai	Partai Politik	Tahun	Partai Politik	Tahun
1.	KH. Cholil Bisri	PPP	1971	PKB	1999
2.	KH. Chazim Mabruur	PPP	1997	PKB	1999
3.	KH. Sunarto	PPP	1997	PKB	1999
4.	KH. M. Qorib	PPP	1997	PKB	1999
5.	KH. Zaenal Amroni	PPP	1987	PKB	1999
6.	KH. Sami'un M. Nur	PPP	1987	PKB	1999

Kiai-kiai yang tetap di PPP pada tahun 1999

No	Nama Kiai	Partai Politik	Tahun	Partai Politik	Tahun
1.	KH. Maimoen Zubair	PPP	1971	PPP	1999
2.	KH. Thoifoer MC	PPP	1971	PPP	1999
3.	KH. Abdullah Ubab	PPP	1987	PPP	1999
4	KH. Adib Abdul Rochim	PPP	1997	PPP	1999

Sumber Data: *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rembang.*



BAB V

Dinamika Politik Kiai



Konstelasi Politik Kiai Pasca Reformasi

Era reformasi ditandai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Ini berarti babak baru yang lebih demokratis telah dimulai, meninggalkan sebuah rezim otoriter. Satu era yang diharapkan banyak orang akan mendatangkan angin segar bagi proses bernegara dan demokratisasi di Indonesia.

Memang demikian yang terjadi. Sejak setelah itu, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi memang benar-benar tercipta, bahkan terkesan kebablasan. Di banyak tempat mudah dijumpai unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi. Selain itu juga tercipta kemerdekaan pers, kontrol sosial pada pemerintah, dan juga akhirnya lahir partai-partai baru, termasuk pendirian partai yang bernuansa keislaman (partai-partai Islam).

Masa reformasi merupakan masa transisi menuju terciptanya iklim demokrasi. Pendirian partai-partai adalah sebuah gejala yang wajar pada masa transisi. Secara konstitusional dan institusional, partailah yang akan mengisi proses menuju demokrasi, meskipun pada tahap-tahap awal transisi (awal reformasi) di Indonesia, partai politik mungkin hanya memiliki saham yang kecil dan tidak berperan.¹

Di era ini, partai politik menjamur. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) mencatat ada 141 partai politik. Tetapi yang bisa mengikuti pemilu hanya 48 partai politik, dan 20 di antaranya adalah partai politik yang bernuansa Islam.

Partai Islam yang lahir pada masa-masa pasca reformasi semacam reinkarnasi dari partai-partai Islam peserta Pemilu 1955. Reinkarnasi partai peserta Pemilu 1955 ini menimbulkan berbagai fragmentasi baru. Dari partai-partai itu timbul semacam faksi-faksi baru, yang masing-masing faksi mendirikan partai sendiri pada era reformasi seperti Partai Masyumi, NU, PSII, Perti, PPTI adalah di antara yang kemudian melahirkan generasi partai baru.²

¹Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 202.

²Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara* (Jakarta: YPPR-Puslit IAIN Jakarta, 1999), hlm. 18.

Fragmentasi Partai Islam Peserta Pemilu 1955

No	Partai Kontestan Pemilu 1955	Fragmantasi Pasca Orde Baru
1.	Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)	PBB (Partai Bulan Bintang) PMB (Partai Masyumi Baru) PPIM (Partai Politik Islam Masyumi)
2.	NU (Nahdlatul Ulama')	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Partai Suni (Solidaritas Uni Indonesia) PNU (Partai Nahdlatul Umat) PKU (Partai Kebangkitn Umat)
3.	PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia)	PSII PSII 1905
4.	PERTI (Perhimpunan Tarbiyah Islamiyah)	AKAMSI (Aliansi Kebangkitan Muslim Sunni Indonesia) PAKKAM (Kebangkitan Kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah) PBM (Partai Bakti Muslim) PERTI (Partai Era Reformasi Tarbiyah Islamiyah)
5.	Partai Tharikat Islam	Partai Persatuan Tharekat Islam Partai Politik Tharekat Islam Partai Pengamal Tharakat Islam

Partai Islam Jilid Kedua

Selain partai yang merupakan reinkarnasi dari partai-partai Islam masa lalu, lahir pula partai Islam baru—yang apabila dirujuk sejarahnya bukan berbasis pada ideologi partai lama (*editor*)—seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Abul Yatama, Partai Keadilan (sekarang PKS). Partai-partai ini lahir bukan karena fragmentasi dari pemilu 1955, akan tetapi karena perubahan politik yang membuka kepada banyak harapan untuk menata ulang sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berakhirnya pemerintahan di era Presiden Soeharto, 21 Mei 1998, merupakan titik awal bagi reformasi seluruh sistem politik dan birokrasi negara. Karena sistem lama dinilai tidak dapat merespons arus deras perubahan, maka diperlukan sistem dan pelaku baru. Mereka yang memiliki pendapat seperti memandang perlu untuk melakukan perubahan yang riil.

PAN lahir dari gerbong ormas Muhammadiyah melalui sidang tanwir di Semarang tahun 1998. Sidang ini mengamanatkan kepada pengurus pusat Muhammadiyah untuk melakukan ijtihad politik. Amanat itu dimatangkan melalui rapat pleno pada 22 Agustus 1998 di Jakarta.³

Sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tadinya bernama Partai Keadilan (PK). Partai ini berdiri pada tanggal 20 April 1998. Publik mengetahui partai ini dalam kenferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Partai ini pada pemilu 1999 hanya memperoleh 1,36 persen dengan 7 kursi di DPR.

³Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 292.

Menurut UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999, syarat batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) adalah dua persen. Karena itu Partai Keadilan harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu 2004. Akhirnya PK mejadilah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 20 april 2002 (9 Jumadil 'Ula 1423 H).

Menjelang Pemilu 2004 partai ini meluncurkan program-program yang mengharuskan para kadernya terjun langsung ke lapangan. Seperti dalam menghadapi musibah bencana tsunami di Aceh, partai ini menerjunkan relawan untuk membantu penanganan bencana alam dan rekontruksi Aceh.

Pada akhirnya, PKS secara mengejutkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam perolehan suara, yakni 7,34 persen dengan jumlah kursi di DPR mencapai 45. Pada Pemilu 2009 partai ini juga bisa menambah perolehan suara, meskipun tidak sebesar pada Pemilu 2004, yaitu 7,88 persen dengan kursi di DPR mencapai 57.

Bagaimana dengan PKB, PBB, dan PPP. Dalam perjalanannya, PKB, PBB dan PPP berbeda dengan PKS. PKB lahir dari rahim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, banyak desakan dari warga NU agar PBNU membentuk partai politik sebagai wadah perjuangan politik warga NU.

Akhirnya PBNU mengadakan rapat harian syuriah dan tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Rapat ini menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang bertugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH. Ma'ruf Amin, dengan Anggota KH. M. Dawam Anwar, KH. Said Aqiel Sirodj, M. Rozy Munir, dan Ahmad Bagja.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima, maka rapat harian syuriah dan tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberikan surat tugas kepada Tim Lima. Selain itu juga dibentuk Tim Asisten yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU kala itu), dengan Anggota Muhyidin Arubusman, M. Fachri Thaha Ma'ruf, Abdul Aziz, Andi Muarli Sunarwa, M. Nasihin Hasan, Lukman Saifudin, Amin Said Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan untuk membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadai aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 sampai 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan di Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan pokok pikiran NU mengenai reformasi politik, *mabda' siyasi*, hubungan partai politik dengan NU, AD/ART dan naskah deklarasi.

Maka pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 H bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1998 secara resmi PBNU mendeklarasikan, bahwa PKB adalah partai politik yang resmi didirikan oleh PBNU. Kiai-kiai yang mendeklarasikan adalah: KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchyat, KH. Abdurahman Wahid, KH. A. Mustofa Bisri, dan KH. A. Muchith Muzadi.⁴

⁴Ahmad Hakim Jayli dan Muhammad Tohadi, *PKB dan Pemilu 2004* (Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, 2004), hlm. 4-6.

Partai yang berasaskan Islam lainnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB). Partai ini berdiri pada tanggal 17 Juli 1998. Mereka yang mendirikan adalah sekelompok ulama dan ilmuwan yang berpatron pada Partai Masyumi tempo dulu. Inisiator pendirian partai ini adalah Yusril Ihza Mahendra.

Dalam perjalanannya PBB mengalami pasang surut. Pada Pemilu 1999 memperoleh 1,94 persen dan mendapatkan 13 kursi di DPR. Pada Pemilu 2004 mendapatkan 2,62 persen dengan 11 kursi. Pada Pemilu 2009 partai ini memperoleh 1,79 persen. Dalam aturannya, partai berhak memperoleh kursi di DPR jika mencapai lebih dari 2,50 persen. Karena ini, PBB tidak mendapat jatah kursi di DPR—karena tidak memenuhi *parliamentary threshold*.⁵

Satu-satunya partai Islam warisan Orde Baru adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973, yang merupakan gabungan dari Partai NU, Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Partai ini juga mengalami pasang surut, terutama ketika memasuki masa-masa pasca reformasi.

Pada Pemilu 1999 PPP memperoleh 10,71 persen dengan 58 kursi. Pada Pemilu 2004 perolehan suara PPP cenderung menurun karena konflik internal di tubuh partai. Salah satunya telah berdiri Partai Bintang Reformasi (PBR) yang merupakan sempalan dari PPP. Pada saat itu PPP hanya memperoleh 8,15 persen, tetapi perolehan kursi sama dengan Pemilu 1999, yaitu 58 kursi di DPR. Dan pada Pemilu 2009 memperoleh 5,32 persen dengan 37 kursi di DPR.

⁵Teguh Budi Santoso, *Detik News* (Jumat, 26 Desember 2008).

Walhasil, perjalanan partai Islam sebagai representasi dari kelompok Islam (kaum santri) diwarnai dengan intervensi pemerintah yang berkuasa. Baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno adalah bentuk intervensi pemerintah yang kentara. Sementara fusi dan deideologisasi merupakan bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah pada masa Soeharto berkuasa (Orde Baru).

BAB VI

Pelajaran dari Rembang: Berpisah untuk Berbagi Tugas



Dalam konteks politik lokal, sejak reformasi bergulir iklim di Rembang cenderung kondusif. Hampir tidak terjadi konflik yang diakibatkan persoalan politik, sebagaimana konflik-konflik yang terjadi di kawasan pesisir Jawa Tengah seperti Pekalongan dan Jepara. Di sisi lain, para elit politik di Rembang terbelah menjadi dua jalur perjuangan.

Pada masa reformasi beberapa tokoh politik Islam senior di Kabupaten Rembang memilih berpindah ke partai baru. Sikap ini segera diikuti oleh para politikus junior. KH. Cholil Bisri, misalnya, memilih meninggalkan gerbong lama (PPP) dan berpindah ke PKB. Menurut dia, PKB adalah partainya warga NU masa kini. Berbeda dengan KH. Maimoen Zubair dan KH. Thoyfoer, dua tokoh senior PPP ini memilih *istiqamah* di PPP. Menurut dia, NU tidak mengkhususkan warganya untuk bergabung ke partai tertentu. Sebaliknya, warga NU bebas menentukan pilihan politik sebagaimana Khitah NU.

Di barisan KH. Maimoen Zubair berdiri kiai-kiai pesantren. Mereka antara lain, KH. Thoyfoer (Lasem), KH. Haizul Ma'ali (Sedan), KH. Muthi' (Pamotan), KH. Nur Salim (Kragan). Sementara di belakang KH. Cholil Bisri segera merapa para kiai, bahkan di antara mereka juga terdapat para santri. Mereka antara lain, KH. Khazim Mabur (Rembang), KH. Roghib Mabur (Sarang) KH. M. Zaenal Amroni (Rembang), KH. Ahmad Sunarto, (Rembang), Muh. Qorib Sa'id, dan Ahmad Faqih.

Ada fenomena menarik dari kondisi perpolitikan santri di Rembang. Meskipun di antara tokoh elit partai Islam terbelah, namun tidak membawa perpecahan pada level massa pendukung di bawah (warga NU). Ini berbeda dengan yang terjadi di Pekalongan dan Jepara. Terlebih ketika memahami karakter masyarakat pesisir yang keras dan apa adanya. Namun faktanya, masyarakat Rembang berhasil menghargai perbedaan pilihan politik. Dalam pengamatan penulis, ini tidak lepas peran dari tokoh politik masing-masing.

Rembang Tempo Dulu

Pada Pemilu 1955 PNI berhasil menang dan memperoleh suara 8,4 juta atau sekitar 22,3 persen. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Rembang, partai ini meraih 50.703 suara atau sekitar 40,13 persen. Tetapi kemenangan PNI di Rembang tidak diikuti oleh Partai Masyumi, sebagaimana hasil perolehan pemilu di tingkat nasional. Masyumi secara nasional mendapatkan 20,9 persen suara. Di Kabupaten Rembang partai Islam hanya mendapatkan 8,61

persen. Justru NU yang secara nasional hanya mendapatkan 18,4 persen, di Kabupaten Rembang mendapatkan suara terbanyak setelah PNI, yakni 38.144 suara atau sekitar 30,18 persen.¹

Pertanyaan yang muncul, mengapa di Rembang NU mendapatkan suara cukup banyak, sementara Masyumi hanya sedikit. Hal ini disebabkan adanya keputusan NU tanggal 5 April 1952 yang menyatakan secara tegas, bahwa NU keluar dari Masyumi. Maka secara otomatis, dengan keputusan tersebut, banyak tokoh NU di Rembang ikut keluar dari kepemimpinan Masyumi.

Terbukti, beberapa tokoh pesantren seperti KH. Bisri Mustofa,² KH. Zubair,³ dan kiai-kiai lain yang semula aktif di Masyumi berbondong-bondong kembali ke rumah (NU). Dengan banyaknya tokoh NU yang kembali ke rumah, para kiai pesantren menopang suara Partai NU cukup besar. Ini terjadi dalam Pemilu 1955 di Kabupaten Rembang.

Selain dua tokoh di atas, ada pula tokoh Rembang yang sangat disegani, yaitu KH. Ma'sum dari Lasem (Mbah Ma'sum). Tokoh ini ikut andil dalam pendirian NU pada tahun 1926.

¹Data dari KPU Daerah Kabupaten Rembang (dari pemilu ke pemilu).

²KH. Bisri Mustofa Anggota DPR-D Rembang tahun 1955 dari unsur NU. Dua anaknya yang mengikuti jejak di politik adalah KH. Cholil Bisri (tokoh PKB pada masa reformasi) dan KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus (salah satu Wakil Rais Syuriah PBNU). KH. Bisri Mustofa pernah menjabat Ketua Cabang Masyumi Rembang ketika NU belum menyatakan keluar dari Masyumi. Ketika NU keluar dari Masyumi, dia kemudian aktif di NU.

³KH. Zubair anggota DPR-D dari unsur NU. Beliau adalah ayah dari KH. Maimoen Zubair, sesepuh PPP.

Bahkan pada 1955 ia pernah menjadi anggota konstituante Kabinet Sastro Amijoyo dari unsur NU. Meskipun jabatan ini disandanginya tidak lama, karena kesibukannya mengurus pesantren di Lasem.

Mbah Ma'sum merupakan ulama sepuh yang ikut serta menopang suara NU di Rembang. Di Rembang, terutama di Lasem, tokoh ini sangat berkharisma dan disegani oleh masyarakat. Dalam berbagai kesempatan Mbah Ma'sum selalu menekankan kepada masyarakat untuk berjuang bersama NU. Dia juga memberikan nasehat kepada para pejabat agar tidak memusuhi NU.⁴

Dengan fatwa-fatwa Mbah Ma'sum, Lasem menjadi salah satu daerah yang menyumbangkan perolehan suara terbesar untuk Partai NU. Bahkan di daerah ini NU pernah menjadi pemenang Pemilu 1955, dan mengungguli perolehan suara PNI. Partai NU mendapatkan 71,08 persen suara, sementara PNI memperoleh 20,69 persen. Sisanya dibagi kepada Masyumi dan partai-partai lain.⁵

Dengan demikian bisa disimpulkan, kebesaran NU di Kabupaten Rembang banyak ditopang oleh peran kiai pesantren. Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren mempunyai kedudukan yang strategis dan istimewa. Faktornya, pesantren merupakan suatu sistem masyarakat yang ruang lingkungannya tidak terbatas pada pesantren, tetapi juga berpengaruh pada lingkungan di sekitarnya.

Institusi pesantren dapat diibaratkan sebagai kerajaan kecil. Kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren.⁶

⁴M. Lutfi Thomafi, *The Authorized Biography of KH. Ma'sum Ahmad* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), hlm. 141.

⁵Sumber data dari KPU-D Rembang.

⁶Zamakhshyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan*

Dalam kondisi yang demikian, setiap anjuran dan keputusan seorang kiai akan memiliki dampak yang besar. Sehingga wajar jika di sekitar lingkungan pesantren hampir dipastikan suara Partai NU besar.

Oleh karena itu, anggota DPR-D Rembang dari unsur NU yang berjumlah 9 orang mayoritas berasal dari kalangan pesantren. KH. Zubair, KH. Taman, KH. Abdul Wahab, dan KH. Bisri Mustofa, mereka semua merupakan tokoh pesantren yang berpengaruh di Rembang pada saat itu.

Bukti kuatnya pengaruh kiai dalam menggerakkan masyarakat di sekitar pesantren adalah ketika ideologi komunis mewabah pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam kondisi demikian, kiai juga muncul sebagai tokoh penting dalam gerakan anti komunis pada era 60-an. bahkan kiai-kiai ini mengizinkan pesantrennya menjadi semacam markas aktivis, terutama kegiatan yang berkaitan dengan NU untuk melawan PKI.⁷

Sebagaimana ditulis Boland dalam *The Struggle for Islam in Modern Indonesia*, NU adalah unsur penting penggerak penghancuran Partai Komunis di Indonesia.⁸ Gerakan-gerakan anti komunis kemudian merembet sampai ke pelosok desa, akibat keinginan PKI yang memaksa untuk melaksanakan *land reform* sejak 1964. Pihak komunis menyebut para pemilik tanah muslim sebagai “setan desa” atau “borjuis”.⁹

Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 56.

⁷Wawancara dengan Huda, tokoh NU Lasem. Tinggal di Rembang.

⁸B.J. Boland, *The Struggle for Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Verhandlingen van het Koningklijk Vorr Taal, Landen Volkenkunde, 1971), hlm. 147.

⁹Andree Feilard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan*

Gerakan anti komunis terjadi di berbagai daerah di Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri terjadi di berbagai daerah, seperti Demak dan Rembang. Di Rembang, gerakan anti komunis dilakukan NU dengan dimotori oleh Pemuda Ansor. Banyak para aktivis PKI yang ditawan dengan alasan tertentu. Suatu ketika para aktivis PKI dijemput paksa oleh para aktivis Pemuda Ansor, kemudian dikumpulkan di madrasah putri (banat). Di tempat ini pengikut Partai Komunis ini diberi penjelasan tentang keagamaan. Setelah itu beberapa dari mereka diserahkan kepada tentara untuk dibawa ke Kodim.¹⁰

Tidak beberapa lama setelah itu pemerintahan Orde Baru berkuasa. Dalam perjalanan politik santri di Indonesia, satu-satunya partai dari kelompok Islam yang masih eksis adalah NU, setelah Masyumi dibubarkan Presiden Soekarno pada tahun 1960. Pada Pemilu tahun 1971, NU adalah satu-satunya partai Islam yang mendapat dukungan terbesar. Pada waktu itu NU memperoleh suara 10.213.650 atau 18,68 persen. Begitu pula di Rembang, NU mendapat suara terbesar setelah Golkar, yaitu 32,85 persen. Sedangkan Golkar memperoleh 53,02 persen, disusul PNI dengan 14,13 persen suara.¹¹

Pada awal rezim Orde Baru tahun 1966 terdapat tiga partai Islam, yakni NU, PSII, dan Perti. Partai-partai ini sudah ada sejak masa Orde Lama. Pada tahun 1968 berdiri Parmusi (Pertai Muslimin Indonesia) yang didirikan untuk menampung aspirasi politik anggota Masyumi yang telah

Makna (Yogyakarta: LKIS, 1999), hlm. 65.

¹⁰Wawancara dengan Abdul Azis, pengurus Pemuda Ansor Rembang. Tinggal di Sarang.

¹¹Sumber data dari KPU-D Rembang.

dibubarkan Orde Lama. Pada tahun 1973 terbentuklah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan fusi dari empat partai, yakni NU, PSII, Perti, dan Parmusi.¹²

Pada saat NU berfusi menjadi PPP, para kiai di Kabupaten Rembang secara tidak langsung mendukung PPP. Mereka antara lain KH. Hamid Baidlowi (Lasem), KH. Toyfoer (Lasem), KH. Cholil Bisri (Rembang), KH. Maimoen Zubair (Sarang). Sejumlah informasi yang penulis terima membenarkan bahwa para kiai ini mengarahkan agar para santri dan masyarakat mendukung PPP.¹³

Adapun dalam aras struktural, keterlibatan dan dukungan politik pesantren di Kabupaten Rembang tidak semua diarahkan ke PPP. Di antara mereka ada yang ke Partai Golkar, seperti KH. Imam Syu'eb (Sarang). Meskipun secara struktural Kiai Imam tidak menjabat sebagai pengurus Golkar, dia adalah tokoh pesantren yang dikenal dekat dengan petinggi Golkar. Akibat kedekatan kiai ini dengan para politisi Golkar, di antara santrinya bahkan ada yang pindah ke pesantren lain di lingkungan pesantren-pesantren Sarang.¹⁴

Beberapa tahun kemudian setelah Muktamar NU di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan untuk *khittah*. NU tidak berpolitik, tetapi memberi keleluasaan warganya untuk berpolitik. Dengan alasan ini, banyak kiai yang bergabung dengan partai-partai selain PPP, seperti Golkar atau PDI.

¹²Selain PPP, terbentuk pula Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan fusi dari partai-partai nasionalis sekuler, seperti PNI, IPKI, dan Partai Kristen-Katolik. Maka sejak tahun 1973, peserta pemilu hanya terdiri dari PPP, PDI, dan Golkar.

¹³Wawancara dengan KH. Abdul Azis. Tinggal di Sarang.

¹⁴Wawancara dengan Soelehan. Santri Kiai Imam Syueb. Tinggal di Sarang.

Dengan alasan *khittah* NU terjadi banyak penggemboosan-penggemboosan yang dilakukan oleh para kiai, terutama yang tidak mendapatkan posisi di PPP. Hal ini mempengaruhi perolehan suara PPP pada Pemilu 1987. Saat itu PPP hanya mendapat 17,03 persen suara.¹⁵

Meskipun terjadi penggemboosan di sana-sini, perolehan suara PPP tetap tinggi. Ini semua karena kegigihan para kiai dalam menyuarakan PPP. Di berbagai kesempatan, seperti acara pernikahan, pengajian-pengajian hari besar Islam, terlebih di saat kampanye, kiai-kiai ini terus menarik simpati masyarakat. Upaya ini pun berbuah. Pada Pemilu 1992 PPP mendapat suara 30,62 persen.

Dalam analisis penulis, kenaikan perolehan suara PPP pada Pemilu 1992 disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, kegigihan para kiai dalam mempromosikan PPP. *Kedua*, apatisme orang-orang terhadap Golkar yang mengintimidasi masyarakat bersama ABRI sebagai kekuatan politik di belakangnya. Akibatnya terjadi arus perlawanan terhadap Golkar. Kondisi ini menyebabkan suara PPP meningkat cukup drastis pada Pemilu 1992. Puncaknya pada Pemilu 1997 suara PPP bertambah menjadi 32,97 persen.

Pada era reformasi terjadi perubahan afiliasi politik. Beberapa tokoh kharismatik berpindah ke partai lain. Kondisi ini berpengaruh terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 1999. Namun ini tidak terjadi di Kabupaten Rembang. Perolehan suara PPP masih tetap unggul (22,40 persen) dibanding perolehan suara PKB (17,38 persen). Hal ini disebabkan beberapa faktor.

¹⁵ Sumber data dari KPU-D Rembang.

Pertama, sosok KH. Maimoen Zubair sebagai tokoh yang masih mendapatkan tempat di masyarakat Rembang masih tetap di PPP. Karena itu, dia merupakan tokoh politik PPP yang menyumbangkan suara terbanyak di Rembang.

Kedua, faktor ketidakmampuan tokoh PKB dalam menepis isu *Khittah* NU yang selalu dijadikan alasan kenapa sebagian kiai tetap *istiqamah* di PPP. Banyak kalangan terutama warga *nahdliyin* yang menganggap bahwa PPP juga termasuk partainya orang NU. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya tokoh NU yang di PPP, seperti KH. Toyfoer MC (Lasem), KH. Maimoen Zubair, dan beberapa kiai non-struktural yang masih menyatakan mendukung PPP.

Ketiga, masyarakat Rembang yang tingkat keberagamaannya kuat, menganggap bahwa PPP adalah partainya *wong Islam*. Hal ini dibuktikan dengan PPP yang berlambang Ka'bah. Bagi kaum tua di pedesaan, simbol-simbol seperti ini masih kuat diyakini sebagai yang islami. Ini masih ditambah dengan para juru kampanye PPP yang di setiap berpidato selalu mengatakan: "...*kiblate wong Islam iku yo ka'bah*" (kiblat orang Islam adalah Ka'bah).



BAB VII

Pendidikan Politik dari Pesantren



Tradisi Meredam Potensi Konflik Politik

Persaingan antara massa pendukung PPP dan PKB di Rembang tidak sampai berujung pada benturan fisik (anarkis). Hal ini berbeda dengan yang terjadi, misalnya, di Jepara dan di Pekalongan. Di Rembang, konflik antara PPP dan PKB bisa dengan mudah diatasi oleh para elit (kiai). Mereka ini merupakan tokoh kunci dalam meredam konflik yang muncul di kedua partai yang sama-sama memiliki basis massa *nahdliyin* tersebut. Kedua kiai ini terbukti bisa meredam emosi para pendukung.

Persaingan antara PPP dan PKB sebenarnya sudah dapat diprediksi sedari awal. Munculnya PKB sebagai partai baru tentu akan mengurangi jumlah perolehan suara PPP di Kabupaten Rembang—sangat mungkin juga di tempat lain—karena tokoh-tokoh yang masuk di jajaran kepengurusan PKB sebagian besar berasal dari para politisi PPP. Sebagai

konsekuensinya, para tokoh ini jelas akan mengarahkan pendukung fanatiknya untuk ikut ke partai baru.

KH. Cholil Bisri merupakan salah satu politisi senior PPP yang kemudian pindah ke PKB. Langkah kakak kandung KH. Mustofa Bisri ini kemudian diikuti banyak politisi lain di Rembang, seperti KH. Zaenal Amroni, Faqih Nasuha, Muh Qorib Said, Ahmad Sunarto. Empat nama yang disebut terakhir merupakan politisi PKB yang terpilih menjadi anggota DPR-D Rembang. Mereka semua adalah mantan politisi PPP. Bahkan Ahmad Sunarto dan Muh. Qorib pernah menjadi anggota DPR-D PPP pada Pemilu 1997. Dengan demikian, beralihnya para tokoh politik PPP ke PKB di masa reformasi tentu akan berdampak pada perolehan suara.

Meski tidak sampai pada pertengkaran fisik, persaingan antara tokoh beserta pendukung kedua partai PPP dan PKB tidak bisa disembunyikan. Yang mudah dirasakan adalah ketika para tokoh kedua partai ini selalu melakukan propaganda politik untuk meyakinkan massa bahwa yang dilakukannya benar. Sikap ini mungkin dalam rangka mendapat legitimasi dari masyarakat.

Puncaknya ketika terjadi perebutan kantor partai (sekarang menjadi kantor PPP Rembang). Ketika itu, masing-masing pihak mengkalim bahwa pihaknya yang berhak menempati kantor. Kubu PKB mengatakan bahwa kantor yang dimaksud adalah milik KH. Cholil Bisri. Maklum, KH. Cholil Bisri merupakan tokoh senior di jajaran DPC PPP Rembang, bahkan pernah menjadi ketuanya.

Pada saat yang sama pihak PPP juga merasa bahwa kantor tersebut adalah kantor PPP. Alasan yang disampaikan saat itu, keberadaan kantor tidak lain adalah hasil kerja keras

orang-orang PPP. Karena itu, kepemilikan yang sah adalah berada di orang-orang PPP.¹

Dengan kearifan dua tokoh kunci masing-masing partai yang berselisih, KH. Maimoen Zubair dan KH. Cholil Bisri, sengketa perebutan kantor bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, tanpa menimbulkan benturan fisik di antara sesama pendukung. Perebutan kantor partai merupakan salah satu contoh ketegangan politik PPP dan PKB di Rembang. Dalam kasus ini, elit politik memainkan peran penting untuk membawa bola panas. Di Rembang, kiai-kiai ini tidak membiarkan api membesar.

Dalam penelusuran penulis, kedua kiai paling berpengaruh ini, Kiai Maimoen dan Kiai Cholil, juga melakukan upaya-upaya lain untuk membesarkan partai dan meningkatkan sumber daya manusia kaum santri—politisi santri

Pendidikan Tentang Politik

Proses *ta'lim* dan *tarbiyah* yang dilakukan pesantren-pesantren di Jawa juga berlaku di pesantren-pesantren di Rembang. Melalui majelis taklim, organisasi sosial keagamaan, lembaga pendidikan, pengajian umum, pengajian kitab kuning, dan pengajian *thariqah* proses pembelajaran kepada santri dan masyarakat terjadi. Di dalam proses *ta'lim* dan *tarbiyah* inilah kajian politik juga disampaikan, mungkin hanya mengecualikan bagi jama'ah *thariqah*.

¹Wawancara dengan Nasirul Mahasin. Wakil Bupati Rembang periode 2000-2005. Pernah aktif di PPP.

Dalam pandangan kiai-kiai pesantren Rembang, masyarakat harus mengetahui politik. Sebab kalau tidak akan menjadi 'korban politik'.² Prinsip ini konon berasal dari KH. Bisri Mustofa, kemudian dikembangkan putranya, KH. Cholil Bisri dan seterusnya. Hari ini, putra KH. Cholil Bisri, KH. Yahya Cholil Staquf dalam ceramah-ceramahnya dan ketika mengisi pengajian para santri sering mengutip *statement* tersebut.

Hal yang sama juga ditekankan KH. Maimoen Zubair. Menurut dia, pengetahuan tentang politik harus dikuasai para santri, meskipun tidak harus terjun langsung dalam politik praktis. Pandangan kiai sepuh ini diamini kiai-kiai lain, semisal KH. Fatkur Rahman Aly.³ Kelak, prinsip politik KH. Maimoen Zubair ini menjadi pegangan kiai-kiai pesantren di Rembang, yang secara giat menyuarakan signifikansi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika dirunut sumbernya, pandangan politik yang diajarkan KH. Maimoen Zubair dan KH. Cholil Bisri kepada masyarakat dan para santri merupakan doktrin teologis sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun, dalam kedua sumber tersebut bentuk dan sistem politiknya tidak ditentukan secara jelas.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berimplikasi pada keharusan mengetahui politik antara lain surah Al-Nisa' (4) ayat 59: "*Hai*

²Wawancara dengan KH. Yahya Cholil Staquf, putra KH. Cholil Bisri Rembang. Politik yang dimaksud adalah dalam arti luas, yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Pedagang, misalnya, harus mengetahui politik dagang agar tidak rugi atau terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dalam berdagang. Apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat harus mengetahui politik yang terkait dengan nasibnya.

³Wawancara dengan KH. Fathur Rahman Aly, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Sarang.

orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah, rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu..." Selain itu juga terdapat dalam surah Ali Imran (3) ayat 159: "... Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..."

Ayat pertama yang dikutip di atas menunjukkan kewajiban taat pada *ulil amri*, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Dengan demikian, umat Islam harus mengetahui kebijakan pemerintah dan pemerintahan itu sendiri. Beberapa produk kebijakan pemerintah adalah berpartisipasi dalam politik.

Begitu juga dengan ayat tentang musyawarah. Para ulama mengatakan, musyawarah (dengan demikian juga ayat ini—*editor*) merupakan dasar sistem demokrasi. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan terlibat di dalam proses-proses politik yang ada.

Rasulullah SAW sendiri pernah memberi contoh. Dalam mengatur masyarakat (negara) Madinah, jika dilihat dari segi praksis dan diukur dengan variabel politik modern, Rasulullah SAW juga berpolitik *par excellence*.⁴ Pengaruh pemikiran ulama Sunni, khususnya Al-Mawardi dan Al-Ghazali, sangat melekat pada kedua kiai Rembang ini.

Menurut Al-Mawardi, kedudukan *imamah* dilembagakan sebagai pengganti kenabian dengan fungsi

⁴Sedangkan sunnah *qaulyah* yang sering dijadikan pijakan adalah hadis riwayat Hisyam bin Urwah dari Abi Shalih dari Abi Hurairah yang artinya: "Akan memerintah sesudahku nanti penguasa yang baik dengan kebaikannya, dan yang jahat dengan kejahatannya. Dengarkanlah mereka dan patuhilah segala apa yang bersesuaian dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik adalah untuk kamu sekalian dan untuk mereka. Sebaliknya jika mereka berbuat jahat, akibat baiknya untuk kalian, sedangkan akibat buruknya untuk mereka".

mengatur agama dan mengatur dunia (*al-imamah maudhu'at li al-khilafat an-nubuuwah fi kharasat al- din wa siyasat al-dunya*).⁵

Sebagai pesantren yang memegang teguh prinsip-prinsip yang berkembang di ormas NU, kedua kiai di atas merupakan referensi ulama dalam kehidupan politik. Dengan menggunakan bahasa agama, kiai berupaya meningkatkan pengetahuan politik masyarakat. Dengan demikian berbagai bentuk ketaatan masyarakat Rembang terhadap negara, misalnya, tidak hanya semata ketaatan sebagai warga negara, akan tetapi juga didukung oleh nilai spiritualitas sebagai manifestasi ajaran Islam yang diajarkan kiai.

Apa yang dilakukan oleh Kiai Maimoen dan Kiai Cholil sebenarnya merupakan bagian dari pemerataan pengetahuan tentang politik bagi semua lapisan masyarakat. Tidak hanya bagi santri, guru agama atau tokoh masyarakat, akan tetapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Karena itu, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit, walaupun kaum ini sering menjadi elemen penggerak. Dengan proses ini akan terjadi kultur politik di masyarakat.

Di samping melalui proses *ta'lim* dan *tarbiyah*, gerakan pembelajaran dan peningkatan pengetahuan politik juga dilakukan Mbah Moen dan Mbah Cholil melalui struktural partai dan jejaring organisasi (NU). Karena itu, meskipun sebagai lembaga pendidikan, keterlibatan pesantren dalam struktur partai dan organasasi NU cukup intens. Keberadaan pesantren juga memberi pengaruh yang kuat (terhadap kultur yang tercipta di partai—*editor*).

⁵Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 84.

Menurut penuturan Abdullah Ubab, putra sulung Kiai Maimoen, keterlibatan sang ayah dalam organisasi NU cukup intens dan berpengaruh besar terhadap keinginannya dalam mendidik masyarakat agar *melek* dunia pemerintahan (politik). Sampai saat ini tercipta *image*, jika masyarakat Rembang tidak NU, itu satu hal yang aneh.

Fakta di lapangan menginformasikan, NU menjadi partai politik peserta pemilu, baik pada pemilu era Orde Lama (1955) maupun pada awal Orde Baru (1971). Dalam kedua pemilu ini NU mampu meraih suara cukup besar dan masuk dalam tiga besar perolehan suara terbanyak secara nasional.

Metode Pendidikan Politik Ala Pesantren

Secara metodologis, peningkatan pengetahuan politik yang dilakukan Kiai Maimoen dan Kiai Cholil menggunakan beberapa metode.

Pertama, metode ceramah. Metode ini merupakan paling klasik dan sering dilakukan, khususnya digunakan di lembaga-lembaga pendidikan, tidak terkecuali pesantren.

Di pesantren, ceramah monolog adalah metode yang sangat dominan, sehingga ruang dialog dan komunikasi dua arah antara kiai dan santri maupun kiai dan masyarakat yang menjadi audiens sangat jarang terjadi. Sampai-sampai berkembang di kalangan santri, jika ada santri mempertanyakan sesuatu yang disampaikan oleh kiai, maka dia termasuk melakukan tindakan yang tidak etis. Dialog

hanya dilakukan terbatas, dan biasanya antara kiai dan masyarakat, terutama ketika mereka berkunjung ke rumah kiai (*sowan*).

Kedua, metode keteladanan (*modeling*). Keteladanan ini erat hubungannya dengan posisi ulama sebagai pewaris para Nabi, yang harus diteladani ucapan dan tindakannya. Hal ini diyakini oleh masyarakat dan santri. Maka, tidak mengherankan jika KH. Maimoen Zubair dan KH. Cholil Bisri menjadi teladan bagi santri dan masyarakat, termasuk dalam hal politik.

Dalam dunia pendidikan, bahasa tindakan jauh lebih efektif *ketimbang* bahasa lisan. Di sini dikenal *lisanul hal afshahu minal lisanil maqal* (artinya, bahasa tindakan lebih efektif dari bahasa lisan). Hal ini menunjukkan bahwa keteladanan seorang pendidik jauh lebih penting daripada nasihat-nasihat yang diberikan tanpa contoh nyata.

Modeling juga yang dijadikan dasar santri dan sebagian masyarakat untuk mengikuti pemikiran dan sikap politik KH. Maimoen dan KH. Cholil sekarang ini. Sikap politik KH. Maimoen yang *istiqamah* di PPP dan KH. Cholil yang aktif di PKB dinilai sebagai bentuk kesungguhan dan keseriusan dalam memperjuangkan politik ulama NU.

Adapun mereka yang tidak mengikuti pilihan politik kedua tokoh ini menilai, sikap politik Kiai Maimoen tidak memperjuangkan masyarakat NU, sementara KH. Cholil dianggap *plin-plan*. Namun, bukan berarti perbedaan antara santri dan kiai ini dalam segala hal (secara total). Dalam masalah keilmuan maupun keberagamaan tetap mengikuti sang guru. Hanya dalam wilayah politik mereka merasa tidak ditemukan keteladanan, karena terjadi inkonsistensi.

Keteladanan dalam konteks pendidikan berarti mendidik dengan memberi contoh, baik berupa tingkah laku, sifat, cara berfikir, dan sebagainya. Kebutuhan terhadap keteladanan dalam pendidikan dipahami dari beberapa keterangan yang diberikan Abdurrahman Nahlawi (2006), bahwa sistem pendidikan memerlukan realisasi edukatif yang direpresentasikan oleh pendidik. Di samping itu, manusia secara fitrah senantiasa mencari figur teladan yang akan dijadikan pedoman dan panutan dalam hidupnya.

Ketiga, metode cerita. Metode ini digunakan untuk menceritakan sejarah maupun kronologi lahirnya partai, baik PPP maupun PKB. Cerita tentang keterlibatan Kiai Maimoen dan Kiai Cholil dan sejumlah ulama lain di Rembang dalam perjuangan kemerdekaan mampu melahirkan kesan yang mendalam bagi masyarakat maupun santri. Cerita seperti itu membangkitkan rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air. Metode cerita diakui oleh para motivator bisa membantu mereka menciptakan kesan yang bertahan lama. Cerita juga efektif untuk menanamkan nilai-nilai.

Keempat, metode nasehat. Metode ini digunakan untuk memberikan penekanan pada prinsip-prinsip dasar, seperti pentingnya politik, demokrasi, sikap konsisten (*istiqamah*) dalam politik, dan etika politik. Metode ini digunakan untuk menghadapi orang-orang yang *sowan* kepada kiai di saat mereka datang meminta nasehat.

Metode nasehat juga digunakan dalam pengajian atau pertemuan umum, mengingat metode nasehat adalah bagian dari varian metode ceramah, hanya saja ada penekanan-penekanan khusus. Sebagaimana diketahui, Mbah Moen dan Mbah Cholil sering didatangi masyarakat dan tokoh politik. Mereka biasanya meminta nasehat, atau restu politik.

Kelima, metode dialog atau tanya jawab. Metode ini digunakan dalam pertemuan organisasi atau dialog antara kiai secara individual dengan seseorang atau sejumlah tokoh (kiai kampung maupun pengurus partai) di rumah kiai. Metode ini biasanya untuk kalangan terbatas, sebagai jawaban kiai atas suatu masalah (*sharing* pendapat dalam masalah tertentu).

Meskipun demikian, dialog yang terjadi biasanya tidak berimbang. Artinya, kiai tetap mendominasi jalannya dialog. Metode dialog juga dilakukan untuk pengkaderan politik tingkat lanjut bagi pengurus maupun kader militan partai.

Metode-metode di atas digunakan para kiai ini dalam mendampingi masyarakat. Terbukti, cara ini berhasil meningkatkan pengetahuan politik masyarakat Rembang. Salah satu indikator keberhasilan peningkatan pengetahuan politik adalah tingginya partisipasi politik masyarakat Rembang, khususnya dalam setiap kali pemilihan umum.

Dalam konteks pendidikan politik, tentu tidak hanya terkait dengan pengetahuan politik masyarakat, akan tetapi juga menyangkut proses indoktrinasi politik. Hal ini penting, karena meskipun pengetahuan politik meningkat harus ada proses indoktrinasi yang akan memperkuat partisipasi politik, rekrutmen politik, loyalitas, dan semangat yang tinggi.

Indoktrinasi Sosio-Kultural

Posisi struktural di PPP Rembang dijalankan oleh KH. Maimoen Zubair dan beberapa putranya: KH. Ubab dan KH. Majid Kamil. Melalui Kiai Maimoen indoktrinasi politik

tetap berjalan dan kokoh. Ada beberapa doktrin politik yang ditanamkan kepada para kader militan dan simpatisan partai.

Pertama, dalam berpolitik harus memilih *mardhatillah* (politik untuk mencapai rida Allah dan menggunakan cara-cara yang diridhai Allah). Menurut Kiai Maimoen, politik ada tiga, yaitu politik *mardhatillah*, politik *madiyah* (sekuler), dan politik *suyuiyyah* (kotor). Doktrin ini secara umum disampaikan dan ditanamkan oleh KH. Maimoen Zubair. Sebagai tokoh PPP, sesepuh ini sering berujar bahwa PPP adalah partai yang menggunakan politik *mardhatillah*.

Kedua, jalur politik harus dilakukan untuk memperjuangkan Islam dan umat Islam. Sebagai tokoh yang beberapa kali menjadi anggota legislatif, KH. Maimoen Zubair menyadari bahwa aspirasi umat Islam akan terakomodir. Dalam sidang-sidang parlemen dia sering menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan cara ini para anggota parlemen sering tidak bisa membantah.

Islam bisa disuarakan di parlemen jika memang ada wakil-wakil yang kapabel di dalamnya. Karena itu, politik adalah bagian dari dakwah dan perjuangan Islam. Doktrin ini memberikan pencerahan bagi masyarakat akan pentingnya memberikan suara dalam pemilu dan memilih pemimpin atau wakil rakyat yang amanah. Sebagai masyarakat yang agamis, doktrin ini mampu menggerakkan masyarakat dalam sebuah pilihan politik.

Ketiga, berpolitik untuk tujuan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep ini didasarkan pada paham bahwa ulama—dan umat Islam—diwajibkan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Konsep ini dijalankan tidak hanya dalam aras kultural dalam kehidupan bermasyarakat, akan tetapi juga

dalam aras struktural di lingkungan pemerintahan. Untuk dapat melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* di pemerintahan harus menggunakan jalur politik agar bisa berjalan efektif.

Indoktrinasi politik juga dilakukan pesantren-pesantren Rembang melalui jalur struktural partai dan kultural. Di sini sering dijelaskan, PPP adalah partai orang Islam, sementara PKB adalah partai orang NU.

Proses indoktrinasi politik pada era reformasi ini cukup kuat tertanam dalam masyarakat Rembang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, dukungan dari para kiai baik PPP maupun PKB. *Kedua*, doktrin yang diusung seiring dengan nilai-nilai keislaman dan ajaran NU. *Ketiga*, masih kuatnya ikatan ideologi dan emosional. *Keempat*, euforian reformasi yang menginginkan perubahan terjawab dengan lahirnya partai-partai baru.

Pada perkembangannya, proses indoktrinasi politik yang dilakukan pesantren di Rembang mulai memudar. Hal ini seiring dengan berubahnya haluan politik masyarakat yang pragmatis. Masyarakat Rembang lebih memilih calon-calon yang memberi keuntungan materi, meskipun kalangan tradisional masih banyak yang patuh dan taat pada pilihan tokoh tertentu yang dianggapnya sebagai panutannya. Namun yang menentukan adalah uang. Siapa yang memberi uang, maka kepada dia suara akan diberikan. Kondisi ini semakin parah pasca meninggalnya KH. Cholil Bisri.

Sejak saat itu perolehan suara PKB di Rembang merosot tajam. Proses indoktrinasi sulit dilakukan, dan itu pun hanya terbatas pada struktur partai, kiai-kiai kampung dan sejumlah masyarakat.

Ada beberapa sebab doktrin kiai (sebagai ulama NU) tidak bisa ditanamkan secara kuat pada masyarakat.

Pertama, ikatan ideologi dan emosional masyarakat terhadap partai politik mulai luntur. Hal ini disebabkan penilaian masyarakat terhadap konsistensi ulama yang menjadi panutan mereka. Sehingga doktrin politik sudah tidak mampu mempengaruhi masyarakat.

Kedua, sikap pragmatisme yang tumbuh subur.

Ketiga, image negatif masyarakat tentang perubahan doktrin politik yang dinilai imbas kisruh di partai politik.

Keempat, doktrin-doktrin yang disampaikan dinilai mulai bernuansa propaganda.

Berbagai faktor di atas memicu terjadinya desakralisasi politik. Di samping faktor di atas, desakralisasi politik ini diakibatkan oleh keterbukaan informasi dan kekritisian masyarakat yang meningkat.

Jika ditelaah lebih mendalam, terjadinya desakralisasi politik di kalangan pesantren dan kaum tradisionalis nampaknya juga dipengaruhi oleh keputusan Muktamar Thariqah ke-9 tahun 2000 di Pekalongan. Dalam keputusan tersebut ada pemilahan antara *thariqah* dan politik. Keduanya tidak boleh digabungkan. Bahkan bagi murid *thariqah* tidak harus mengikuti pilihan politik kiai. Dan jika diindikasikan terjadi pemanfaatan *thariqah* untuk politik oleh kiai, maka murid tadi boleh berpindah ke kiai atau mursyid lain.

Keputusan ini didasarkan pada kitab *Al-Fatawa Al-Haditsiyah* yang berisi:

“...Apabila guru yang pertama tidak arif (tidak adil) maka murid boleh berpindah ke guru lain yang arif dan adil. Bahkan ia harus meninggalkan guru yang pertama

apabila guru yang pertama terbukti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam dan mengejar serta mengumpulkan harta untuk kepentingan dirinya melalui *thariqah*".

Keputusan dalam Mukhtamar Thariqah tersebut sebenarnya cukup strategis di tengah kehidupan multi partai, seperti sekarang ini. Namun bagi sejumlah kiai yang terlibat politik, keputusan tersebut seakan menjadi batu ujian bagi dirinya untuk menanamkan pengaruh pada murid-muridnya.

Pada konteks masa lalu, budaya dan sistem politik memang membolehkan adanya integrasi politik dan *thariqah*. Namun *illat* hukum berubah, mengingat banyak pilihan politik yang dinilai bisa memperjuangkan Islam. Terjadinya desakralisasi politik ini menyebabkan proses indoktrinasi politik tidak tertanam secara kuat.

BAB VIII

Melahirkan Masyarakat Santri yang Berdaya



Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru membuka jalan baru bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa ini, ada akhir cerita, ada permulaan dan ada perubahan. Di antara perubahan yang penting adalah memudarnya sistem patrimonialisme yang menjadi model kekuasaan Orde Baru. Pada masa-masa kekuasaan Orde Baru sistem ini ditransformasikan ke dalam tatanan masyarakat.

Masyarakat yang mempunyai pola kekuasaan hampir sama dengan sistem patrimonialisme adalah komunitas pesantren. Menariknya, justru sistem inilah yang menjadi modal terbesar dalam kekuasaan politik di Indonesia.

Sistem patrimonialisme di dalam masyarakat santri membuat sosok kiai (elite) mempunyai peran yang menentukan, sebagai agensi (perwakilan) negara dalam mengendalikan masyarakat. Di samping itu juga membantu peran-peran yang dijalankan aparatus negara dalam

menundukkan masyarakat.

Wilayah terpenting yang menjadi basis legitimasi bagi elit di dalam masyarakat santri adalah wacana keagamaan, subsistensi ekonomi dan mobilitas institusi. Elite santri bisa bertahan karena mendapatkan dua tipe dukungan, yaitu dukungan negara dan dukungan dari akar rumput (bawah), di mana elite menyediakan berbagai kebutuhan mendasar mereka.

Pada akhirnya, partisipasi, revitalisasi institusi dan kritisisme telah membentuk masyarakat di dalam lingkaran santri lebih mempunyai posisi tawar. Hubungan kelompok elite dan masyarakat bawah kemudian berjalan dengan lebih saling menguntungkan. Elite sendiri, meski tidak bisa dikatakan sama sekali tidak berdaya dalam menyalin legitimasi politiknya harus menetapkan strategi baru untuk memperbaiki komunikasi dengan konsep-konsep kesetaraan dengan akar rumput.

Dalam masyarakat santri, perubahan yang terjadi di tingkat mikro lebih banyak dipengaruhi oleh perubahan struktural yang terjadi di tingkat makro. Tetapi pergeseran dan bentuk perubahan tidak serta merta bisa disamakan dengan kondisi yang terjadi di tingkat makro. Pergeseran yang penting di tingkat mikro adalah bergesernya legitimasi politik elite. Pergeseran ini dipengaruhi oleh melemahnya dukungan negara terhadap elite politik yang berfungsi sebagai agensi negara dan bersama aparatus negara menguasai sumber daya umum dan mobilisasi sosial politik terhadap masyarakat akar rumput.

Keberadaan institusi (pesantren) juga penting untuk dicermati, karena fungsinya dalam mengantarkan legitimasi

elit mendapatkan berbagai macam keistimewaan dari negara dan juga dari masyarakatnya. Pesantren harus menyesuaikan diri dengan perubahan, karena para elite di dalamnya membangun jaringan baru dengan politisi dan parpol untuk mendapatkan dukungan material (kekuasaan—*editor*).

Basis legitimasi kultural saja tidak cukup untuk melakukan revitalisasi terhadap peran sosial politik kiai dan pesantrennya. Untuk itu membuat jaringan dengan parpol menjadi pilihan menarik dan tidak terlalu menimbulkan resiko ideologis. Harga yang harus dibayar juga tidak terlalu mahal dalam ukuran kesinambungan pengaruh mereka pada tingkat masyarakat.

Pergeseran struktural menghasilkan bentuk-bentuk baru dalam hubungan antara kiai sebagai (elite politik) dan masyarakat (akar rumput). Ini sama halnya dengan pergeseran struktural kiai berakibat pada terciptanya pola-pola baru di masyarakat. Kondisi ini diakibatkan lemahnya konsolidasi kiai (elite) untuk memantapkan bangunan strukturalnya.

Sampai di sini, ada beberapa kesimpulan yang penulis garisbawahi.

Pasca reformasi, dan dimulai pada tahun 1999, di Kabupaten Rembang terjadi pergeseran struktural politik kiai. Kondisi ini berimplikasi pada pergeseran pola-pola baru di tengah masyarakat dalam menentukan sikap atau pilihan politik. Pergeseran pola struktural politik kiai terjadi karena sikap kiai dalam menentukan pilihan partai politik. Jelasnya, ijtihad dalam berpolitik yang dilakukan sebagian kiai politikus membuat masyarakat bingung, dan akhirnya berbalik “menyerang” para elit mereka. Kondisi ini kemudian

menciptakan dinamika politik santri.

Pilihan politik kiai-kiai di Kabupaten Rembang telah menciptakan kesadaran berpolitik, baik di kalangan masyarakat secara umum atau masyarakat santri. Secara alamiah masyarakat memiliki sikap saling menghormati terhadap pilihan politik orang lain. Ini jelas akibat didikan sang kiai dalam melahirkan masyarakat yang *melek* politik dan dewasa dalam meredam potensi perpecahan akibat kompetisi yang *lumrah* di antara sesama pendukung partai politik.

Dengan demikian, kiai sebagai elite politik di lingkungan masyarakat dan santri mempunyai kontribusi yang besar dalam melahirkan masyarakat yang berdaya. Hal ini berangkat dari pemahaman yang berkembang di lingkungan pesantren bahwa warga negara memiliki tanggung jawab untuk *nashbul imamah* (mengangkat pemimpin), taat kepada *ulil amri*, berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman ini kemudian mendorong masyarakat pesantren untuk mau mengetahui urusan politik.

Implementasi dari prinsip ini adalah dengan meningkatkan pengetahuan politik kepada masyarakat dan santri melalui berbagai bentuk, majelis taklim, pengajian, proses belajar mengajar di pesantren, dan berjejaring dengan organisasi (baik ormas keagamaan maupun partai politik). Jika dipetakan, peningkatan pengetahuan politik bagi masyarakat yang dilakukan pesantren ada dua.

Pertama, pengetahuan politik secara umum yang terkait dengan kewajiban menaati pemimpin, berpartisipasi dalam politik, etika politik, demokratisasi, anti penjajahan, jihad, dan cinta tanah air.

Kedua, peningkatan pengetahuan politik partisipan dan pengkaderan untuk memobilisasi massa dalam memilih partai tertentu, atau calon. Upaya peningkatan pengetahuan politik yang dilakukan KH. Maimoen Zubair dan KH. Cholil Bisri, misalnya, mereka menggunakan metode-metode seperti ceramah, cerita, dan tanya jawab.

Dalam penelusuran penulis, kiai-kiai pesantren yang berpolitik berhasil menciptakan iklim perpolitikan yang santun di partainya. Ada beberapa sebab mengapa hal ini terjadi.

Pertama, para kiai mendudukan dirinya sebagai *solidarity maker* di hadapan para pendukungnya. Akibatnya, pendukung partai menaruh hormat kepada sosok kiai dan menuruti segala yang menjadi komando para kiai.

Kedua, faktor hubungan *client* antar sesama kiai. Ini merupakan faktor penting yang bisa digunakan sebagai alat untuk meredam konflik. Suasana damai bisa dilihat antara kiai (elite) partai di berbagai acara keluarga.

Ketiga, adanya karakter masyarakat yang dinamis progresif yang mempunyai sikap solider, saling menghormati perbedaan, serta mudah memaafkan satu sama lainnya.



BAB IX

Mencari Figur Politikus



Masyarakat pesantren tercipta dari ketekunan dan intensitas seorang kiai dalam mendampingi, mendidik dan merawat santri. Proses ini berlangsung terus menerus sampai pada kondisi klimaks. Di dalam struktur masyarakat jenis ini, posisi kiai begitu istimewa. Nasehat-nasehat seorang kiai akan menjadi semacam instruksi yang diikuti. Begitu pun dalam masalah pilihan politik, ketika mereka dihadapkan pada masa-masa pemilihan pemimpin, baik nasional maupun lokal.

Berdasarkan penelusuran penulis, tradisi dan sistem perpolitikan masyarakat santri terdiri dari tiga elemen utama, yaitu kiai (elite), santri (masyarakat: bisa murid atau masyarakat umum), dan pesantren (lembaga, institusi). Ketiga elemen ini saling berkait erat.

Ada dampak positif dari kondisi yang tercipta dalam struktur perpolitikan masyarakat santri, sebagaimana dijelaskan di atas.

Pertama, kiai sebagai elite masyarakat dan politik memiliki kesempatan dan kemudahan dalam mendesain iklim perpolitikan, baik di masyarakatnya maupun di tubuh partai yang dia pimpin.

Kedua, dalam kasus di Rembang, kiai-kiai ini sengaja membuat program-program, yang tanpa disadari para pengikutnya, bisa mencerahkan wacana sosial, kemasyarakatan, dan politik masyarakat setempat.

Ketiga, akibat dari dampak kedua, di Rembang lahir dan tercipta masyarakat yang a) memiliki kesadaran berpolitik; b) secara alamiah masyarakat ini memiliki sikap saling menghormati terhadap pilihan politik orang lain; c) masyarakat yang dewasa dalam meredam potensi perpecahan akibat kompetisi yang lumrah di antara sesama pendukung partai politik

Dalam pandangan penulis, lahirnya jenis masyarakat seperti ini tidak lepas dari kontribusi kiai sebagai elite politik di lingkungan masyarakat yang kemudian melahirkan masyarakat agamis yang berdaya.

Berikut ini penulis memilih dua figur kiai yang memiliki basis pengetahuan dan massa dari dunia pesantren. Kiai-kiai ini juga memiliki pandangan tentang pentingnya berpolitik sebagai wahana menyampaikan aspirasi masyarakat yang dia pimpin, sekaligus untuk mengimplementasikan wacana, ajaran dan prinsip-prinsip yang dimiliki kaum muslim-santri.

Penulis tidak menafikan keberadaan tokoh lain ketika tidak dibahas dalam buku ini.

KH. Maimoen Zubair: Teguh Pendirian, Setia Mendampingi Umat

KH. Maimoen Zubair lahir pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 1928. Beliau adalah putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah binti Ahmad Syuaib. Kiai Zubair sendiri merupakan sosok kiai yang disegani karena kesederhanaan dan sikapnya yang merakyat. Di sisi lain, Kiai Zubair adalah salah seorang murid terpilih Syaikh Sa'id Yaman serta Syaikh Hasan Yaman.¹

Selain alim dalam ilmu-ilmu keislaman, KH. Zubair Dahlan juga berkiprah di politik praktis. Satu saat beliau aktif di Partai Masyumi, tetapi ketika NU keluar dari Masyumi, bersama beberapa kiai lain Mbah Zubair kemudian berkiprah di Partai NU.

Pada pemilu pertama yang digelar pada tahun 1955, KH. Zubair masuk menjadi salah satu anggota DPR-D yang mewakili NU dari 9 kursi perolehan NU di Kabupaten Rembang. Bersama KH. Bisri Mustofa, KH. Abdul Wahab dan KH. Taman, Mbah Zubair menjadi penyumbang suara masyarakat Rembang yang cukup vokal. Pada waktu itu NU memperoleh 31,34 persen.

Di wilayah Kecamatan Sarang, daerah asalnya, sosok Kiai Zubair sangat berpengaruh. Dia dikenal sebagai kiai yang gigih memperjuangkan hak-hak rakyat lewat jalur politik (NU). Darah kiai-politikus sang ayah (KH. Zubair) ini yang kemudian mengalir pada Kiai Maimoen Zubair).

Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, dan secara resmi Dewan Konstituante

¹Sumber dari arsip Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang.

dibubarkan. Tahun 1960 kemudian dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang diangkat dan ditunjuk oleh presiden. Sedangkan di DPR-D kabupaten, anggota Dewan Gotong Royong ditunjuk dan diangkat oleh bupati setempat.

1) Masa-Masa Belajar

KH. Maimoen Zubair kecil mengawali masa belajarnya di Madrasah Ghozaliyah Syafi'iyah (MGS).² Pada tahun 1945 Kiai Maimoen muda melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Selama kurang lebih lima tahun beliau diasuh kiai-kiai Lirboyo, seperti KH. Abdul Karim (Mbah Manaf), KH. Mahrus Ali dan KH. Marzuqi.

Pada usia 21 tahun Kiai Maimoen ingin memperdalam pengetahuannya dengan melanjutkan studinya ke Kota Mekah. Selama kurang lebih dua tahun, lulusan Pesantren Lirboyo ini dibimbing para ulama terkemuka di Masjidil Haram, Mekah. Mereka antara lain, Sayid 'Alawi bin Abas al-Maliki, Syaikh Al-Imam Hasan al-Masyath, Sayid Amin Al-Quthbi, Syaikh Yasin bin Isa Padang, dan masih banyak lagi.

Pulang dari Kota Mekah tidak membuat santri Masjidil Haram ini puas. Dia kemudian memperkaya pengetahuan agama dengan belajar kepada ulama-ulama besar di tanah Jawa, seperti KH. Baidlowi Lasem (kelak menjadi mertuanya),

²Madrasah Ghozaliyyah Syafi'iyah merupakan lembaga pendidikan model sekolah keislaman yang berada di lingkungan pesantren-pesantren di Sarang. Madrasah ini diproyeksikan untuk menampung pendidikan para santri putra di luar sistem (jam pelajaran) pendidikan di pesantren masing-masing. Madrasah ini bertempat di Desa Karangmangu, Sarang, Rembang. Para santri yang belajar di pesantren-pesantren di Sarang hampir secara keseluruhan menempuh pendidikan di madrasah ini.

KH. Ma'shum Lasem, KH. Ali Ma'shum Yogyakarta, KH. Bisri Musthofa Rembang, KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Mushlih Mranggen, KH. Abas Cirebon, Syaikh Ihsan Kediri dan juga KH. Abul Fadhol Tuban.

2) Merintis Lembaga Pendidikan Keislaman

Pada tahun 1965 Kiai Maimoen muda dengan penuh semangat pulang kampung. Berbekal wawasan keagamaan yang dimiliki, beliau kemudian mengabdikan diri kepada masyarakat. Babak baru dalam perjalanan Kiai Maimoen kali ini ditandai dengan pendirian pondok pesantren yang berlokasi di depan kediamannya (saat ini).

Kini, pesantren yang diberi nama Al-Anwar itu dipenuhi ribuan santri yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini tidak lepas kebesaran sosok Kiai Maimoen Zubair, yang didengar hingga ke daerah di luar Pulau Jawa: mulai dari Madura, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan bahkan Papua. Pesantren Al-Anwar hari ini telah kokoh berdiri menjadi satu dari sekian pesantren yang ada di Karangmangu, Sarang, Rembang.³

Pada tahun 1977, Mbah Moen mengembangkan pesantren dengan mendirikan Pondok Pesantren Puteri Al-Anwar. Melihat kondisi masyarakat di sekitar yang pengetahuan (agama)-nya masih minim, Mbah Moen juga

³Pondok Pesantren Al-Anwar berada di Karangmangu, Sarang, Rembang. Berdiri pada tahun 1967, pada mulanya adalah kelompok pengajian yang dirintis oleh KH. Ahmad Syuaib dan KH. Zubair Dahlan. Sebelum bangunan pesantren berdiri, kelompok pengajian ini berlangsung di mushala. Pada perkembangan selanjutnya mushala tidak lagi muat menampung berjubelnya peserta pengajian. Maka dirintislah bangunan asrama dan aula pondok pesantren.

menyediakan waktu untuk mengajar masyarakat tetangga. Di belakang rumah dibangun mushala yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu.

Niat baik Kiai Maimoen ini disambut masyarakat. Mereka mulai suka pergi ke mushala untuk mengikuti berbagai kegiatan. Seperti shalat berjama'ah, *maulidan* pada tiap malam Jumat, dan pengajian keagamaan. Sampai akhirnya banyak dari kalangan anak-anak dan remaja yang menetap di mushala (*mondok; nyantri*).

Pada tahun 1995 Pesantren Al-Anwar melahirkan generasi baru. Dipercayakan kepada KH. M. Najih, salah satu putra Kiai Maimoen Zubair hasil didikan Sayid Muhammad Alawi di Kota Mekah, Pesantren Al-Anwar mendirikan semacam cabang pesantren dengan nama *Darussahihain*. Dilihat dari pemberian nama, pesantren ini ingin memberi pelajaran lebih kepada para santri terutama dalam disiplin hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak lama setelah itu (1996) juga dibangun asrama untuk para santri putri yang berminat mengkaji dan menghafal Al-Qur'an.

Pada periode selanjutnya, tahun 2008 Kiai Maimoen untuk ke sekian kalinya kembali mengibarkan sayap dengan mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar 2 di Dusun Kalipang, Gondanrejo, Sarang, Rembang. Kurang lebih 3 kilo meter dari desa Karangmangu ke arah barat. Untuk kepengasuhan pesantren ini diserahkan kepada Kiai Ubab, salah satu putranya.

Pada 15 September 2003 di bawah naungan LP. Ma'arif NU, Pesantren Al-Anwar mendirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Anwar. Tiga tahun kemudian, pada 21 September 2006, Madrasah Aliyah (MA) Al-Anwar juga berdiri. Yang

berbeda dari lembaga pendidikan ini dengan madrasah formal lainnya, sentuhan ilmu-ilmu keislaman klasik (*salaf*) sangat terasa. Inilah khas pemikiran Kiai Maimoen Zubair.

Pondok Pesantren Al-Anwar juga mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Anwar. Kian lengkap sudah lembaga pendidikan Islam yang dirintis KH. Maimoen Zubair.

Sebagai pengasuh pondok pesantren, Mbah Moen sudah melahirkan ratusan, bahkan ribuan santri. Sekian di antaranya sudah berhasil mengikuti jejak sang kiai dengan mendirikan pesantren dan memiliki santri.

Selain mengurus pesantren, Mbah Moen juga masih meluangkan waktu untuk aktif di organisasi. Beliau pernah menjadi anggota Syuriah PBNU pada periode 1984-1989, di bawah kepemimpinan Rais Am KH. Ahmad Siddiq (Jember). Lebih populer lagi, Kiai Maimoen Zubair adalah politikus senior dari kalangan kiai di Indonesia.

Walaupun begitu, Mbah Moen masih bersedia menjadi muara bagi keluh kesah masyarakat. Hampir setiap hari para tamu berdatangan. Mulai dari yang mau menyerahkan anak agar diterima menjadi santrinya, mau berkompetisi di pemilihan kepala daerah, sampai sekadar minta doa dan restu.

3) Memilih Politik Untuk Memantapkan Dakwah

Pada umur 25 tahun, Kiai Maimoen Zubair muda mengakhiri masa lajang. Sebagai kepala rumah tangga baru, beliau menjalani hari-hari layaknya orang banyak. Konon, pekerjaan yang beliau jalani saat itu adalah sebagai kepala pasar Sarang. Profesi ini beliau tekuni selama kurang lebih

10 tahun. Dalam perjalanan berikutnya, beliau juga menjadi anggota DPR-D Kabupaten Rembang selama kurang lebih 7 tahun.

Setelah masa tugas sebagai anggota DPR-D berakhir, beliau konsentrasi mengurus pesantren yang baru dirintis. Tetapi rupanya tenaga dan pikirannya sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga panggilan untuk *nyambi* menjadi politisi tidak bisa beliau tolak.

Karir politik KH. Maimoen Zubair diawali pada tahun 1966. Bersama kiai-kiai lain, seperti KH. Bisri Mustofa, KH. Moh. Basyuni, KH. Moh. Imam Musa, KH. Suyuti Cholil, dan KH. Fathur Rahman Basyuni, Mbah Maimoen ditunjuk sebagai wakil DPR-D Gotong Royong dari unsur NU.

Masuknya Kiai Maimoen membawa angin segar bagi NU. Mbah Moen dan KH. Moh. Imam Musa sama-sama berasal dan tinggal di wilayah Kecamatan Sarang. Pada Pemilu 1971, wilayah Sarang termasuk penyumbang suara terbesar untuk Partai NU. Di kecamatan ini NU memperoleh suara 11.049 atau sekitar 66,15 persen.⁴

Pada masa pemerintahan Orde Baru, ketika terjadi fusi tahun 1973 dengan tiga peserta pemilu: PPP, PDI dan Golkar. Maka saat itu kiai-kiai di Rembang yang berlatarbelakang NU bergabung dengan PPP. Mereka antara lain, KH. Cholil Bisri, KH. Hamid Baedlowi, Ahmad Thoyfoer, dan Fathur Rahman Basyuni. Perolehan PPP di kabupaten ini mencapai 35,39 persen dengan 70,646 suara. Ini terjadi pada Pemilu 1977.

Dengan mudah bisa dibaca bahwa perolehan suara PPP disumbang massa pendukung NU. Ini juga terlihat dari banyaknya kiai yang semula menjadi politisi di Partai NU

⁴Sumber data dari KPU-D Rembang.

kemudian menyeberang ke PPP. Saat itu PPP mendapat 11 kursi dan diduduki para politisi yang mayoritas berlatarbelakang NU. Kiai Maimoen Zubair adalah salah satu di antaranya.

Di daerah Sarang, tempat tinggal Kiai Maimoen, pada Pemilu 1977 PPP mengantongi suara 11.837 atau sekitar 66,07 persen. Meskipun ada campur tangan pemerintah untuk menggembosi PPP, namun ternyata perolehan di wilayah ini tetap unggul. Dalam penelusuran penulis, hal ini ternyata karena sikap masyarakat yang masih menganggap bahwa mengikuti pilihan politik para kiai adalah yang terbaik dan paling aman. Karena itu, peran KH. Maimoen Zubair saat itu sangat berpengaruh terhadap pilihan politik masyarakat Sarang.

Demikian juga pada masa pemerintahan Orde Baru, PPP tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Pada Pemilu 1982 ada semacam usaha dari pemerintah untuk melumpuhkan partai ini. Kiai-kiai banyak yang ditawarkan agar mau ikut bergabung ke Golkar. Beberapa kiai bahkan ada yang tak kuasa menolak “rayuan panas” ini. Tetapi, tidak demikian dengan kiai-kiai di wilayah Rembang. Kebanyakan dari mereka tetap gigih dan sungguh-sungguh berada di barisan depan partai Islam. Kiai-Kiai ini tidak goyah dan bahkan semakin mantap memperjuangkan PPP.

Pada Pemilu 1982 PPP tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam mempertahankan suara pendukungnya. Di Rembang partai Islam ini memperoleh 32,94 persen suara. Di Sarang, tempat tinggal Kiai Maimoen, perolehan PPP semakin meningkat, 66,56 persen.

Kondisi di atas berubah pada Pemilu 1987. Pada musim

pemilu ini Golkar berhasil mengambil suara pendukung PPP di Rembang. Dalam analisis penulis, hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang paling dekat adalah *khittah* NU tahun 1984. Keputusan ini menjadi awal dari merosotnya perolehan suara PPP. Masalahnya, banyak kiai yang pada waktu itu bersedia menjadi juru kampanye Golkar, dengan dalih *Khittah*. Meskipun, sebenarnya mudah dipahami bahwa kiai-kiai yang mau dipekerjakan di Golkar ini sebenarnya lebih dikarenakan kecewa terhadap pola kepemimpinan PPP di tingkat pusat, yang pada Pemilu 1987 gagal mengawal suara PPP dan hanya memperoleh 17,03 persen. Kiai-kiai ini kecewa karena hampir separuh suara PPP “disumbangkan” kepada saudara tuanya, Golkar.

Namun kiai-kiai yang masih setia mengawal PPP di daerah tidak bosan-bosan menjelaskan arti *Khittah* NU kepada masyarakat. Di sisi lain, kebencian masyarakat terhadap sikap para elite Golkar yang arogan dimanfaatkan dengan baik oleh para kiai untuk mendongkrak perolehan suara PPP pada Pemilu 1992. Upaya ini berbuah, pada pemilu ini perolehan suara PPP naik sekitar 15 persen. Kalau sebelumnya hanya 17,03 persen, naik menjadi 30,62 persen. Begitu seterusnya sampai Pemilu 1997 suara PPP mengalami perkembangan yang signifikan.

Ketika gerbang reformasi di Indonesia terbuka, partai-partai baru berdiri. PBNU sendiri mendirikan partai, PKB. Pada saat inilah para kiai NU mengisi daftar politisi di partai baru warga NU yang rata-rata mantan politisi senior di PPP. Ini terjadi di sekitar tahun 1998. Namun hal ini tidak berlaku bagi Kiai Maimoen Zubair. Pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang ini tetap melanjutkan perjalanan politiknya melalui

jalur PPP. Kali ini beliau bahkan memimpin Majelis Syari'ah di Pengurus Pusat PPP.

Perjalanan panjang Mbah Moen di PPP dimulai dari bawah. Kiai Maimoen bahkan pernah menjadi pengurus partai yang sempat gonta-ganti lambang ini dari tingkat desa (ranting). Kesabaran dan keseriusannya mengantarkan beliau pada posisi penting di tingkat pusat. Beliau juga pernah mengemban amanat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Pada Pemilu 1999 dengan diikuti 48 partai politik, PPP masih memperoleh suara yang signifikan. Padahal saat itu PBNU telah mendeklarasikan partai yang diproyeksikan untuk mewadahi aspirasi kaum *nahdliyin*. Dalam kondisi seperti inilah, keberadaan figur seperti Kiai Maimoen sangat berpengaruh dalam mempertahankan pesona partai. Terbukti, perolehan suara PPP tetap tinggi dan mengungguli PKB satu-satunya partai politik *nahdliyin*. PPP di Rembang pada Pemilu 1999 mendapatkan 22,40 persen, sementara PKB memperoleh 17,38 persen. Tanpa “dikunci” dengan keberadaan kiai, seperti Mbah Moen, massa pendukung PPP bisa dipastikan hilang diambil partai lain.

Perolehan suara PPP di pemilu demi pemilu dalam paragraf di atas menggambarkan besarnya pengaruh sosok Kiai Maimoen Zubair di masyarakat Rembang, bahkan di tingkat yang lebih luas.

4) Pandangan Politik KH. Maimoen Zubair

“*Istiqamah* dalam berpolitik,” demikian ungkapan yang sering terlontar dari sosok kiai yang sekaligus politisi senior, Mbah Maimoen Zubair. Menurut Kiai Maemon Zubair,

al-Istiqamah khairun min alfi karamah (artinya, istikamah itu mengungguli seribu kemuliaan—*editor*). Namun, mungkinkah dalam berpolitik bisa istikamah. Bukankah dalam politik praktis tidak mengenal istilah konsistensi. Bahkan yang ada justru inkonsistensi, atau apa pun demi mencapai target. Bila demikian, tentu kalimat di atas tidak memiliki dasar dari aspek keilmuan politik. Namun demikian kenyataannya, dalam menjawab pertanyaan terkait sikap politik, Mbah Moen selalu mengawali dengan kata “*istiqamah*”.⁵

Kepada penulis, Kiai Maimoen Zubair menuturkan bahwa sikapnya yang tetap bertahan di PPP pada masa-masa awal reformasi tidak lebih demi mengamankan suara warga *nahdliyin* yang masih banyak memilih PPP. Ada beberapa sebab, mengapa demikian yang terjadi.

Pertama, mayoritas warga *nahdliyin* belum mengetahui perkembangan terkini di dunia perpolitikan. Warga tradisional masih mempersoalkan simbol-simbol keagamaan, termasuk di partai politik. PPP sebagai partai berbasis agama lengkap dengan segala simbol-simbol di dalamnya adalah strategi yang efektif untuk mengakomodir suara warga *nahdliyin*, bukan dengan partai yang umum.

Kedua, PPP adalah partai besar. Dalam sejarahnya, warga NU ikut terlibat membesarkan partai ini. Jika semua tokoh NU henggang dari partai ini, maka akan diambil orang lain. Padahal sebagian besar kaum *nahdliyin* masih mengisi suara PPP.

Ketiga, kalau semua tokoh NU-PPP ikut-ikutan berpindah, maka bukan mustahil warna gerakan PPP berubah

⁵Wawancara dengan KH. Maimoen Zubair.

dan tidak lagi sebagai partai yang bercirikan NU. Di sisi lain, persinggungan tokoh NU di partai baru akan semakin keras. Eksistensi PPP akan bisa mengurangi potensi pergesekan di internal politisi NU.

Dalam pengamatan penulis, sikap yang diambil KH. Maimoen Zubair merupakan langkah taktis bagi NU, yang selalu mempunyai kepentingan secara politik. Inilah kecerdasan dan kejernihan sikap seorang politisi yang memiliki basis keilmuan pesantren. Tidak mudah gagap dan gampang terpesona dengan hal baru yang belum teruji. Dengan banyaknya kader yang tersebar di berbagai partai NU, akan menguntungkan kelompok NU sendiri.

Sikap dan pandangan KH. Maimoen Zubair dalam menghubungkan agama dan kepentingan di luarnya (kehidupan dan masyarakat) ini mengingatkan penulis kepada pemikiran Montgomery Watt. Menurut dia, agama mempunyai kedudukan sentral dalam kehidupan seseorang. Agama bisa memberikan tujuan umum dalam kehidupan dan membantu memusatkan energi dalam usaha menempuh tujuan.

Jika agama diyakini dan tidak sekadar dijadikan anutan, maka akan melahirkan beberapa dampak bagi seseorang. *Pertama*, pemikiran keagamaan akan membentuk kerangka intelektual di dalam segala kegiatan. *Kedua*, agama melahirkan paradigma yang selanjutnya menjadi tendensi sikap seseorang.⁶

Di luar itu semua, Islam sejak awal memiliki relevansi dengan kehidupan sosial-masyarakat. Islam yang disebutkan

⁶Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam*, terj. Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam (Jakarta: Beunubi Cipta, 1987), hlm. 34-35.

Al-Qur'an dan sunnah adalah Islam yang saling melengkapi dan utuh. Islam yang bermuatan rohani, akhlak, pemikiran, pendidikan, jihad, sosial, ekonomi, dan politik.⁷ Karena itu, politik dalam Islam berhubungan erat dengan agama.⁸

Dan bukankah sejarah pemikiran umat Islam telah menghasilkan konsepsi politik yang berbeda-beda, sesuai dengan latar belakang dan pendekatan yang dipergunakan. Di sana juga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak memerlukan sistem politik seperti yang dikenal umat Islam. Sebut saja Ali Abdul Raziq, yang menerangkan bahwa hakikat Islam adalah sebagai risalah ketuhanan dan agama, bukan politik atau negara.⁹

Di sisi lain, Islam sebagai sistem nilai mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, dan dengan alam raya. Al-Qur'an juga menasehatkan, agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya.¹⁰

⁷Yusuf al-Qordhowi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997), hlm. 36.

⁸Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, terj. A. Rahman Dahlan dan A. Qorib (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 33.

⁹Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Mesir: Syarikat Musahanat Mishriyat, 1952), hlm. 36.

¹⁰Cermati surah al-Baqarah (2): 208.

KH. Cholil Bisri: Tegas dalam Sikap, Jeli Membaca Situasi

KH. Mohammad Cholil Bisri lahir di Rembang pada tanggal 12 Agustus 1942. Lahir di pesantren, dibesarkan di lingkungan pesantren, dan menghabiskan lebih dari separuh usianya di pesantren. Menikah dengan Nyai Muchsinah, menurunkan delapan putra dan putri.

Beberapa model dan sistem pendidikan pernah dirasakan Mbah Cholil ketika berusia masih muda. Dari yang paling klasik hingga yang modern. Dari yang berbasis ilmu agama hingga ilmu pengetahuan umum. Di sekolah umum Kiai Cholil mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat (1954), Madrasah Ibtidaiyah (1954), Sekolah Menengah Pertama Taman Siswa (1956), hingga di Perguruan Islam (1956).

Dalam ilmu keagamaan, penggemar olah raga sepak bola ini merasakan pendidikan di Pondok Pesantren Lirboyo (1957), Pesantren Al-Munawir Krapyak (1960) bahkan sampai di Aliyah Darul Ulum Mekah (1962). Tidak hanya bersemangat belajar ilmu pengetahuan, Kiai Cholil muda sudah gemar berorganisasi. Selain pernah menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) juga sempat menduduki pucuk pimpinan Gerakan Pemuda Anshor.

Hingga akhir hidupnya, Mbah Cholil (panggilan akrab KH. Cholil Bisri) adalah pengasuh Pondok Pesantren Raudlotut Tholibin di Desa Leteh, Kota Rembang. Pondok pesantren ini didirikan sang ayah, KH. Bisri Mustofa pada tahun 1945. Pada masa pendudukan Jepang, pesantren ini dikenal dengan sebutan Pesantren Rembang. Konon, waktu itu berlokasi di jalan Mulyo nomor 03 di Kota Rembang.

Seiring dengan perkembangan waktu dan jumlah santri, pesantren ini diperluas. Untuk perluasan lahan memanfaatkan tanah warisan dari sang kakek, KH. Zaenal Mustofa.¹¹

Sepeninggal KH. Bisri Mustofa pada tahun 1977, proses pengajaran di pesantren diambil alih putra-putranya, yaitu KH. Cholil Bisri, KH. Adib Bisri, dan KH. Mustofa Bisri. Pengajian dilakukan secara bergantian. Pelajaran *Alfiyah* (tata bahasa Arab) dan satu judul kitab fikih yang dilaksanakan setelah shalat magrib diampu oleh Kiai Cholil Bisri. Peserta pengajian ini adalah para santri senior. Kiai Adib Bisri memberi pelajaran kitab untuk para santri pemula (junior). Sedangkan Kiai Mustofa Bisri mengaji *Tafsir Jalalain* sehabis shalat shubuh dan diikuti semua santri.

Pada pagi hari (waktu *dhuha*) Kiai Cholil mengaji *Syarah Fathul Mu'in* dan *Jam'ul Jawami'*. Khusus hari Selasa di pesantren ini juga dibacakan kitab *Ihya' Ulumuddin* dan *Tafsir Al-Ibriz*.

Saat ini, Pesantren Roudlotut Tholibin dipenuhi para santri yang berasal dari berbagai daerah. Ribuan santri telah dicetak pesantren ini. Sepeninggal KH. Cholil Bisri dan adiknya, KH. Adib Bisri, pengasuhan pesantren dilaksanakan oleh KH. Mustofa Bisri dan KH. Yahya Cholil Staquf (putra KH. Cholil Bisri).

Selama kurang lebih 10 tahun terakhir sebelum wafat, nama KH. Cholil Bisri dikenal masyarakat luas hingga di tingkat nasional. Bagi banyak orang, namanya disebut beriringan dengan nama Kota Rembang—Kiai Cholil Bisri Rembang. Di kalangan masyarakat santri di Pantura Jawa

¹¹Data arsip Pesantren Raudlatut Talibin Leteh, Rembang.

Tengah dan Jawa Timur, Mbah Cholil adalah orator yang digemari. Di tingkat nasional, dikenal sebagai politisi ulung.

Di dunia pesantren, kiprahnya tidak diragukan lagi. Beliau juga terkenal sebagai tokoh NU kharismatik yang berpenampilan sangat sederhana. Gayanya yang *blak-blakan* dan bersahaja mengundang simpati masyarakat.

Selain mengasuh pesantren, Mbah Cholil adalah penulis artikel lepas di berbagai media. Gagasan dan ide segarnya dengan mudah dijumpai di koran dan majalah. Tidak jarang, tulisan kiai ini mengkritisi kebijakan penguasa. Wajar jika Kiai Cholil kemudian terkenal berani melawan arus, dan konsisten memperjuangkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Banyak kalangan yang simpati, bahkan fanatik terhadap pikiran-pikiran Kiai Cholil, yang berani dan tanpa *tedeng aling-aling*—khas karakter masyarakat pesisir. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Cholil, misalnya, menyindir keberadaan PPP pada masa Orde Baru. Sikapnya yang kritis tidak jarang mendapat reaksi dari para politisi lain yang tidak sejalan. Intimidasi, rekayasa bahkan pada masa akhir pemerintahan Orde Baru, 1997, ada upaya untuk menyingkirkan keberadaannya dari PPP. Puncaknya, Kiai Cholil diletakkan di nomor sepatu dalam penyusunan nomor urut calon legislatif.

Ketika reformasi bergulir, bersama para kiai NU lain menggagas pendirian PKB. Harapannya, aspirasi warga NU akan lebih terwadahi. Ungkapan yang sering dilontarkan pada masa Orde Baru adalah, *“NU itu hanya disuruh mendorong mobil mogok. Kalau mobil sudah berjalan akan ditinggalkan.”* Kalimat inilah yang menginspirasi bahwa NU sudah waktunya mendirikan partai sendiri.

1) Kiprah KH. Cholil Bisri di Panggung Politik

Kiai Cholil menyalurkan cita-cita sosial politiknya melalui sejumlah partai, dari tiga zaman yang berbeda. *Pertama*, ketika menjadi ketua Partai NU pada masa Orde Lama. *Kedua*, sebagai ketua DPC PPP Rembang dan ketua MPW PPP Jawa Tengah pada masa Orde Baru. *Ketiga*, wakil ketua Dewan Syuro PKB pada masa reformasi.¹²

Karir politiknya diawali ketika dia terpilih sebagai anggota DPR-D Rembang pada Pemilu 1977 dari PPP. Saat itu warga NU memberikan hak suaranya kepada PPP sebagai representasi partai politik yang mewakili kelompok Islam. Kiai NU banyak yang masuk PPP, salah satunya adalah Kiai Cholil Bisri.

Menjelang Pemilu 1982 Kiai Cholil semakin getol bersosialisasi dengan masyarakat Rembang. Berbagai cara dilakukan untuk membesarkan PPP, baik secara individual maupun institusional. Kiai Cholil rajin menghadiri acara-acara yang diselenggarakan masyarakat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Di acara-acara seperti itu, terkadang diselingi penyampaian materi politik, untuk membekali masyarakat dengan wacana bahwa partai yang beliau ikuti adalah partai yang bisa menampung aspirasi umat Islam, lebih-lebih warga NU. Saat itu, secara terang-terangan Mbah Cholil menjelaskan bahwa PPP harus didorong menjadi partai non-pemerintah yang bisa mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyimpang dari aspirasi rakyat.¹³

Meskipun pada Pemilu 1987 perolehan suara PPP turun, karena diduga ada intervensi pemerintah, semangat

¹²KH. Cholil Bisri, *Menuju Ketenangan Batin* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 235-236.

¹³Wawancara dengan KH. Yahya Staquf, putra KH. Cholil Bisri.

Kiai Cholil tidak surut. Beliau terus bekerja membesarkan partai tempat beliau menyuarkan kebutuhan umat. Kegigihan Kiai Cholil menjadikan dirinya semakin dikagumi para pendukungnya, terutama di Jawa Tengah. Pada kepengurusan selanjutnya kakak kandung KH. Mustofa Bisri atau Gus Mus ini diamanati sebagai ketua MPW PPP Jawa Tengah, dan kelak mengantarkan sebagai anggota DPR-RI pada pemilu 1992.

Pada Pemilu 1997 konstelasi politik PPP mengalami pergeseran. Para politisi NU di partai ini ditempatkan pada urutan bawah dalam daftar calon legislatif (caleg)—ditempatkan di *nomor sepatu*. Tindakan ini dikritik para kiai, NU hanya dihitung sebagai “pendorong kendaraan mogok.”

Puncaknya, pada masa reformasi tahun 1998, Presiden B. J. Habibie dengan berpegang pada TAP MPR Nomor X/MPR/1998 mempercepat pelaksanaan pemilu. Sejak itu, kiai-kiai yang semula aktif di PPP menyeberang ke partai yang didirikan PBNU, PKB. Kiai Cholil yang sebelumnya sudah merasa tidak nyaman di PPP juga pindah ke partai ini. Di partai baru ini beliau dipilih sebagai salah satu wakil ketua Dewan Syuro.

Pemilu 1999 mengantarkan dirinya menjadi anggota MPR. Ketika Presiden Gus Dur dipaksa lengser melalui Sidang Istimewa MPR-RI, beliau menjabat wakil ketua MPR-RI menggantikan Matori Abdul Jalil yang ditunjuk sebagai menteri oleh Presiden Megawati. Posisi baru ini disandang Kiai Cholil Bisri sampai tahun 2004. Tetapi sejak tahun ini pula Kiai Cholil mulai sakit-sakitan. Pada tanggal 22 Agustus 2004 Kiai Cholil wafat, dan dimakamkan di kota kelahirannya, Rembang.

2) Basis Politik KH. Cholil Bisri

Di kalangan politisi, KH. Cholil Bisri dikenal sebagai kiai yang berani mengkritik kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Pendapatnya disampaikan melalui tulisan di media massa, forum diskusi dan pengajian. Sikap kritisnya ini menjadikan dirinya mendapat tantangan, baik dari internal partai maupun dari luar partai. Sikapnya yang berani dan adanya ini menjadikan dirinya semakin dikagumi masyarakat.

Di atas podium, Kiai Cholil dikenal piawai dalam mengelola kalimat-kalimat yang menghipnotis *audient*. Tidak hanya alim dalam ilmu agama, tetapi juga menguasai dengan baik bidang politik dan pemerintahan. Ini tidak aneh, karena sejak lama kiai ini sudah bergelut dengan dunia politik. Ayahnya, KH. Bisri Mustofa, tadinya juga seorang kiai yang terjun di dunia politik praktis. Mungkin darah kiai-politikus sang ayah yang kemudian mengalir kepada dirinya.

Bersama KH. Abdurrahman Wahid, Mbah Cholil mendeklarasikan PKB di masa reformasi. Menurutnya, PPP tidak lagi sebagai rumah orang NU. Di PPP, orang NU sebenarnya hanya *ngontrak*. Sewaktu-waktu orang NU harus siap dan rela meninggalkan dan membuat rumah sendiri.

Bertempat di Pondok Pesantren Raudlatul Tholibien Leteh, Rembang, Kiai Cholil sebagai ketua lajnah sebelas merumuskan pendirian partai. Dari berbagai usulan ke PBNU, yang dianggap mampu merumuskan pendirian partai adalah dari tim sebelas Rembang. PBNU akhirnya menyetujui pendirian PKB. Bersama Matori Abdul Djalil, Kiai Cholil berada di garda paling depan kepengurusan DPP PKB, sebagai wakil ketua dewan Syuro. Matori Abdul Djalil ditunjuk sebagai ketua tanfidziyah DPP PKB.

Banyak pihak yang menilai, lahirnya PKB hanya akan mengurangi perolehan suara PPP. Tetapi anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Karena banyak pula perolehan suara PKB yang bukan berasal dari PPP, tetapi diperoleh dari warga NU yang pada masa Orde Baru mendukung Golkar. Tetapi, memang secara keseluruhan suara PPP banyak berpindah ke PKB. Jumlah ini hampir mencapai 40 persen. Di Kabupaten Rembang, PPP yang semula mendapat 35 persen menurun menjadi 22 persen. Ini artinya ada 13 persen suara PPP yang diambil oleh PKB. Sisanya, 4 persen disokong dari para pendukung partai Golkar. Jumlah total perolehan suara PKB di Rembang sebanyak 17 persen.

Pada Pemilu 1999 KH. Cholil Bisri menjadi caleg PKB di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Meskipun begitu, beliau juga mengikuti kegiatan kampanye PKB di Rembang. Karena itu, sosok dan ketokohnya tetap ikut menentukan perolehan suara PKB di Kabupaten Rembang. Terbukti, di beberapa daerah di Rembang, seperti Rembang kota, Kaliwatu, dan Sulang, suara PKB unggul. Ini karena daerah-daerah tersebut merupakan basis para alumni Pesantren Roudlotul Tholibin, asuhan Kiai Cholil Bisri.

3) Pandangan Politik KH. Cholil Bisri

Dalam pandangan KH. Cholil Bisri, berpolitik tidak semata-mata mencari kekuasaan tetapi lebih dari itu merupakan upaya menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Sebagai figur yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi, mau tidak mau beliau harus bertanggungjawab terhadap semua sikap politiknya. Kondisi berdampak kepada munculnya pihak-pihak yang tidak senang kepadanya.

Ditambah lagi, di dalam PPP mulai ada fiksi-fiksi antara kelompok NU dan MI.

Sejak PPP dipimpin oleh Djohan Naro tahun 1978 mulai muncul benih-benih ketidakcocokan. Naro sendiri berasal dari kelompok MI (dulu Parmusi), yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok modernis. Sementara bagi kalangan tradisionalis, kepemimpinan Naro telah menyingkirkan kader-kader NU di PPP. Perlahan-lahan banyak tokoh NU yang dipinggirkan. Ini terlihat dalam penyusunan caleg pada Pemilu 1982. Tepatnya pada tanggal 27 Oktober 1981 ada 29 caleg dari kalangan NU yang ditempatkan di nomor urut mati (paling bawah).¹⁴

Bersamaan dengan itu, di NU juga terjadi penolakan terhadap kepemimpinan NU yang dipegang oleh orang-orang yang berpolitik. Salah satunya adalah KH. Idham Cholid. Selain sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU, Kiai Idham adalah pengurus PPP. Konflik ini melahirkan dua kubu, yang dikenal dengan kelompok Cipete dan kelompok Situbondo. Para kiai NU melihat, Kiai Idham Cholid tidak mampu membawa aspirasi NU di PPP. Perselisihan itu terus berlangsung hingga Muktamar NU digelar pada tahun 1984. Muktamar ini berhasil mengangkat kelompok intelektual muda NU progresif, yaitu KH. Abdurrahman Wahid dan KH. Fahmi Saefudin.

Konflik yang terjadi di tubuh NU berdampak pada kader NU di PPP, baik di tingkat nasional maupun di daerah. KH. Cholil Bisri termasuk di antaranya. Pada muktamar di Jakarta tahun 1994, sebagai tokoh NU beliau menjagokan Matori Abdul Djali untuk memimpin PPP. Mathori dinilai

¹⁴Andree Feilard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 201.

mampu mewakili kelompok *nahdliyin*. Tetapi keinginan kalangan *nahdliyin* tidak membuahkan hasil. Matori gagal mengalahkan Ismail Hasan Materium, dan tidak mungkin memimpin PPP.

Dalam pandangan Kiai Cholil, perjuangan lewat partai politik tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, lahir batin. Masyarakat yang menghormati nilai-nilai kemerdekaan hakiki dan demokratis. Politik juga bisa menjadi wahana untuk mendidik kedewasaan masyarakat dalam mencapai kemaslahatan bersama.

Selain itu, berpolitik harus didorong oleh semangat menjamin terpeliharanya hak-hak asasi manusia. *Pertama*, terpeliharanya agama dan keyakinan keislaman serta larangan pemaksaan agama. *Kedua*, terpeliharanya perkembangan jiwa dan akal pikiran dari setiap bentuk perusakan dan penodaan. *Ketiga*, terpeliharanya masa depan yang prospektif bagi generasi penerus. *Keempat*, terpeliharanya kepemilikan harta benda yang sah.

Yang juga penting, berpolitik harus mampu menjamin terbentuknya jati diri dan kepribadian manusia, sebagai umat pilihan yang memiliki sifat-sifat mulia: jujur dan benar, dapat dipercaya dan tepat janji, melaksanakan kewajiban dan menerima hak secara proporsional, serta tolong menolong antara sesama.



EPILOG

Politik Kiai, Kemaslahatan Umat, dan Juru Damai

Oleh: **Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, MA**

Rais Syuriah PBNU,

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Sarang Rembang



Sejarah politik di Indonesia telah mencatat bahwa politik bagi para kiai bukan semata-mata persoalan duniawi, tapi sebagai bagian dari motivasi yang bersifat ukhrawi. Kiai sebagai warga negara merasa memiliki dua tanggung jawab sekaligus, yakni tanggung jawab kepada masyarakat atau jamaahnya, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negaranya.

Pertama, tanggung jawab kepada masyarakat diwujudkan melalui pelayanan dan pengabdian yang tulus kepadanya baik dalam persoalan agama, yakni mendidik dan mengajarkan agama kepadanya, maupun dalam urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik. Kiai memiliki banyak pengikut yang terdiri dari para santri dan masyarakat. Di sini kiai melihat kerumunan massa yang begitu banyak itu bukan sebagai aset yang dapat ditukar dengan kepentingan pribadinya, melainkan sebagai beban tanggung jawab yang harus dipikirkan kehidupannya supaya mencapai

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karenanya, kiai-kiai zaman dahulu rela menghabiskan semua waktu, pikiran, dan tenaganya hanya untuk umat.

Kedua, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Dalam sejarah kemerdekaan bangsa ini para kiai telah berjihad dengan mencurahkan segenap tenaga, pikiran, materi, dan waktunya demi membebaskan bangsa ini dari penjajahan. Resolusi Jihad yang digelorakan oleh Hadlratussyaiikh KH. Hasyim Asy'ari dan para kiai lain merupakan salah satu bukti nyata bagaimana para kiai sebagai anak bangsa merasa bertanggung jawab akan nasib bangsa ini yang harus segera terbebas dari segala bentuk penjajahan. Para kiai rela untuk mengorbankan nyawanya demi bangsa dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi para kiai yang turut serta mendirikan bangsa ini adalah ikhtiyar untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua anak bangsa yang harus terus dirawat dan dijaga.

Setelah bangsa ini merdeka perjuangan kiai dalam perpolitikan nasional tidak berhenti, karena politik bagi para kiai adalah alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua anak bangsa. Kendati sebagian kiai masuk dalam partai tertentu, dan sebagian yang lain memilih partai yang berbeda, tapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai ikhtiyar untuk merawat dan menjaga negara ini sebagaimana diamanatkan para muassisnya, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan bersama.

Dinamika partai kerap membawa perpecahan, bahkan konflik berdarah di akar rumput, hingga seakan-akan partai adalah tujuan itu sendiri, bukan wadah ijtihad untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yakni kemaslahatan bersama (*li*

mashalihil 'ibad). Karenanya para kiai merasa harus terlibat ke dalam semua partai sesuai dengan ijtihadnya masing-masing dengan tujuan selain untuk membawa partai ke arah yang sesungguhnya, juga untuk menjadi penengah atau juru damai di dalam konflik-konflik yang terjadi di masyarakat (*ishlah bainan nass*).

Buku yang ditulis oleh saudara Rofiq Mahfudz, salah satu kader terbaik NU Jawa Tengah, berhasil memotret langkah dan pilihan politik beberapa kiai yang terlibat di dalam partai yang berbeda-beda, seperti *Allahu Yarham* KH. Maemoen Zubair yang bergabung di PPP dan *Allahu Yarham* KH. Cholil Bisri yang sebelumnya menjadi bagian dari PPP kemudian mendirikan partai baru, PKB, bersama sejumlah kiai lainnya. Kedua kiai ini meski berbeda partai, tapi tetap menjalin persaudaraan yang kuat dan memiliki tujuan yang sama, yaitu menjadikan partai sebagai alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat secara luas. Perbedaan politik di antara keduanya bukan perbedaan yang berujung pada perpecahan, tapi perbedaan dalam menempuh jalan yang berbeda untuk satu tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga persaudaraan keumatan, menanamkan kemandirian, dan mewujudkan kemaslahatan bagi bangsa Indonesia.

Akhirnya, saya sampaikan selamat kepada saudara Rofiq Mahfudz atas terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi khalayak luas, dan memberikan inspirasi serta teladan bagi banyak orang bahwa perbedaan pilihan politik bukan sebagai alasan untuk bertengkar, tapi upaya menempuh jalan yang berbeda demi tujuan yang sama, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi semua (*li mashalihil 'ibad*).

Rembang, 16 April 2023



DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qur'an Karim.

Abdul Azis, *Politik, Islam Politik: Pergulatan Ideologi PPP Menjadi Partai Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

Abdul Mu'im, *Al-Tuhfatul Mulukiyah fi al-Adabi al-Syiasah: Muassasah Syabab Al-Jamiah*, 1993.

Abdul Munir Mulkhan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: Sipress, 1994.

Abdur Rojak, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim Kembar di Madura*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.

Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam* (terj. A. Rahman Dahlan dan A. Qorib), Jakarta: Logos, 1996.

Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ahmad Hakim Jayli dan Muhammad Tohadi, *PKB dan Pemilu 2004*, Jakarta: Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, 2004.

Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Mesir: Syarikat Musahanat Mishriyat, 1952.

Ali Romdhoni (editor), *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis dan NU*, Cirebon: The Fahmina Institute, 2008.

Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* (terj. Lesmana), Yogyakarta: LKiS, 1999.

- Arskal Salim, *Partai Islam dan Relasi Agama-Negara*, Jakarta: YPPR-Puslit IAIN Jakarta, 1999.
- B. J. Boland, *The Struggle for Islam in Modern Indonesia*, 1971.
- Carless F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992.
- Cholil Bisri, *Menuju Ketenangan Batin*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan, 2000.
- Fred. R. Von Der Medhen, *Politik Negara-Negara Berkembang* (terj. Simamora), Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 1987.
- Horward Williams, *Kants Political Philosophy* (terj. Muhammad Hardani), Surabaya: JP. Press, 2003.
- J .H. Rapar, *Flisafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machievelli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- J. M. Van der Kroef, *The Communist Party of Indonesia*, 1965.
- James R. Rush, *Opium to Java: Jawa dalam Cengkeraman Bandar-bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000.
- Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Intepretasi Untuk Aksi*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1991.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2005.
- M. A. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.

- M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern Tahun 1200-2008*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- M. Lutfi Thomafi, *The Authorized Biography of KH. Ma'sum Ahmad*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
- Martin Van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Surabaya: Pustaka Prometheus, 2000.
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Mohtar Mas'uoed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (terj, Hamid Fahmi Zarkasyi dan Taufiq Ibnu Syam), Jakarta: Beunubi Cipta, 1987.
- Mudjahirin Thohir, *Kekerasan Sosial di Pesisir Utara Jawa: Kajian Berdasarkan Paradigma Kualitatif*, Semarang: Lengkong Press Cilik, 2005.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: 2004.
- Ridin Sofwan dkk, *Islamisasi di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sarbini, *Islam di Tepian Revolusi: Ideologi Pemikiran dan Gerakan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Simuh, *Interaksi Islam dan Budaya Jawa: Merumuskan Kembali Interelasi Islam-Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.

- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Yusuf al-Qordhowi, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah* (terj. Kathur Suhardi), Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997.
- Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1990.
- Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Zainudin Maliki, *Agama Priyayi*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Zamachsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.

Artikel

- Ahsin Sakho Muhammad, Makalah, "Sikap Moderat Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Masalah Teologi dan Politik" (Makalah disampaikan pada acara lokakarya *Pengembangan Jaringan dan Kerjasama Pondok Pesantren se-Provinsi Lampung*, tanggal 14-15 Juli 2009).
- Arsip Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang
- Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal" (Makalah disampaikan dalam Focus Groups Discussion *Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo*, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation di Yogyakarta tanggal 3 Agustus 2006).

Ismawati, *Melacak Cikal Bakal Pesantren Jawa* (Makalah tidak dipublikasikan), Semarang, 2004.

Jurnal Media Inovasi, No. 1. Th. XII/2002.

R. Agung Pambudi, *Kiai dan Kekuasaan: Studi Peran dan Strategi Politik Kiai di Kabupaten Kebumen* (tesis), Yogyakarta: PLOD UGM, 2004.

Suara Merdeka, "Tajuk Rencana", Kamis, 19 Agustus 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Republik Indonesia tentang Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dokumen

Arsip pondok pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang.

Arsip pondok pesantren Raudlatut Talibin Leteh, Rembang.

BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2007.

Data Pendidikan dan Keagamaan (Pekapontren) Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Jawa Tengah tahun 2008/2009.

Data Statistik Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia.

Data Statistik KPU-D Rembang.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Azis. Pengurus GP. Ansor Rembang. Tinggal di Sarang, Rembang.

Wawancara dengan Adhim. Tokoh muda NU. Politisi Partai Bulan Bintang. Tinggal di Sulang Rembang.

Wawancara dengan H. Soelehan. Santri Kiai Imam Syueb Sarang. Tinggal di Sarang, Rembang.

Wawancara dengan Huda. Tokoh NU Lasem. Tinggal di Rembang.

Wawancara dengan KH. Fathur Rahman Aly. Pengasuh pesantren Al-Amin Sarang. Tinggal di Sarang, Rembang.

Wawancara dengan KH. Maimoen Zubair. Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan. Pengasuh pesantren Al-Anwar Sarang. Tinggal di Sarang, Rembang.

Wawancara dengan Nasirul Mahasin. Wakil Bupati Rembang periode 2000-2005. Tinggal di Rembang.

Wawancara dengan KH. Yahya Staqf. Putra KH. Cholil Bisri Rembang. Tinggal di Rembang.

Lampiran-Lampiran



Lampiran I

Kutipan naskah deklarasi PPP

DEKLARASI PPP

Keempat Partai Islam: NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI yang sampai sekarang ini tergabung dalam bentuk konfederasi kelompok Partai Persatuan Pembangunan, dalam Rapat Presidium Badan Pekerja dan Pimpinan Fraksi tanggal 5 Januari 1973, telah seia sekata untuk memfusikan politiknya dalam satu partai politik bernama Partai Persatuan Pembangunan.

Segala kegiatan yang bukan kegiatan politik, tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala, bahkan lebih ditingkatkan sesuai dengan partisipasi kita dalam pembangunan spirituil/materiil.

Untuk merealisasikan kesepakatan ini telah dibentuk team untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan oleh Partai Persatuan Pembangunan, baik organisatoris maupun politis.

Kemudian hasil dari pekerjaan team dilaporkan Presidium untuk selanjutnya disampaikan kepada dan disahkan oleh suatu musyawarah yang lebih representatif yang Insya Allah akan diadakan selambat-lambatnya awal Februari 1973.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiq dan hidayah-Nya. Amin.

Jakarta, 5 Januari 1973

PRESIDIUM KELOMPOK PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

Ttd,

KH. Dr. Idham Khalid

HMS. Mintaredja

H. Anwar Tjokroaminoto

Rusli Halil

KH. Masykur

Sumber: <http://www.ppp.or.id>



Lampiran II

Kutipan cita-cita dan prinsip perjuangan PPP

CITA-CITA DAN VISI PPP

Cita-cita Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah merealisasikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berupa: “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.”

Untuk itu, maka PPP merumuskan visi tentang kehidupan beragama, kehidupan berpolitik, kehidupan berekonomi, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani, moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh manusia. Menyadari bahwa di Indonesia terdapat berbagai agama, PPP memperjuangkan terjaminnya “kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu,” seperti tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945. Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam lakum diinukum waliyadain (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antar umat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi

dengan nilai-nilai akhlaq al karimah (akhlaq mulia). PPP berkewajiban merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain.

Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin UUD 1945 perlu dihargai dan dilindungi, termasuk penyaluran aspirasi politiknya. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan atas dasar negara hukum (rechstaat) dan bukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas “demokrasi ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang

berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan dan kesempatan yang adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian. Harus dicegah timbulnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini, lembaga-lembaga ekonomi, keuangan, dan perbankan serta pranata-pranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya.

Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secara ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infaq, dan sadaqah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuhkembangkannya budaya saling harga menghargai dan saling sayang menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwwah), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai rahmat. Dengan menyadari adanya perbedaan-perbedaan sejalan dengan sunnatullah, PPP mengakui adanya persamaan

hak dan kewajiban yang seimbang antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, dan menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ini. PPP berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, berkualitas tinggi, yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

PRINSIP PERJUANGAN

Untuk menggapai cita-sita dan visi di atas, PPP merumuskan prinsip perjuangan partai yang membingkai seluruh aktivitas partai, kader, dan simpatisannya. Prinsip perjuangan itu adalah:

1) Prinsip Ibadah

PPP dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wata'ala. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran Partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah.

2) Prinsip Istiqamah

PPP menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan Partai, maka keberhasilan perjuangan akan dapat dicapai. Prinsip istiqamah itu akan terus ditegakkan dan dimantapkan dalam perjuangan Partai

dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapai cita-cita nasional.

3) Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Keadilan

Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip kebenaran ini, perjuangan Partai mengarah pada perlawanan terhadap kebatilan, karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebatilan. Meskipun begitu, kebenaran yang menjadi prinsip Perjuangan Partai bukanlah kebenaran yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wata'ala yang Maha Benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi, kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun.

Prinsip kejujuran atau amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apa pun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan, keserasian, dan ketenteraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penunaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga, sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat.

PPP akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan nilai keadilan di dalam tiap gerak langkah perjuangannya. Tegaknya keadilan (justice) adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik, sehingga dapat menimbulkan keharmonisan, keserasian, keseimbangan, ketenteraman, dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan, dan konflik.

4) Prinsip Musyawarah

PPP berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa yang perlu terus ditumbuhkembangkan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dengan musyawarah tidak dapat dicapai mufakat, maka tidak tertutup kemungkinan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak, namun harus dicegah adanya diktator mayoritas.

5) Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan.

PPP mendasarkan perjuangannya atas dasar prinsip persamaan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala. Ini adalah keyakinan yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran Partai, sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme yang dapat memerosotkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan dengan prinsip kebersamaan, PPP berjuang untuk mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dalam memikul beban dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proposional, sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan, dan dikucilkan. Di samping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsip menegakkan dan mempertahankan persatuan

dan kesatuan bangsa, sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan.

PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan, dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan secara partisipatoris. Karena itu, prinsip ini perlu dipelihara terus-menerus serta diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam memikul beban dan tanggung jawab untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih cerah di masa mendatang.

6) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

PPP mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan yang tercela. Prinsip ini juga menjadi landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan, dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.

Dengan prinsip ini Partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak terjadi apa yang disebut *political decay* (pembusukan politik) yang diakibatkan oleh sikap membiarkan kemunkaran yang lebih jauh dapat merusak tatanan masyarakat secara keseluruhan.

Sumber: <http://www.ppp.or.id>

Lampiran III

Kutipan khittah PPP

KHITTHAH DAN PROGRAM PERJUANGAN PPP

MUKADDIMAH

Khitthah dan Program Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan garis-garis besar perjuangan Partai yang mencakup ideologi, latar belakang sejarah, hakikat dan kaidah perjuangan, jati diri Partai, cita-cita politik dan visi perjuangan, serta program strategis partai secara garis besar untuk mewujudkan tujuan dan usaha partai sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPP, dalam rangka berperan aktif mewujudkan tujuan nasional seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Khitthah dan Program Perjuangan PPP ini disusun setelah mencermati perubahan lingkungan strategis dan kondisi objektif partai, yang merupakan cerminan reorientasi, redefinisi, dan reposisi partai dalam rangka peningkatan, penyempurnaan, dan pembaharuan dari Khitthah dan Program Perjuangan PPP sebelumnya.

Khitthah dan Program Perjuangan PPP ini juga diharapkan menjadi pedoman dan memberikan arah yang mengikat bagi seluruh anggota dan struktur partai dari atas sampai ke bawah dalam melaksanakan usaha dan kegiatan Partai. Secara internal, sasarannya diarahkan pada upaya pemantapan PPP sebagai partai politik yang demokratis, sehat, bersatu,

mandiri, berkualitas, memiliki kemampuan daya saing untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik nasional, sehingga akan meningkatkan perannya sebagai kekuatan sosial politik dalam pembangunan nasional dan pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sedangkan sasaran eksternalnya adalah semakin memantapkan peran strategis partai dalam menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam panduan moral Islam melalui kemampuan partai dalam menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara, sekaligus menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

KHITTAH PERJUANGAN

Ideologi

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T'a'ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk memuliakan martabat kemanusiaan pada derajat yang paling sempurna di antara ciptaan-Nya. Islam sebagai ad-dien merupakan sekumpulan perintah dan larangan (syariat) yang

mengandung tuntunan kebajikan bertujuan menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk sekalian alam semesta (rahmatan lil 'alamiin).

Keyakinan terhadap universalitas Islam menuntut keharusan untuk meyakini adanya satu-satunya kebenaran yang mutlak dalam ajaran Islam dan pengakuan terhadap kemampuan ajaran Islam untuk diterapkan oleh siapa pun dan dimana pun serta dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimana pun.

Keyakinan terhadap universalitas Islam harus disikapi dengan menjadikan nilai ajaran Islam sebagai tolok ukur dan pembuat kriteria untuk menilai segala sesuatu.

Keyakinan terhadap universalitas Islam juga menuntut keharusan untuk menerapkan nilai ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan serta menolak segala sesuatu yang diyakini bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

PPP menyadari bahwa kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan rahmat bagi umat yang harus diterima sebagai pelangi dinamika untuk mencapai kebenaran hakiki. Sebab sikap menghormati berbagai perbedaan pikiran dan pandangan merupakan wasilah bagi terbentuknya kehidupan kolektif yang dilandasi semangat persaudaraan (ukhuwah), tolong menolong (ta'awun), dan toleransi (tasamuh).

PPP menyadari, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran dan paham keagamaan merupakan suatu yang wajar, sebagai konsekuensi dari pranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Untuk hal tersebut sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat orang lain

dan menolak dialog, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (tasamuh). Sikap itu juga merupakan egoisme (ananiyyah) dan fanatisme kelompok (ananiyyah hizbiyyah) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-'adawah), pertentangan (al-tanazu'), dan perpecahan (al-insyiqaq).

PPP memandang bahwa paham keagamaan yang dianut mayoritas umat Islam Indonesia dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia adalah paham keagamaan ahlussunnah wal jama'ah dalam arti luas. Yaitu suatu paham keagamaan yang bersandar kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta salaf as-sholeh. Paham keagamaan Islam ahlusunnah wal jama'ah adalah paham keagamaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), menjaga keseimbangan (tawazun), dan menebarkan nilai-nilai kasih sayang untuk semesta alam (rahmatan lil 'alamiin). Paham keagamaan ahlusunnah wal jama'ah menolak segala bentuk sikap dan pandangan yang ekstrim (tatharruf), anarkisme, radikalisme dan budaya kekerasan lainnya.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh pemikiran, sikap dan kebijakan Partai dan kader-kadernya harus bersumber dari ajaran Islam. Ideologi adalah sekumpulan nilai yang dihubungkan secara sistemik yang menjadi dasar sebuah tindakan. Ideologi adalah penuntun, pedoman dan arah untuk mencapai tujuan politik. Untuk itu perlu terus dilakukan penanaman dan internalisasi nilai-nilai ideologi kepada semua kader dan komponen partai yang hakikatnya merupakan aparat ideologi partai (ideological party apparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-

cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

Lampiran IV

Kutipan jati diri PPP

JATI DIRI PPP

PPP adalah partai politik dengan jati diri Islam yang merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), sebagai penerus estafeta perjuangan politik umat Islam, berakhlakul karimah, berwawasan ke-Indonesia-an, berorientasi keumatan dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan bathin yang diridloi Allah Subhanahu Wata'ala (Baladun Thoyyibatun wa Robbun Ghafur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Rumusan jati diri PPP di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Secara historis, keberadaan PPP merupakan penerus estafeta perjuangan politik umat Islam di Indonesia. Sejak berdirinya sampai reformasi bergulir tahun 1998, PPP adalah wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari latar belakang kelahirannya, PPP yang

dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain-lain.

- 2) PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan

politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti radikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang Rahmatan Lil Alamin.

- 3) Orintasi perjuangan politik PPP adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan berakhlakul karimah, serta bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin, menjunjung tinggi nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang diridai Allah Subhanahu Wata'ala (Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks ini, PPP berkehendak kuat untuk mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan yang demokratis dan tegaknya supremasi hukum. Pada saat yang bersamaan, PPP bertekad menjadikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan dan sumber inspiratif dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sumber: <http://www.ppp.or.id>

Lampiran V

Kutipan sejarah pendirian PKB

SEJARAH PENDIRIAN PKB

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya.

Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU

Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Namun demikian, sikap yang ditunjukkan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewartakan aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuah parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M.

Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam menginventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi politik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasi tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasi, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Sumber: <http://www.dpp.pkb.or.id/sejarah-pendirian>

Lampiran VI

Kutipan Naskah Deklarasi PKB

NASKAH DEKLARASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bahwa dalam kurun tiga dasawarsa terakhir ini, perjuangan bangsa mencapai cita-cita tersebut terasa semakin jauh dari yang diharapkan. Pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya telah mengabaikan faktor rakyat sebagai pemegang kedaulatan, pengingkaran terhadap nilai-nilai dan prinsip-

prinsip tersebut telah melahirkan praktik kekuasaan tidak terbatas dan tidak terkendali, yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat.

Bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut serta mencegah terulangnya kesalahan serupa dimasa mendatang, diperlukan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Didalam tatanan kehidupan yang demokratis itu, warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari bangsa Indonesia bertekad untuk bersama komponen bangsa lain mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, berakhlak mulia dan bermartabat melalui suatu wadah partai politik.

Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah dan inayah Allah SWT serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa.

Jakarta, 29 Rabiul Awwal 1419 H/23 Juli 1998 M

Para Deklarator

MUNASIR ALI

ILYAS RUCHIYAT

ABDURRAHMAN WAHID

A. MUSTOFA BISRI

A. MUHITH MUZADI

<http://www.dpp.pkb.or.id/naskah-deklarasi>

Lampiran VII

Kutipan mabda siyasi PKB

MABDA SIASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

- 1) Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain didunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.
- 2) Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (as-shidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-'adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta'awun) serta konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga negara didepan hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus ditegakkan.

- 3) Dalam mewujudkan apa yang selalu dicita-citakan tersebut, misi utama yang dijalankan Partai Kebangkitan Bangsa adalah tatanan masyarakat beradab yang sejahtera lahir dan batin, yang setiap warganya mampu mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaannya. Yang meliputi, terpeliharanya jiwa raga, terpenuhinya kemerdekaan, terpenuhinya hak-hak dasar manusia seperti pangan, sandang, dan papan, hak atas penghidupan/perlindungan pekerjaan, hak mendapatkan keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzu al-Nafs), terpeliharanya agama dan larangan adanya pemaksaan agama (hifdzu al-din), terpeliharanya akal dan jaminan atas kebebasan berekspresi serta berpendapat (hifdzu al-Aql), terpeliharanya keturunan, jaminan atas perlindungan masa depan generasi penerus (hifdzu al-nasl) dan terpeliharanya harta benda (hifdzu al-mal). Misi ini ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar yakni menyerukan kebajikan serta mencegah segala kemungkinan dan kenyataan yang mengandung kemunkaran.
- 4) Penjabaran dari misi yang di emban guna mencapai terwujudnya masyarakat yang dicitakan tersebut tidak bisa tidak harus dicapai melalui keterlibatan penetapan kebijakan publik. Jalur kekuasaan menjadi amat penting ditempuh dalam proses mempengaruhi pembuatan kebijakan publik melalui perjuangan pemberdayaan kepada masyarakat lemah, terpinggirkan dan tertindas, memberikan rasa aman, tenteram dan terlindungi terhadap kelompok masyarakat minoritas dan membongkar sistem politik, ekonomi, hukum dan sosial

budaya yang memasung kedaulatan rakyat. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, upaya mengartikulasikan garis perjuangan politiknya dalam jalur kekuasaan menjadi hal yang niscaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 5) Partai Kebangkitan Bangsa sadar dan yakin bahwa kekuasaan itu sejatinya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan yang ada pada diri manusia merupakan titipan dan amanat Tuhan yang dititipkan kepada manusia yang oleh manusia hanya bisa diberikan pada pihak lain yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengemban dan memikulnya. Keahlian memegang amanat kekuasaan itu mensyaratkan kemampuan menerapkan kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
- 6) Dalam kaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kekuasaan yang bersifat demikian itu harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka menegakkan nilai-nilai agama yang mampu menebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan bagi semesta. Manifestasi kekuasaan itu harus dipergunakan untuk memperjuangkan pemberdayaan rakyat agar mampu menyelesaikan persoalan hidupnya dengan lebih maslahat. Partai Kebangkitan Bangsa berketetapan bahwa kekuasaan yang hakekatnya adalah amanat itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dapat dikontrol pengelolaannya oleh rakyat. Kontrol terhadap kekuasaan itu hanya mungkin dilakukan manakala kekuasaan tidak tak terbatas dan tidak memusat di satu tangan, serta berada pada mekanisme sistem yang institusionalistik, bukan

bertumpu pada kekuasaan individualistik, harus selalu dibuka ruang untuk melakukan kompetisi kekuasaan dan perimbangan kekuasaan sebagai arena mengasah ide-ide perbaikan kualitas bangsa dalam arti yang sesungguhnya. Pemahaman atas hal ini tidak hanya berlaku saat memandang kekuasaan dalam tatanan kenegaraan, melainkan juga harus terefleksikan dalam tubuh internal partai.

- 7) Partai Kebangkitan Bangsa menyadari bahwa sebagai suatu bangsa pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras, tatanan kehidupan bangsa Indonesia harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut haruslah dijiwai dengan sikap mengembangkan hubungan tali persaudaraan antar sesama yang terikat dengan ikatan keagamaan (ukhuwah diniyah), kebangsaan (ukhuwah wathoniyah), dan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah), dengan selalu menjunjung tinggi semangat akomodatif, kooperatif dan integratif, tanpa harus saling dipertentangkan antara sesuatu dengan yang lainnya.
- 8) Partai Kebangkitan Bangsa bercirikan humanisme religius (insaniyah diniyah), amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis, yang berwawasan kebangsaan. Menjaga dan melestarikan tradisi yang baik serta mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik untuk ditradisikan menjadi corak perjuangan yang

ditempuh dengan cara-cara yang santun dan akhlak karimah. Partai adalah ladang persemaian untuk mewujudkan masyarakat beradab yang dicitakan, serta menjadi sarana dan wahana sekaligus sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa. Partai dalam posisi ini berkehendak untuk menyerap, menampung, merumuskan, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat guna menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil dan demokratis.

- 9) Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras, dan lintas golongan yang dimanestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Partai Kebangkitan Bangsa bersifat independen dalam pengertian menolak segala bentuk kekuasaan dari pihak manapun yang bertentangan dengan tujuan didirikannya partai.

Sumber: <http://www.dpp.pkb.or.id/mabda-syiasi>

Tentang Penulis



Dr. Rofiq Mahfudz, M.Si adalah kader Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Pria kelahiran Rembang, 5 Maret 1973 ini mulai diberi amanat mengabdikan kepada warga NU di tingkat Provinsi Jawa Tengah (PWNU Jateng) sejak tahun 2013 dengan ditunjuk sebagai wakil bendahara sampai 2019. Pada kepengurusan PWNU Jawa Tengah periode 2019-2023 pria yang akrab disapa Kiai Rofiq diminta menjadi wakil sekretaris.

Sebagai anak yang lahir di kampung santri Karangmangu Sarang Rembang, putra dari pasangan H. Mahfudz dan Hj. Munawaroh itu mengawali pendidikannya di sejumlah pondok pesantren, mulai dari Pondok Pesantren As-Shomadiyah Tuban Jawa Timur (lulus 1991), Pondok Pesantren Darun Najah Paron Ngawi Jawa Timur, pondok pesantren di kampungnya, yakni Madrasah Ghozaliyyah Syafi'iyah (MGS) Sarang Rembang, hingga Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo (sampai 1995).

Selain menempa pendidikan di dalam pondok pesantren tradisional (*salaf*) dan modern (*khalaf*), Kiai Rofiq juga menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan SMA di lingkungan pondok pesantren. Pada tahun 1995 Kiai Rofiq melanjutkan sekolah formalnya di Fakultas Dakwah IAIN (kini UIN) Walisongo Semarang, lalu melanjutkan pendidikan magister dan doktoralnya di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan mengambil bidang ilmu politik.

Sejak di pesantren dan sekolah, putra pertama dari lima bersaudara; H. Abdul Rouf Mahfudz (Kemenag RI), Mohamad Roghib Mahfudz (pengusaha), Zumratul Maksudah Mahfudz (pengusaha), dan Nasirudin Mahfudz (DPRDF-PKB Kabupaten Rembang), aktif di berbagai organisasi. Saat kuliah di IAIN Walisongo ia menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan SMF-SMI (Senat Mahasiswa Fakultas-Institut), juga aktif dalam organisasi ekstra Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari tingkat kampus, Kota Semarang, hingga Provinsi Jawa Tengah.

Kini, suami dari Sakinah Hidayati dan ayah dari Rijfa T. Zahra, M. Akhtar Rijvi TF, dan Gustav A. Haekal, selain waktunya dihabiskan untuk mengabdikan di PWNU Jawa Tengah, juga tercatat sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, serta menjadi pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rois Cendekia Ngaliyan Semarang.

Sebagai akademisi dan intelektual dari lingkungan pesantren, Kiai Rofiq aktif menulis di beberapa jurnal nasional dan internasional serta berbagai media massa, baik cetak maupun online. Beberapa karyanya antara lain *Election Regulation Ambiguity in Political Party Financing: An Analysis of the Open Proportional System in Indonesia* (2022), *The Decline of Political Party Public Financing and the Emergence of Political Cartel in Indonesia: A Study of Partai Kebangkitan Bangsa* (2022), dan *Begawan Politik: Pergulatan Politik Kiai dalam Misi Keumatan, Kemandirian, dan Kesejahteraan* (2023).

